

# KEPENDUDUKAN INDONESIA

Determinan Fertilitas di Indonesia

*Syahmida Syahbuddin Arsyad dan Septi Nurhayati*

Pengaruh Pendidikan terhadap Ketimpangan Pendapatan Tenaga Kerja di Indonesia

*Ribut Nurul Tri Wahyuni dan Anugerah Karta Monika*

Analisis Kemiskinan Anak Balita pada Rumah Tangga Di Provinsi Sumatera Barat

*Nasri Bachtiar, Mora J. Rasbi dan Rahmi Fahmi*

Memudarnya Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

*Deny Hidayati*

Karakteristik Kewirausahaan Pengusaha Kecil dan Strategi Pengembangan Usahanya di Masa Depan: Studi Kasus Pengusaha Pakaian Jadi di Depok

*Zantermans Rajagukguk*

Corruption in Accessing and Utilizing the Common Property Resources in Indonesia

*Lengga Pradipta*



LIPI

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

Jurnal Kependudukan Indonesia	Vol. 11	No. 1	1-70	Jakarta, Juni 2016	ISSN 1907-2902
-------------------------------	---------	-------	------	--------------------	----------------

Jurnal Kependudukan Indonesia merupakan media informasi, komunikasi, dan pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah kependudukan, ketenagakerjaan dan ekologi manusia. Jurnal ini merupakan *peer-reviewed* jurnal Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2 Kependudukan-LIPI) yang diterbitkan dua kali dalam setahun. Artikel dapat berupa hasil penelitian, gagasan konseptual, tinjauan buku, dan jenis tulisan ilmiah lainnya yang ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia.

**Penanggung Jawab  
Pemimpin Redaksi  
Dewan Redaksi**

Prof. Dr. Aswatini, MA  
Dra. Titik Handayani, M.Si  
Dra. Mita Noveria, MA  
Widayatun, SH, MA  
Dra. Ade Latifa, M.Hum  
Zainal Fatoni, MPH  
Vanda Ningrum, MGM  
Syarifah Aini Dalimunthe, M.Sc.  
Andini Desita Ekaputri, MSE  
Intan Adhi Perdana Putri, M.Si  
Puguh Prasetyoputra, M.H.Econ  
Puji Hartana, S.Sos

**Mitra Bestari**

Prof. Gavin W. Jones, Ph.D., National University of Singapore-Singapore  
Prof. Haruo Kuroyanagi, Sugiyama Jogakuen University-Japan  
Prof. Terence H. Hull, Ph.D., Australian National University- Australia  
Prof. Ben White, Ph.D, Institute of Social Studies, Erasmus University, Rotterdam, Netherland  
Prof. Yoshifumi Azuma, Ph.D, Associate Professor, School of Human and Social Sciences, Ibaraki National University, Japan  
Haidong Wang, Ph.D, Assistant Professor, Institute of Health Metrics and Evaluation, Department of Global Health, University of Washington, United States  
Dr. L.G.H. Laurens Bakker, Assistant Professor, Faculty of Social and Behavioural Sciences, University of Amsterdam, Netherlands  
Salahudin Muhidin, Ph.D, Faculty of Business and Economics, Macquarie University, Australia  
Dr. Triarko Nurlambang, Universitas Indonesia, Indonesia  
Dr. Drs. Semiarti Aji Purwanto, M.Si, Universitas Indonesia, Indonesia  
Sri Irianti, SKM, M.Phil, Ph.D, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, Indonesia  
Evi Nurvidya Arifin, Ph.D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Indonesia  
Dr. Drs. Chotib M.Si, Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Indonesia  
Dr. dr. Sabarinah B. Prasetyo, M.Sc, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, Indonesia  
Sukamdi, M.Sc, Ph.D, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia  
Dr. Edy Priyono, ME, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Indonesia  
Prof. Drs. Heru Santosa, M.S, Ph.D, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara, Indonesia  
Dr. Makmuri Sukarno, MA, Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Indonesia  
Dr. Augustina Situmorang, MA, Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Indonesia  
Drs. Soewartoyo Soewartoyo, MA, Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Indonesia  
Dr. Deny Hidayati, MA, Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Indonesia  
Dr. Djoko Hartono, Konsultan Bank Dunia, Indonesia  
Dr. Zuzy Anna, Padjajaran University, Indonesia  
Dr. Dyah Rahmawati Hizabaron, Universitas Gadjah Mada, Indonesia  
Helena Rea, MA, BBC Media Action

**Alamat Redaksi**

Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
Widya Graha LIPI, lantai X, Ruang 2127  
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12190-Indonesia  
Tromol Pos 250/JKT 1002,  
Telp. +62 21 5207205, 5225711, 5251542 Pes/ext. 2106  
Fax: +62 21 5207205  
*E-mail:* jurnalkependudukanindonesia@mail.lipi.go.id  
*Website:* www.kependudukan.lipi.go.id

**Penerbit**

Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
Widya Graha LIPI, lantai X  
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12190-Indonesia  
Telp. +62 21 5207205, 5225711, 5251542 Pes/ext. 2106



Determinan Fertilitas di Indonesia

*Syahmida Syahbuddin Arsyad dan Septi Nurhayati*

Pengaruh Pendidikan terhadap Ketimpangan Pendapatan Tenaga Kerja di Indonesia

*Ribut Nurul Tri Wahyuni dan Anugerah Karta Monika*

Analisis Kemiskinan Anak Balita pada Rumah Tangga di Provinsi Sumatera Barat

*Nasri Bachtiar, Mora J.Rasbi, dan Rahmi Fahmi*

Memudarnya Nilai Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

*Deny Hidayati*

Karakteristik Kewirausahaan Pengusaha Kecil dan Strategi Pengembangan Usahanya di Masa Depan: Studi Kasus Pengusaha Pakaian Jadi di Depok

*Zantermans Rajagukguk*

Corruption in Accessing and Utilizing the Common Property Resources in Indonesia

*Lengga Pradipta*





**JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA**

Volume 11, Nomor 1, Juni 2016

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	vii-viii
ABSTRAK/ABSTRACT	ix-xvi
Determinan Fertilitas di Indonesia <i>Syahmida Syahbuddin Arsyad dan Septi Nurhayati</i>	1-14
Pengaruh Pendidikan terhadap Ketimpangan Pendapatan Tenaga Kerja di Indonesia <i>Ribut Nurul Tri Wahyuni dan Anugerah Karta Monika</i>	15-28
Analisis Kemiskinan Anak Balita pada Rumah Tangga di Provinsi Sumatera Barat <i>Nasri Bachtiar, Mora J.Rasbi, dan Rahmi Fahmi</i>	29-38
Memudarnya Nilai Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air <i>Deny Hidayati</i>	39-48
Karakteristik Kewirausahaan Pengusaha Kecil dan Strategi Pengembangan Usahanya di Masa Depan: Studi Kasus Pengusaha Pakaian Jadi di Depok <i>Zantermans Rajagukguk</i>	49-66
Corruption in Accessing and Utilizing the Common Property Resources in Indonesia <i>Lengga Pradipta</i>	67-74



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT kami ucapkan atas terbitnya Jurnal Kependudukan Indonesia. Jurnal Kependudukan Indonesia (JKI) kembali hadir pada Volume 11, No.1, Juni 2016 yang sekaligus merupakan edisi perdana yang berbasis elektronik (*e-journal*) melalui *Open Journal System* (OJS). Tampilan JKI dalam format elektronik dapat dilihat pada laman <http://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/>. Perubahan format JKI dari bentuk cetak menjadi jurnal berbasis elektronik akan memudahkan akses penulis mengirimkan dan melihat kemajuan artikel. Sedangkan bagi pembaca akan memperoleh artikel terbaru dan kajian kependudukan terkini dengan lebih praktis.

Pada terbitan ini JKI menyajikan enam topik yang bervariasi dengan penulis dari berbagai instansi. Topik-topik tulisan selain mengangkat isu yang berkaitan dengan demografi klasik seperti fertilitas, juga mengangkat persoalan ketimpangan pendapatan tenaga kerja di Indonesia, persoalan kewirausahaan, kemiskinan anak, persoalan pengelolaan sumber daya air, serta persoalan korupsi sumber daya alam yang menarik untuk dibaca dan dicermati. Para penulis yang berkontribusi pada edisi kali ini selain berasal dari Pusat Penelitian kependudukan - LIPI sendiri, sebagian besar berasal dari instansi di luar LIPI yaitu Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan-BKKBN, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas - Sumatera Barat, dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan.

Artikel pertama ditulis oleh Syahmida Syahbuddin Arsyad dan Septi Nurhayati dengan judul Determinan Fertilitas di Indonesia. Tulisan ini penting diangkat terkait dengan realitas bahwa di Indonesia fertilitas mengalami stagnasi selama 10 tahun terakhir yang masih berada pada tingkat 2,6. Artinya target yang telah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional pada tahun 2015 yaitu mencapai 2,1 anak tidak tercapai. Berdasar temuan penulis beberapa rekomendasi yang perlu diterapkan yaitu : penguatan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) tentang penundaan umur kawin, umur pertama melahirkan, umur pertama melakukan hubungan seksual kepada wanita usia muda, pendidikan melalui Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja; serta meningkatkan kemitraan dengan Kementerian Kesehatan terutama penguatan KIE dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak mengingat tingginya kontribusi kematian anak terhadap ALH.

Bahasan tentang Pengaruh Pendidikan terhadap Ketimpangan Pendapatan Tenaga Kerja adalah artikel kedua yang ditulis oleh Ribut Nurul Tri Wahyuni dan Anugerah Karta Monika. Tulisan ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik yaitu Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2013. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaruh pendidikan terhadap pendapatan lebih tinggi untuk tenaga kerja yang lebih terampil, artinya tingkat pendidikan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, pemerintah terutama pemerintah daerah harus meningkatkan investasi di bidang pendidikan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, termasuk ketimpangan pendapatan antar gender.

Artikel ketiga dengan judul Analisis Kemiskinan Anak Balita pada Rumah Tangga di Provinsi Sumatera Barat ditulis oleh Nasri Bachtiar, Mora J.Rasbi, dan Rahmi Fahmi. Usia Balita selama ini sering disebut sebagai masa keemasan (*the golden period*) dan masa kritis (*critical period*) untuk periode tumbuh kembang lanjutan hingga dewasa. Artikel ini mengemukakan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan anak Balita di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan pengolahan data menggunakan persamaan regresi logistik data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2013 menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi peluang anak Balita jatuh pada kondisi kemiskinan absolut diantaranya adalah rendahnya pendidikan, pekerjaan ibu dan kepala rumah tangga, status tinggal di wilayah pedesaan, dan memiliki Balita lebih dari satu orang. Intervensi kebijakan pengentasan kemiskinan dengan berfokus pada keluarga miskin yang mempunyai anak Balita perlu dilakukan dengan lebih komprehensif .

Artikel keempat dengan judul Memudarnya Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air ditulis oleh Deny Hidayati, peneliti senior dari Pusat Penelitian Kependudukan - LIPI. Artikel ini mendiskusikan pergeseran kearifan lokal sebagai modal sosial dalam pemenuhan kebutuhan air berdasarkan hasil desk reviews. Masyarakat yang

pada awalnya hidup harmonis dengan alam dan lingkungan melalui kebersamaan dan gotong royong, dan melihat nilai air sebagai fungsi sosial telah bergeser ke arah komersialisasi ekonomi. Lebih lanjut terlihat lunturnya pranata lokal dan lembaga pengelolaan air tradisional, serta tergerusnya ‘rasa’ kepemilikan bersama terhadap sumber daya air.

Selain persoalan sumber daya air, masih berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup, persoalan usaha kecil juga diangkat dalam artikel kelima dengan judul Karakteristik Kewirausahaan Pengusaha Kecil Pakaian Jadi di Depok, dan Prospek Usaha di Masa Depan yang ditulis oleh Zantermans Rajagukguk, peneliti utama bidang manajemen bisnis kecil pada Puslitbang Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan. Artikel tersebut mengkaji keberadaan usaha-usaha kecil konveksi di perkampungan Bulak Timur di Kota Depok. Kelemahan pengusaha kecil pakaian jadi telah mengakibatkan rendahnya karakteristik dan daya saing kewirausahaan. Kondisi ini berpangkal pada belum optimalnya kebijakan atau program pemerintah yang ditujukan untuk mengembangkan kewirausahaan. Untuk itu, penulis merekomendasikan beberapa hal diantaranya pentingnya cetak biru kebijakan khusus untuk usaha kecil yang dibuat oleh Pemerintah Kota Depok. Kebijakan tersebut perlu mengatur distribusi atau persebaran usaha kecil menurut sub-sektor dan wilayah sehingga tidak terjadi persaingan tidak sehat. Kebijakan tersebut juga termasuk pentingnya pengembangan technopark wirausaha atau technopreneurship di Kota Depok.

Artikel terakhir, atau artikel keenam menggarisbawahi isu Korupsi dalam Mengakses dan Menggunakan Sumber Daya Alam Milik Bersama di Indonesia; ditulis oleh Lengga Pradipta. Artikel ini mengkaji beberapa kasus korupsi yang berkaitan erat dengan akses pemanfaatan sumberdaya alam milik bersama (*common pool resource*). Pada saat yang sama artikel ini menganalisis keterkaitan karakteristik ekologis dalam sistem sosial dan hukum, serta menjelaskan tentang bagaimana masalah akan diselesaikan dan apa saja tindakan serta peraturan yang akan diterapkan dalam mengatasi masalah ini, mengingat bahwa korupsi dalam konteks pengelolaan sumberdaya alam milik bersama akan membawa banyak kerugian pada masyarakat dan negara.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para penulis yang telah berkontribusi dalam terbitan ini, serta pada mitra bestari : Dr. Sukamdi, Dr. Zuzy Anna, Dr. Dyah Rahmawati Hizbaron, Dr. Triarko Nurlambang, Dr. Laurens Bakker, dan Dr. Salahuddin Muhiddin yang sudah bekerja sama dengan redaksi untuk menyampaikan kritik, dan saran terhadap artikel - artikel ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan pada nara sumber dan berbagai pihak yang telah bekerja keras untuk terbangunnya e-jurnal ini. Demikian pula terima kasih kami sampaikan atas dukungan Pusat Penelitian Kependudukan-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia terhadap kesinambungan Jurnal Kependudukan Indonesia.

Selamat Membaca

Salam hangat

Redaksi Jurnal Kependudukan Indonesia



Vol 11, No 1, Juni 2016

**DDC : 300.301****Syahmida Syahbuddin Arsyad dan Septi Nurhayati*****DETERMINAN FERTILITAS DI INDONESIA****Jurnal Kependudukan Indonesia**Vol.11, No. 1, Juni 2016 Halm, 1-14*

Fertilitas mengalami stagnasi selama 10 tahun terakhir (2,6 anak) dan tidak dapat mencapai target RPJMN 2015 2,1 anak. Sementara itu, pemakaian kontrasepsi naik hanya kurang dari satu persen, dan kematian balita hanya sedikit penurunannya. Hal ini kemungkinan karena program Kependudukan dan Keluarga Berencana tidak menjadi prioritas. Tulisan ini bertujuan menganalisis faktor faktor langsung maupun tidak langsung yang paling dominan berkontribusi terhadap anak lahir hidup (ALH) berdasarkan data SDKI 2012. Data SDKI 2012 tersebut menggunakan sampel sebanyak 45.607 wanita umur 15-49 tahun sebagai unit sampel. Data dianalisis secara statistik deskriptif univariat, bivariat, dan multivariat. Dua puluh empat variabel memiliki hubungan bermakna terhadap ALH, sebelas diantaranya merupakan variabel kuat berpengaruh terhadap ALH. Dengan memperhitungkan variabel kontrol, sebelas variabel tersebut berkontribusi 66 persen terhadap ALH. Kematian anak merupakan variabel paling dominan berkontribusi terhadap ALH. Hal ini sejalan dengan teori Alberto, bahwa kematian anak cenderung mendorong untuk memiliki anak lebih banyak. Hasil juga menunjukkan fertilitas yang stagnan tidak lepas dari kontribusi penurunan kematian yang lambat. Rekomendasi dari hasil kajian ini meliputi: a). Penguatan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) tentang penundaan umur kawin, umur pertama melahirkan, umur pertama melakukan hubungan seksual kepada wanita usia muda, kuintil kekayaan terbawah, pendidikan rendah melalui Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja; b). Kemitraan dengan Kementerian Kesehatan terutama penguatan KIE dan

kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak mengingat tingginya kontribusi kematian anak terhadap ALH.

**Kata Kunci :** Fertilitas, Anak Lahir Hidup, Kematian Anak, Indonesia

**DDC : 300.370****Ribut Nurul Tri Wahyuni dan Anugerah Karta Monika*****PENGARUH PENDIDIKAN TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN TENAGA KERJA DI INDONESIA****Jurnal Kependudukan Indonesia**Vol.11, No. 1, Juni 2016 Halm, 15-28*

Pendidikan merupakan faktor penting dalam investasi sumber daya manusia. Pendidikan juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan serta menurunkan ketimpangan pendapatan tenaga kerja. Tulisan ini bertujuan menganalisis pengaruh pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan tenaga kerja di Indonesia. Hasil pengolahan data Sakernasdi Indonesia pada tahun 2013 menunjukkan bukti kuat bahwa pengaruh pendidikan terhadap pendapatan lebih tinggi untuk tenaga kerja yang lebih terampil (tenaga kerja dengan pendidikan tinggi). Dengan kata lain, pendidikan bisa mengurangi ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan terjadi karena adanya over-education, interaksi antara kemampuan dan pendidikan, serta perbedaan kualitas sekolah atau jurusan (bidang studi) antar wilayah. Jika analisis dilakukan menurut gender, ternyata pengaruh pendidikan terhadap pendapatan laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan. Pendidikan bisa mengurangi ketimpangan pendapatan antar gender. Oleh karena itu, pemerintah bisa meningkatkan investasi di bidang pendidikan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, termasuk ketimpangan pendapatan antar gender.

**Kata Kunci :** Pendidikan, Ketimpangan Pendapatan, Gender, Tenaga Kerja

---

**DDC : 301.361**

**Nasri Bachtiar, Mora J.Rasbi, dan Rahmi Fahmi**

**ANALISIS KEMISKINAN ANAK BALITA PADA RUMAH TANGGA DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

*Jurnal Kependudukan Indonesia*  
*Vol.11, No. 1, Juni 2016 Halm, 29-38*

Artikel ini bertujuan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan anak Balitadi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan karakteristik rumah tangga dan orang tua. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2013 dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pengolahan dan analisa data didasarkan pada persamaan regresi logistik. Hasil kajian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi peluang anak Balita jatuh pada kondisi kemiskinan absolut adalah disebabkan karena rendahnya pendidikan, pekerjaan ibu dan kepala rumah tangga, status tinggal di wilayah pedesaan, dan memiliki Balita lebih dari satu orang. Intervensi kebijakan pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi diperlukan implementasi yang lebih komprehensif, dan berfokus pada keluarga miskin dengan anak Balita.

**Kata Kunci :** Kemiskinan Anak, Akte Kelahiran, ASI Eksklusif, Imunisasi Dasar, Pendidikan Usia Dini

---

**DDC :300.304**

**Deny Hidayati**

**MEMUDARNYA NILAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

*Jurnal Kependudukan Indonesia*  
*Vol.11, No. 1, Juni 2016 Halm, 39-48*

Air merupakan kebutuhan vital manusia dan karena itu harus tersedia agar dapat bertahan hidup. Sebagian masyarakat Indonesia, dengan

pengetahuan lokal, kebiasaan dan budaya yang telah diwariskan secara turun temurun, memanfaatkan sumber air di daerahnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan mereka hidup harmonis dengan alam dan lingkungan di sekitarnya. Kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, sayangnya, telah memudar. Tulisan ini mendiskusikan pergeseran kearifan lokal sebagai modal sosial dalam pemenuhan kebutuhan air dan sebagai bentuk perlindungan masyarakat terhadap sumber daya air. Data dan informasi dalam tulisan ini merupakan hasil desk reviews dari berbagai laporan penelitian/kajian, buku dan dokumen serta pengalaman penulis ketika melakukan penelitian-penelitian yang relevan. Diskusi terfokus pada memudarnya nilai kearifan lokal masyarakat, seperti nilai kebersamaan dan gotong royong, bergesernya nilai air dari dimensi sosial kearah komersialisasi ekonomi, luntarnya pranata lokal dan lembaga pengelolaan air tradisional, serta tergerusnya 'rasa' kepemilikan bersama terhadap sumber daya air di sekelilingnya. Tulisan ini juga mendiskusikan pergeseran fungsi kearifan lokal dalam 'menjaga' hubungan yang harmonis antara masyarakat dan alam, sertatantangan terhadap eksistensi kearifan lokal terutama yang terkait dengan tekanan penduduk, modernisasi dan kegiatan pembangunan yang kurang memperhatikan preservasi sumber daya air dan lingkungan.

**Kata Kunci :** Kearifan Lokal, Masyarakat, Pengelolaan Sumber Daya Air, Tekanan Penduduk, Kegiatan Ekonomi dan Pembangunan

---

**DDC :300.344**

**Zantermans Rajagukguk**

**KARAKTERISTIK KEWIRAUSAHAAN PENGUSAHA KECIL DAN STRATEGI PENGEMBANGAN USAHANYA DI MASA DEPAN: STUDI KASUS PENGUSAHA PAKAIAN JADI DI DEPOK**

*Jurnal Kependudukan Indonesia*  
*Vol.11, No. 1, June 2016 Halm, 49-62*

Dalam upaya meningkatkan jumlah wirausaha di Indonesia, keberadaan usaha-usaha kecil pakaian jadi di Bulak Timur, Kota Depok menjadi sangat menarik, karena usaha-usaha ini muncul dan berkembang secara alamiah, serta menghadapi dan mengatasi berbagai masalah dengan kemampuan masing-masing. Namun akhir-akhir ini muncul kekhawatiran, apakah mereka dapat bertahan? Artikel ini bertujuan mengidentifikasi

karakteristik kewirausahaan pengusaha kecil pakaian jadi di Bulak Timur Kota Depok; untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan yang ada pada mereka, yang selanjutnya dapat dirumuskan saran strategi yang harus dilakukan, baik oleh pengusaha maupun pemerintah. Sumber data yang digunakan adalah data primer hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei terhadap 32 pengusaha atau sekitar 25% dari populasi yang dipilih secara acak sederhana. Selain itu juga dilakukan wawancara mendalam berdasar pedoman wawancara dengan beberapa nara sumber terpilih. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis secara deskriptif kuantitatif maupun kualitatif. Hasil analisis menyimpulkan bahwa para responden masih memiliki banyak kelemahan ketimbang kekuatan, yang mengakibatkan rendahnya nilai karakteristik kewirausahaan mereka. Selain itu, hambatan yang mengakibatkan terkendalanya perkembangan kewirausahaan di Depok juga masih banyak, termasuk belum optimalnya kebijakan atau program pemerintah. Agar usaha-usaha kecil di Depok dapat berkembang dengan karakteristik kewirausahaan yang tinggi, banyak hal yang harus dilakukan. Pertama, para pengusaha kecil harus berupaya membangun dan meningkatkan karakteristik kewirausahaannya, dan juga harus memahami serta melaksanakan manajemen survival. Kedua, Pemerintah Kota Depok harus memberikan dukungan antara lain dengan memperbanyak inkubator bisnis dan pelatihan-pelatihan tata kelola usaha, menyusun cetak biru usaha kecil, agar tidak terjadi persaingan tidak sehat, yang dapat juga dijadikan sebagai bahan untuk mengembangkan technopreneurship.

**Kata Kunci :** Kewirausahaan, Usaha Kecil, Pakaian Jadi, Depok.

korupsi terhadap sumberdaya alam. Artikel ini menggunakan kerangka kerja berupa ‘Sistem Socio-Ekologis’, yang akan memberikan penjelasan tentang keterkaitan karakteristik ekologis atau alami ke dalam sistem sosial dan hukum. Selanjutnya, kerangka kerja ini menjelaskan tentang bagaimana masalah akan diselesaikan dan apa saja tindakan serta peraturan yang akan diterapkan dalam mengatasi masalah ini. Sumber data yang digunakan adalah data makro ditingkat nasional yaitu peraturan perundangan mengenai sumberdaya alam dan lingkungan di Indonesia dan didukung kasus di Sumatra Barat, Kabupaten Pasaman Barat. Data didapatkan dengan cara melakukan wawancara mendalam dengan penduduk lokal di sekitar perkebunan sawit. Korupsi dalam konteks pengelolaan sumberdaya alam milik bersama akan membawa banyak kerugian pada masyarakat dan negara karena akan menyebabkan semakin berkurangnya sumberdaya. Tentunya secara keseluruhan, pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab masyarakat dan sektor swasta, tapi juga sangat membutuhkan peran serta pemerintah dan pembuat kebijakan sebagai pemangku kepentingan utama.

**Kata Kunci:** Korupsi, Pengelolaan Sumberdaya Alam, Sumberdaya Alam Milik Bersama

DCC :200.340

Lengga Pradipta

***KORUPSI DALAM MENGAKSES DAN MENGGUNAKAN SUMBERDAYA ALAM MILIK BERSAMA DI INDONESIA***

*Jurnal Kependudukan Indonesia*  
Vol.11, No. 1, Juni 2016 Halm, 63-70

Artikel ini mengkaji beberapa kasus korupsi yang berkaitan erat dengan pengelolaan sumberdaya alam, terutama dalam hal mengakses dan menggunakan sumberdaya alam milik bersama. Artikel ini ingin mengangkat persoalan krusial yaitu adanya kasus





Vol 11, No 1, June 2016

---

**DDC : 300.301**
**Syahmida Syahbuddin Arsyad and Septi Nurhayati**
***DETERMINANT OF FERTILITY IN INDONESIA***
***Jurnal Kependudukan Indonesia***  
***Vol.11, No. 1, June 2016 Page 1-14***

Fertility stagnated over the last 10 years ( 2.6), while the use of contraception increased less than one percent , and under-five mortality decline only slightly . This paper presents the results of further analysis of IDHS 2012 aim to know factors directly or indirectly as the most dominant contributing to the children ever born, sample analysis unit number of 45 607 women aged 15-49 years , were analyzed statistically descriptive univariate, bivariate ( chi - square ), multivariate (multiple linear regression). Twenty- four variables have a significant relationship to the children ever born, eleven of whom are strong variables affect the children ever born. Taking into account the control variables, the eleven variables contribute 66 per cent of children ever born. The death of a child is the most dominant variable contributing to a children ever born, and this is in line with the theory of Alberto, child mortality tend to have more children. The results also explain the stagnation of fertility which can not be separated from the contribution of the slow declining mortality so that fertility is still high. Recommendations include educational information, especially the strengthening of communication delays age -related mating age at first birth and age at first sexual intercourse for young women, the lowest wealth quintile, low education by strengthening The Information Center of Adolescent Reproductive Health Councelling; partnership with the Ministry of Health , especially the strengthening of education and information communication and quality of services mother and child care program that

concerning the highest contribution of child mortality to the children ever born.

**Keywords :** Fertility; Determinant; Indonesia

---

**DDC : 300.370**
**Ribut Nurul Tri Wahyuni and Anugerah Karta Monika**
***THE IMPACT OF EDUCATION ON INCOME INEQUALITY AMONG INDONESIAN WORKERS***
***Jurnal Kependudukan Indonesia***  
***Vol.11, No. 1, June 2016 Page 15-28***

Education is an important factor in human resource investment. Education is also expected to increase in income and decrease in income inequality. This paper analyzes returns to education in Indonesia. By processing the National Labor Force Survey data from six regions in Indonesia in 2013, we suggest a robust stylised fact: returns to education are higher for the more skilled individuals (workers who have high schooling). In other words, education can reduce wage inequality. Wage inequality occurs because of over-education, ability–schooling interactions and school quality or different fields of study. Based of gender, returns to education for men is lower than women. Education can reduce gender based wage gap. Therefore, government can increase investment in education sector to reduce wage inequality, including gender based wage gap.

**Keywords :** education, wage inequality, gender, worker

---

**DDC : 301.361**

**Nasri Bachtiar, Mora J.Rasbi, and Rahmi Fahmi**

***ANALYSIS OF CHILDREN POVERTY IN HOUSEHOLDS IN WEST SUMATERA***

*Jurnal Kependudukan Indonesia*  
*Vol.11, No. 1, June 2016 Page 29-38*

The purpose of this study is to analyze the factors that influence child poverty under age 5 years in West Sumatera based on parents and house hold characteristics. A model of logistic regression equation is developed and estimation is calculated based on raw data from National Economic Social Survey (SUSENAS) in the year of 2013 conducted by Bureau Statistical Center (BPS) Indonesia. The research findings show the significant factors that influence of absolute child poverty are the lower level of parents' education, parents occupational, the family living location and number of childs more than one.

**Keywords :** Child Poverty, Birth Certificate, Exclusive Breast Feeding, Basic- Immunization, Early Child Education

---

**DDC :300.304**

**Deny Hidayati**

***WANING VALUE OF LOCAL WISDOM IN THE MANAGEMENT OF WATER RESOURCES***

*Jurnal Kependudukan Indonesia*  
*Vol.11, No. 1, June 2016 Page 39-48*

Water is vital for human and thus it has to be made available for our life. Many communities in Indonesia, with their local knowledge, customs, and culture that are passed from generations, utilize water resources in their areas to meet daily needs. They manage the resources and live in harmony with the surrounding nature. The wisdom of community on water resource management, unfortunately, has experienced a shift. Demand for water continues to increase significantly, in line with the rapidly growing number of people. These people have different needs and development activities with less attention to the preservation of water resources and environment. This leads to change in the value of water from social good to commercialization. Water, then, has become an important issue that requires significant attention, as indicated by a substantial decline in water resource (quantity and quality). The

role of local wisdom in maintaining balance and harmony between the communities and their surrounding environment faces many challenges. This paper discusses shift in the value of local wisdom in water resources based on desk reviews and the author's field experiences in conducting relevant researches. The discussion focuses on the waning local knowledge and wisdom as social capital in the provision of community water supply and as a form of their protection against water resources.

**Keywords :** Local Wisdom, Community, Water Resource, Management, Population Pressure, Economic And Development Activities

---

**DDC :300.344**

**Zantermans Rajagukguk**

***ENTREPRENEURIAL CHARACTERISTICS OF SMALL ENTREPRENEURS AND THEIR BUSINESS DEVELOPMENT STRATEGY IN THE FUTURE: CASE STUDY OF APPAREL ENTREPRENEURS IN DEPOK***

*Jurnal Kependudukan Indonesia*  
*Vol.11, No. 1, June 2016 Page 49-62*

To increase the numbers of entrepreneurs in Indonesia, the existence of small-scale apparel businesses in the township Bulak Timur, Depok becomes fascinating, as they naturally emerge and evolve, as well as face various problems with their abilities. However, lately, there are some concerns about whether they would be able to survive. Therefore, this article aims to identify the characteristics of small-scale apparel entrepreneurs in Bulak Timur, Depok City to understand their strengths, weaknesses, opportunities, and challenges that they experience. The results would then be formulated as strategies and conveyed to both business players and government. Respondents were selected using a simple random sampling by the number of 32 entrepreneurs (25% of the population). Primary data were collected using a survey method through face-to-face interview techniques, with the help of questionnaires and in-depth interview based on interview guidelines. Data collected was processed and analyzed by using descriptive statistics. The results of this study concluded that apparel entrepreneurs in Depok still have many weaknesses rather than strengths, which led to a lower value of their entrepreneurial characteristics. In addition, there are still many barriers faced in the development of entrepreneurship in Depok, including government policies and program that were not optimal. Further

efforts must be made to grow small-scale businesses with high-value entrepreneurial characteristics in Depok. First, small-scale entrepreneurs should strive to build and enhance their entrepreneurial characteristics. They must also understand and implement survival management. Second, Depok City Government should provide support among other things by increasing business incubator and training on business management, including survival management; draw up a blueprint of small-scale businesses to prevent unfair competition, which can also be used as material to develop technopreneurship.

**Keywords:** Entrepreneurship, Apparel, Small Business, Depok.

**Keywords:** Corruption, Natural Resources Management, Common Property Resources

---

**DCC :200.340**

**Lengga Pradipta**

***CORRUPTION IN ACCESSING AND UTILIZING THE COMMON PROPERTY RESOURCES IN INDONESIA***

***Jurnal Kependudukan Indonesia***  
***Vol.11, No. 1, June 2016 Page 63-70***

This article reviews corruption cases that are associated with natural resources management, especially in accessing and utilizing common property resources in Indonesia. A crucial fact about to highlight in this article is corruption case in natural resource. This article develops social-ecological systems (SES) framework to deliver a clear roadmap for incorporating more ecological or natural characteristics into studies that explores linkage social and legal systems. The framework therefore considers how problems are defined and how action and policy are formulated to deal with these problems. This article studies macro data in National level, the law on natural resource and environment in Indonesia. The case in West Pasaman is the evidence based. The data is gathered by interviewing local people who live around palm plantations in West Pasaman. Thus, this article is also linked with Indonesian regulation about environment and natural resources. Corruption in the context of managing common property resources brings many disadvantages to community and State because it will lead to the scarcity of resources. Overall, eradicating corruption is not only on the hands of community or private sectors, but also needs active involvement from government and policy-makers as the main stakeholders.



# JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

*p-ISSN : 1907-2902 (Print)*

*e-ISSN : 2502-8537 (Online)*

## DETERMINAN FERTILITAS DI INDONESIA

### (DETERMINANT OF FERTILITY IN INDONESIA)

**Syahmida Syahbuddin Arsyad dan Septi Nurhayati**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Korespondensi penulis: [syahmida.syahbuddin@bkkbn.go.id](mailto:syahmida.syahbuddin@bkkbn.go.id)

#### **Abstract**

*Fertility experiences stagnation during the last 10 years (2.6 children) and it did not reach the target of national medium-term development plan 2015 for 2.1 children. Meanwhile, the use of contraception increased less than one percent, and mortality rate of children under five years old only slightly declined. This might be because Population and Family Planning Program is not a priority. This paper aims to analyze direct and/or indirect factors that significantly contribute to children born alive based on IDHS 2012. The IDHS 2012 data collect 45.607 women aged 15-49 years as sample units. Data was analyzed using descriptive statistics for univariate, bivariate (chi-square), and multivariate (multiple linear regression). Twenty-four variables have a significant relationship to the children born alive, eleven of the variables have strong effect to the children born alive. By taking into account control variables, the eleven variables contribute 66 per cent to children born alive. Child mortality is the most dominant variable that contributes to a children born alive This is in line with the theory of Alberto that said child mortality trigger to have more children. The results also explain that stagnation of fertility can not be separated from slow rate of mortality. Recommendations that developed by this analysis include the strengthening of communication, education, information, especially delayed age at first marriage, age at first birth and age at first sexual intercourse for young women, the lowest wealth quintile, low education through The Information Center of Adolescent Reproductive Health Councelling; b). Partnership with the Ministry of Health, especially strengthening education and information communication and quality of services mother and child care program concerning the high contribution of child mortality to the children ever born.*

**Keywords:** *Fertility, Children Born Alive, Child Mortality, Indonesia*

#### **Abstrak**

Fertilitas mengalami stagnasi selama 10 tahun terakhir (2,6 anak) dan tidak dapat mencapai target RPJMN 2015 2,1 anak. Sementara itu, pemakaian kontrasepsi naik hanya kurang dari satu persen, dan kematian balita hanya sedikit penurunannya. Hal ini kemungkinan karena program Kependudukan dan Keluarga Berencana tidak menjadi prioritas. Tulisan ini bertujuan menganalisis faktor faktor langsung maupun tidak langsung yang paling dominan berkontribusi terhadap anak lahir hidup (ALH) berdasarkan data SDKI 2012. Data SDKI 2012 tersebut menggunakan sampel sebanyak 45.607 wanita umur 15-49 tahun sebagai unit sampel. Data dianalisis secara statistik deskriptif univariat, bivariat, dan multivariat. Dua puluh empat variabel memiliki hubungan bermakna terhadap ALH, sebelas diantaranya merupakan variabel kuat berpengaruh terhadap ALH. Dengan memperhitungkan variabel kontrol, sebelas variabel tersebut berkontribusi 66 persen terhadap ALH. Kematian anak merupakan variabel paling dominan berkontribusi terhadap ALH. Hal ini sejalan dengan teori Alberto, bahwa kematian anak cenderung mendorong untuk memiliki anak lebih banyak. Hasil juga menunjukkan fertilitas yang stagnan tidak lepas dari kontribusi penurunan kematian yang lambat. Rekomendasi dari hasil kajian ini meliputi: a). Penguatan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) tentang penundaan umur kawin, umur pertama melahirkan, umur pertama melakukan hubungan seksual kepada wanita usia muda, kuintil kekayaan terbawah, pendidikan rendah melalui Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja; b). Kemitraan dengan Kementerian Kesehatan terutama penguatan KIE dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak mengingat tingginya kontribusi kematian anak terhadap ALH.

**Kata Kunci:** Fertilitas, Anak Lahir Hidup, Kematian Anak, Indonesia

## PENDAHULUAN

Kondisi fertilitas total mengalami stagnasi dalam kurun waktu sekitar 10 tahun terakhir. Hal ini ditunjukkan oleh hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2002/2003, 2007, dan 2012 yaitu 2,6 anak dan tidak dapat mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menargetkan angka 2,1 tahun 2015. Sementara itu, pemakaian kontrasepsi hanya naik perlahan dari 60,3 (SDKI 2002/03), 61,0 (SDKI 2007), menjadi 61,9 (SDKI 2012). Kondisi ini kemungkinan disebabkan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana tidak menjadi prioritas pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan hal tersebut, timbulah pertanyaan yang diajukan dalam tulisan ini yaitu: faktor apa saja yang dapat mempengaruhi angka fertilitas baik dari aspek variabel kategori langsung maupun tidak langsung; dan faktor apa yang dominan berkontribusi terhadap fertilitas? Kajian tentang faktor yang berpengaruh terhadap fertilitas di Indonesia pernah dilakukan oleh Iswarati (2009) menggunakan SDKI 2007.

Tulisan ini merupakan hasil analisis data sekunder dengan sumber data SDKI 2012. Analisis ini bertujuan untuk memahami faktor dominan yang berkontribusi terhadap fertilitas berdasarkan hasil SDKI 2012 baik dari sisi faktor langsung (*intermediate variabel*/ variabel antara) maupun tidak langsung (demografi, sosial, ekonomi, program, norma) secara nasional. Menurut Davis dan Blake (1956), ada 11 variabel yang termasuk dalam variabel antara, yaitu: umur pertama melakukan hubungan seksual, selibat permanen (tidak menikah), lamanya berstatus kawin, abstinensi sukarela, abstinensi terpaksa, frekuensi senggama, infertilitas sengaja, pemakaian kontrasepsi, infertilitas tidak disengaja, mortalitas janin disengaja. Sementara itu, menurut Freedman (1961/1962), terdapat dua faktor yang mempengaruhi variabel antara tersebut, yaitu: norma besarnya keluarga dan norma tentang variabel antara itu sendiri. Hasil analisis diharapkan memberikan informasi faktor dominan berpengaruh terhadap fertilitas dan menjadi masukan bagi para penentu kebijakan dalam merumuskan kebijakan pengendalian penduduk melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBP). Kerangka konsep tulisan ini mengacu pada teori Freedman (1961/1962) bahwa fertilitas dipengaruhi oleh faktor sosial, demografi, ekonomi, norma, lingkungan yang merupakan faktor tidak langsung yang mempengaruhi fertilitas melalui faktor langsung. Menurut Davis dan Blake (1956), faktor-faktor yang langsung mempengaruhi fertilitas disebut sebagai "*intermediate variable*", atau "*proximate determinant*" menurut

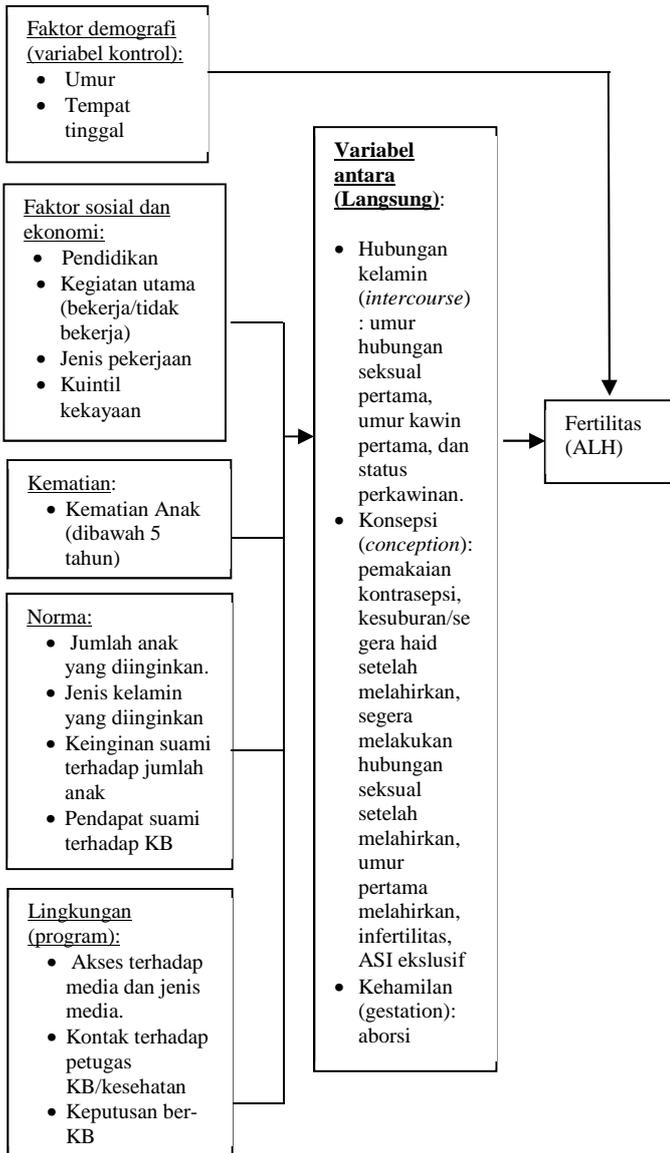
Bongaarts (1978) serta Bongaarts dan Potter (1983) (dalam tulisan ini disebut juga dengan faktor antara).

Desain analisis yang digunakan adalah *cross-sectional*, dengan pendekatan kuantitatif menganalisis hasil SDKI tahun 2012 sebagai sumber data. Pengambilan data pada waktu tertentu untuk mengetahui hubungan antara variabel independen (faktor tidak langsung dan langsung) yang mempengaruhi fertilitas (variabel dependen). Populasi analisis adalah semua wanita di Indonesia, sedangkan sampel adalah semua wanita usia subur (WUS) 15-49 tahun yang merupakan responden dalam SDKI 2012, yaitu: 45.607 wanita, dan juga sebagai unit analisis.

Variabel yang diuji sesuai dengan yang tersedia dalam SDKI 2012 yaitu: 1). Jumlah anak lahir hidup sebagai variabel dependen; 2). Faktor penentu fertilitas secara langsung dan tidak langsung sebagai variabel independen. Adapun faktor tidak langsung adalah: pendidikan kegiatan utama, jenis pekerjaan, kuintil kekayaan sebagai faktor sosial ekonomi, jumlah anak yang meninggal, faktor norma (jumlah anak yang diinginkan, jenis kelamin anak yang diinginkan, jumlah anak yang diinginkan pasangan, pendapat pasangan terhadap ber-KB, keputusan ber-KB), faktor lingkungan (terpapar terhadap media tentang KB), faktor demografi sebagai variabel kontrol (umur WUS dan tempat tinggal). Sementara itu faktor langsung adalah: 1). Faktor yang mempengaruhi terjadinya kehamilan (*intercourse*): umur pertama kali melakukan hubungan seksual, umur kawin pertama, status perkawinan; 2). Faktor konsepsi (*conception*): pemakaian kontrasepsi, kesuburan/segera haid setelah melahirkan, segera melakukan hubungan seksual setelah melahirkan, umur pertama melahirkan, infertilitas, ASI eksklusif; 3). Faktor kehamilan (*gestation*): aborsi. Skema kerangka konsepnya sebagaimana terlihat pada Gambar 1.

Analisis statistik deskriptif melalui tiga tahap, yaitu: 1). Univariat, menggambarkan distribusi frekuensi semua variabel, baik variabel kontrol maupun independen dan dependen; 2). Bivariat, adalah analisis hubungan antara masing-masing variabel independen dengan variabel dependen; 3). Multivariat, adalah untuk menentukan variabel yang paling dominan berkontribusi terhadap jumlah anak lahir hidup dengan menggunakan regresi linier ganda. Langkah-langkah dalam permodelan regresi linier ganda yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: a). Melakukan analisis bivariat untuk menentukan variabel yang menjadi kandidat model. Masing-masing variabel independen dihubungkan dengan variabel dependen (bivariat). Bila hasil uji bivariat dengan nilai  $p < 0,25$  (uji chi-square) maka

variabel tersebut dapat masuk dalam model multivariat; b). Melakukan analisis secara bersamaan, dengan pemilihan variabel yang masuk dalam model.



Gambar 1. Skema Kerangka Konsep

Ada beberapa metode untuk melakukan pemilihan variabel independen dalam analisis multivariat regresi linier ganda, namun yang akan dipakai adalah *backward*. Metode ini dilakukan dengan memasukkan semua variabel ke dalam model, kemudian satu per satu variabel independen dikeluarkan dari model berdasarkan kriteria kemaknaan tertentu. Variabel yang pertama kali dikeluarkan adalah variabel yang mempunyai korelasi parsial terkecil dengan variabel dependen. Variabel yang mempunyai nilai p 0,10 dikeluarkan dari model. Variabel independen yang berisi dua katagori merupakan variabel *dummy*. Sementara itu, variabel independen yang berisi lebih dari dua katagori (ordinal) diasumsikan sebagai variabel numerik.

## DISTRIBUSI FREKUENSI FAKTOR PENENTU FERTILITAS

Bagian ini menguraikan tentang distribusi frekuensi variabel independen dan dependen (jumlah anak lahir hidup). Tabel 1 menunjukkan hampir 45 persen wanita memiliki 1-2 anak, sebesar 21 persen punya 3-4 anak, dan sekitar hampir 7 persen memiliki 5 anak dan lebih.

Tabel 1. Distribusi Responden (Wanita Usia Subur 15-49 tahun) Menurut Jumlah Anak Lahir Hidup, SDKI 2012

Variabel Independen	n	%
Jumlah anak lahir hidup		
• 0	12.717	27,9
• 1-2	20.308	<b>44,5</b>
• 3-4	9.605	21,1
• 5+	2.977	6,5
<b>Total</b>	<b>45.607</b>	<b>100</b>

Tabel 2 memperlihatkan mayoritas wanita berumur 15-19 tahun dan 20-29 tahun, yaitu masing-masing sebesar 15 persen. Sedangkan menurut daerah tempat tinggal, sebagian besar wanita bertempat tinggal di wilayah perkotaan.

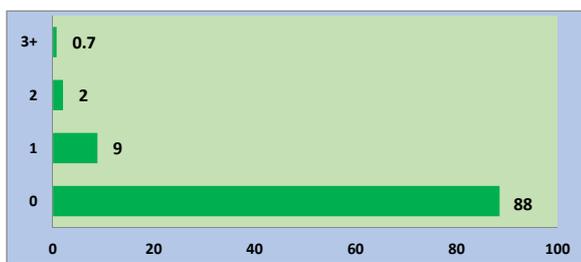
Tabel 2. Distribusi Responden Menurut Umur dan Tempat Tinggal, SDKI 2012

Variabel Kontrol	n	%
Umur		
• 15-19	6.958	<b>15,3</b>
• 20-24	6.305	13,8
• 25-29	6.970	<b>15,3</b>
• 30-34	6.863	15,0
• 35-39	6.897	15,1
• 40-44	6.248	13,7
• 45-49	5.366	11,8
Tempat Tinggal		
• Perkotaan	23.805	<b>52,2</b>
• Perdesaan	21.802	47,8
<b>Total</b>	<b>45.607</b>	<b>100</b>

Menurut pendidikan wanita yang ditamatkan, sekitar 35 persen berpendidikan tamat SMTA dan lebih tinggi, sedangkan yang tidak sekolah dan tidak tamat SD masing-masing sebesar 3 persen dan 11 persen. Enam puluh satu persen wanita berstatus bekerja, dan sisanya tidak bekerja. Tabel 3 menunjukkan sebagian besar jenis pekerjaan umumnya 26 persen berjualan, 25 persen wanita bekerja sebagai tenaga produksi, 20 persen bergerak di usaha pertanian. Berdasarkan kuintil kekayaan, 22 persen wanita berada di kuintil teratas. Hal ini menggambarkan mayoritas responden berasal dari golongan status ekonomi yang tinggi.

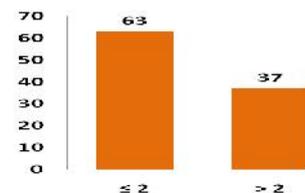
Tabel 3. Distribusi Menurut Status Bekerja dan Jenis Pekerjaan, SDKI 2012

Variabel	n	%
Status Bekerja		
• Bekerja	27.851	61
• Tidak Bekerja	17.756	39
<b>Total</b>	<b>45.607</b>	<b>100</b>
Jenis Pekerjaan		
• Profesional Teknisi	2.804	10
• Kepemimpinan	192	1
• Pejabat laksana tata usaha	1.541	6
• Berjualan	7.337	26
• Usaha Jasa	2.613	9
• Pertanian	5.508	20
• Tenaga Produksi	6.964	25
• Lainnya	888	3
• Tidak Tahu	4	0
<b>Total</b>	<b>27.851</b>	<b>100</b>
Kuintil Kekayaan		
• Paling Bawah	7.767	17
• Bawah	8.784	19
• Menengah	9.243	21
• Atas	9.743	21
• Teratas	10.071	22
<b>Total</b>	<b>45.607</b>	<b>100</b>



Gambar 2

Distribusi Wanita Menurut Kematian Anak

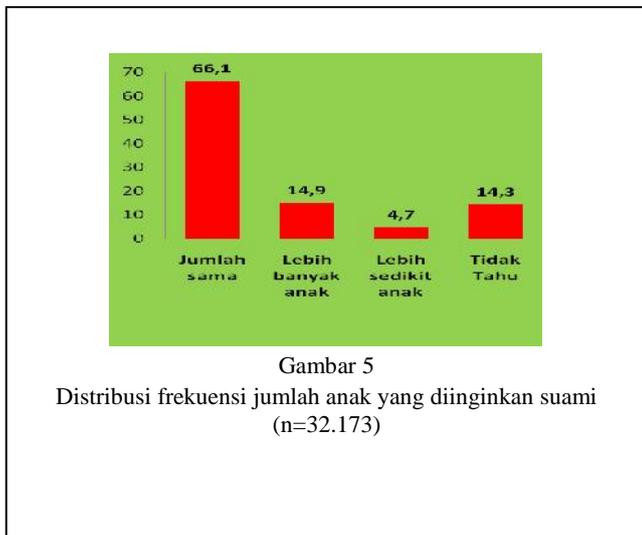
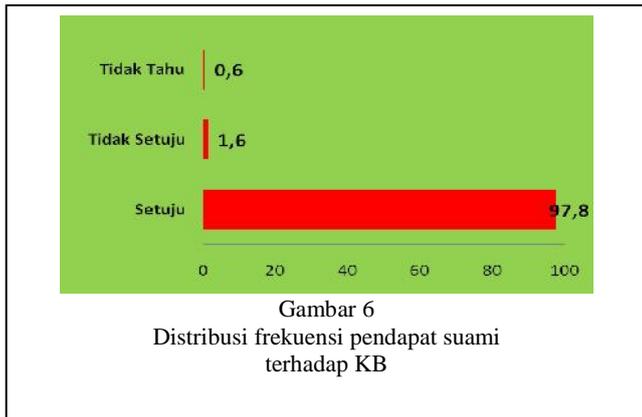
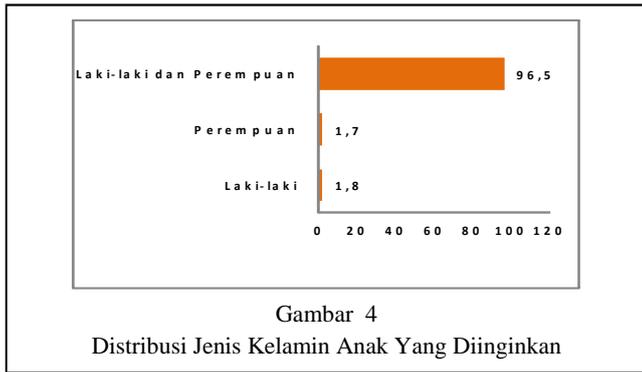


Gambar 3

Distribusi Jumlah Anak Yang Diinginkan

Selanjutnya, Gambar 3 menunjukkan hampir 89 persen wanita usia subur tidak pernah mengalami kematian anak. Sisanya hampir sembilan persen wanita pernah kehilangan anak sedikitnya satu orang, dua persen pernah kehilangan 2 anak dan kurang dari satu persen pernah mengalami kehilangan anak sampai dengan 3 orang atau lebih. Sebagian besar (63 persen) wanita menginginkan 2 anak atau kurang, sisanya 37 persen berkeinginan memiliki anak lebih dari 2 (Gambar 4). Hampir 97 persen wanita menginginkan jenis kelamin

anak laki laki-laki dan perempuan. Sedikit sekali wanita yang mengatakan ingin anak laki-laki saja atau anak perempuan saja, masing-masing sekitar satu persen. Sekitar 66 persen wanita pernah kawin mengaku suami menginginkan jumlah anak yang sama, hampir 15 persen menginginkan jumlah anak yang lebih banyak, dan sekitar 5 persen saja suami yang menginginkan jumlah anak lebih sedikit, serta sisanya mengatakan tidak tahu (Gambar 5).



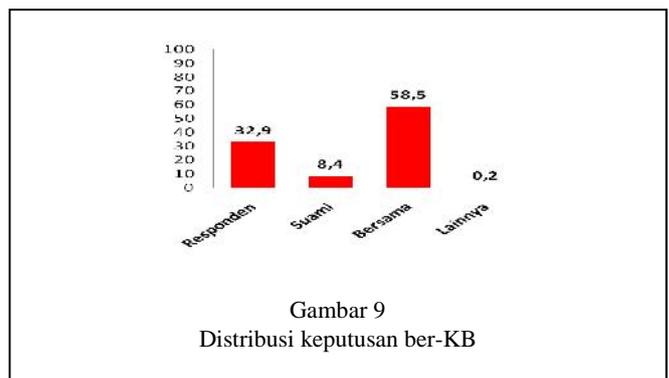
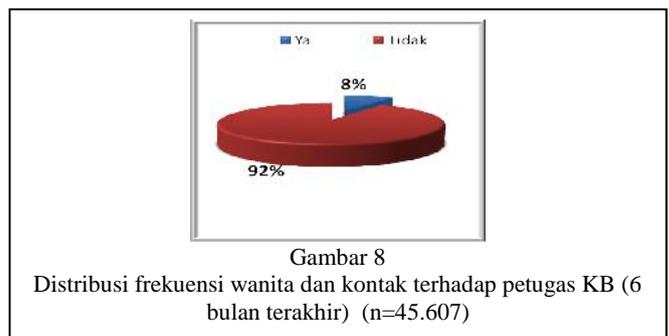
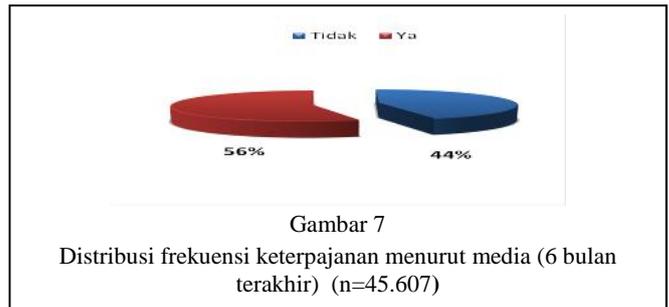
Hampir 98 persen suami setuju terhadap Program KB, 1,6 persen tidak setuju dan kurang dari satu persen mengatakan tidak tahu (Gambar 6). Lebih dari separuh wanita telah terpapar informasi mengenai keluarga berencana oleh media dalam enam bulan terakhir (Gambar 7). Informasi tersebut paling banyak bersumber dari TV (46 persen), poster (27 persen), koran/majalah dan pamflet masing-masing 15 persen, dan radio (10 persen) (Tabel 4). Mayoritas wanita kontak dengan petugas KB dalam enam bulan terakhir (Gambar 8). Lebih dari separuh wanita mengaku memutuskan menggunakan KB secara bersama-sama

dengan pasangan atau tidak mengambil keputusan secara sepihak (Gambar 9).

**Tabel 4**  
Distribusi frekuensi wanita dan keterpaparan informasi kb menurut media (6 bulan terakhir)

Sumber Informasi	%
Radio	10,0
TV	46,2
Koran/majalah	14,6
Poster	27,5
Pamlet	14,6

Tabel 5 menunjukkan sebagian besar (73 persen) wanita berstatus kawin. Kebanyakan dari wanita memulai hubungan seksual pada umur yang relatif muda yaitu 15-19 tahun (34 persen), kemudian disusul dengan mereka yang berumur 20-24 tahun (26 persen). Demikian pula dengan umur kawin pertama, sebagian besar wanita kawin pertama kali pada umur 15-19 tahun (47 persen).



Tabel 5. Distribusi Responden Menurut Faktor Langsung, SDKI 2012

Faktor Langsung	n	%
<b>Faktor Intercourse</b>		
<b>Status perkawinan</b>		
- Kawin	33.465	73,4
- Tidak Kawin	12.142	26,6
<b>Total</b>	<b>45.607</b>	<b>100</b>
<b>Umur hubungan seksual pertama</b>		
- Tidak pernah	9.822	21,6
- 15	3.060	6,7
- 15-19	15.563	34,2
- 20-24	11.932	26,2
- 25	5.181	11,4
<b>Total</b>	<b>45.607</b>	<b>100</b>
<b>Umur kawin pertama</b>		
- 15-19	15.336	47,2
- 20-24	11.999	36,9
- 25	5.189	16,0
<b>Total</b>	<b>32.525</b>	<b>100</b>
<b>Faktor Conception</b>		
<b>Pemakaian Kontrasepsi</b>		
- Ya	20.830	47,7
- Tidak	22.828	52,3
<b>Total</b>	<b>43.657</b>	<b>100</b>
<b>Mendapatkan haid lagi setelah melahirkan</b>		
- Ya	12.720	80,7
- Tidak	2.035	19,3
<b>Total</b>	<b>15.755</b>	<b>100</b>
<b>Melakukan hubungan seksual setelah melahirkan</b>		
- Ya	13.015	86,5
- Tidak	2.035	13,5
<b>Total</b>	<b>15.050</b>	<b>100</b>
<b>Umur pertama melahirkan</b>		
- 15-19	8.837	26,9
- 20-24	10.855	33,0
- 25-29	7.721	20,4
- 20	6.478	19,7
<b>Total</b>	<b>32.890</b>	<b>100</b>
<b>Infertilitas</b>		
- Ya	2.546	5,6
- Tidak	43.061	95,4
<b>Total</b>	<b>45.607</b>	<b>100</b>
<b>Pemberian ASI eksklusif</b>		
- Ya	2.621	16,6
- Tidak	13.209	83,4
<b>Total</b>	<b>15.830</b>	<b>100</b>
<b>Faktor Gestation</b>		
<b>Keguguran/Aborsi</b>		
- Tidak	33.261	89,4
- Ya	3.932	10,6
<b>Total</b>	<b>15.830</b>	<b>100</b>

Lebih dari separuh (52 persen) wanita tidak memakai alat kontrasepsi, hampir 81 persen wanita mengaku mendapatkan haid kembali setelah melahirkan, hampir 87 persen melakukan hubungan seksual setelah melahirkan, sekitar 94 persen tidak mengalami

infertilitas, dan sebagian besar (83 persen) tidak memberikan ASI eksklusif kepada anaknya, serta sebagian besar wanita melahirkan pertama kali pada umur 20-24 tahun.

### HUBUNGAN FAKTOR TIDAK LANGSUNG, FAKTOR LANGSUNG, DAN FERTILITAS

Hasil analisis hubungan variabel independen (variabel dalam faktor langsung dan tidak langsung) dan dependen menunjukkan bahwa semua variabel tersebut memiliki hubungan bermakna dengan jumlah anak lahir hidup. Namun ada sebelas variabel diantaranya yang masuk dalam model akhir atau analisis dominan faktor yang berpengaruh terhadap anak lahir hidup yang akan diuraikan berikut ini.

Proporsi wanita usia subur yang memiliki 1-2 anak lahir hidup cenderung meningkat dari mulai kuintil kekayaan terbawah sampai dengan menengah atas, kemudian menurun ketika mereka mencapai kuintil kekayaan teratas. Sebaliknya, wanita yang memiliki anak lahir hidup lebih dari dua anak cenderung menurun dengan meningkatnya kuintil kekayaannya. Kuintil kekayaan wanita mempunyai hubungan bermakna dengan jumlah anak lahir hidup yang dimilikinya (nilai  $p < 0,005$ ). Proporsi wanita yang memiliki 1-2 anak lahir hidup cenderung menurun dengan semakin banyak jumlah anak yang meninggal. Proporsi mereka yang memiliki 5 anak lahir hidup atau lebih terdapat pada wanita yang mengalami 3 anak atau lebih yang meninggal. Kondisi ini ditunjukkan oleh adanya hubungan yang bermakna antara jumlah anak yang meninggal dan jumlah anak yang dimiliki oleh wanita usia subur ( $p < 0,05$ ). Wanita yang memiliki 1-2 anak lahir hidup lebih banyak ditemukan pada mereka yang menginginkan dua anak atau kurang. Sebaliknya, mereka yang memiliki lebih dari dua anak lahir hidup cenderung ingin memiliki anak lebih dari dua anak. Dengan nilai  $p = 0,001$  menunjukkan jumlah anak yang diinginkan (anak ideal) memiliki hubungan bermakna dengan jumlah anak lahir hidup (Tabel 6).

Proporsi wanita yang memiliki 1-2 anak lebih tinggi pada wanita yang terakses dengan media yang menginformasikan tentang KB dibandingkan dengan wanita yang tidak terakses media. Sebaliknya, wanita yang memiliki lebih dari dua anak cenderung banyak pada mereka yang tidak terakses informasi tentang KB dari media. Akses terhadap media tentang KB memiliki hubungan bermakna dengan jumlah anak lahir hidup dengan nilai  $p = 0,001$ . Diantara wanita yang memiliki 1-2 anak lahir hidup tidak tampak adanya perbedaan proporsi suami/pasangan yang setuju dan tidak setuju terhadap penggunaan alat/cara KB. Wanita yang

Tabel 6. Analisis Hubungan Variabel Indeks Kuintil Kekayaan , Jumlah Anak yang Meninggal, Jumlah Anak yang Diinginkan dan Jumlah Anak Lahir Hidup yang Dimiliki, SDKI 2012

Kuintil kekayaan	Jumlah Anak Lahir Hidup						Nilai p 0,001
	0		1-2 anak		>2 anak		
	n	%	n	%	n	%	
1. Terbawah	688	10,3	3.088	46,4	2.880	43,3	
2. Menengah bawah	813	11,1	3997	54,4	2.530	34,5	
3. Menengah	815	10,8	4.222	55,9	2.516	33,3	
4. Menengah atas	960	12,1	4.618	58,4	2.326	29,4	
5. Teratas	1.029	13,3	4.383	56,6	2.329	30,1	
Jumlah Anak Meninggal							
1. 0 anak	4.306	13,1	19.555	59,4	9.055	27,5	0,001
2. 1 anak	0	0,0	725	22,2	2.546	77,8	
3. 2 anak	0	0,0	25	3,4	702	96,6	
4. 3 anak +	0	0,0	0	0,0	278	100,0	
Jumlah anak yang diinginkan							
1. 2 anak	2.727	13,4	13.502	66,3	4.127	20,3	0,001
2. > 2 anak	1.232	9,1	5.762	42,6	6.520	48,2	

mempunyai lima anak atau lebih cenderung ditemukan banyak pada mereka yang suaminya tidak setuju pada pemakaian alat/cara KB. Dengan nilai  $p=0,001$  menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara pendapat suami/pasangan dan pemakaian alat/cara KB. Wanita yang memiliki 1-2 anak lebih banyak dijumpai pada mereka yang melakukan kontak dengan petugas KB dalam 6 bulan terakhir. Sebaliknya, wanita yang mempunyai lima anak dan lebih dijumpai tinggi pada mereka yang tidak melakukan kontak dengan petugas KB dalam 6 bulan terakhir. Sebagaimana terlihat pada Tabel 7, kondisi ini ditunjukkan oleh adanya hubungan yang bermakna antara kontak dengan petugas KB dan jumlah anak yang dimiliki oleh wanita usia subur ( $p=0,01$ ).

Proporsi wanita yang mempunyai 1-2 anak cenderung terus meningkat dengan bertambah tua umur melakukan hubungan seksual pertama kali. Sebaliknya, proporsi wanita yang memiliki anak lebih dari dua cenderung banyak terdapat pada wanita yang melakukan hubungan seksual pada usia yang lebih muda. Dengan nilai  $p=0,01$  menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara umur hubungan seksual pertama kali dan jumlah anak lahir hidup.

Proporsi wanita yang memiliki 1-2 anak ditemukan lebih tinggi pada wanita yang tidak segera melakukan hubungan seksual setelah melahirkan.

Sebaliknya, wanita yang mempunyai anak lebih dari dua banyak dijumpai pada wanita yang segera melakukan hubungan seksual setelah melahirkan. Wanita yang melakukan hubungan seksual segera setelah melahirkan punya hubungan bermakna dengan jumlah anak yang dimilikinya dengan nilai  $p=0,001$ .

Proporsi wanita yang memiliki 1- 2 anak meningkat sejalan dengan meningkatnya umur melahirkan anak pertama yang dimulai dari kelompok umur 15-19 tahun sampai dengan kelompok umur 25-29 tahun, dan angka ini menurun pada wanita yang melahirkan pertama kali pada kelompok umur 30 tahun atau lebih. Artinya, mereka yang memiliki anak relatif sedikit, tampak pada mereka yang masih muda. Sedangkan proporsi wanita yang punya lebih dari dua anak tertinggi pada mereka yang melahirkan anak pertama berusia 30 tahun atau lebih tua. Dengan perolehan nilai  $p=0,001$  menunjukkan bahwa umur melahirkan anak pertama memiliki hubungan bermakna dengan jumlah anak lahir yang dimilikinya (Tabel 7). Proporsi wanita yang mempunyai 1-2 anak tertinggi pada wanita yang mengalami ketidaksuburan. Namun sebaliknya, mereka yang memiliki anak lebih dari dua terbanyak pada wanita yang tidak pernah mengalami ketidaksuburan. Dengan nilai  $p=0,001$  menandakan adanya hubungan yang bermakna antara wanita yang infertil (tidak subur) dan jumlah anak lahir hidup yang dimilikinya.

Tabel 7. Analisis Hubungan Variabel Terpapar Media Tentang KB, Kontak dengan Petugas KB dalam 6 Bulan Terakhir, Pendapat Suami terhadap KB dan Jumlah Anak Lahir Hidup yang Dimiliki, SDKI 2012

Kuintil kekayaan	Jumlah Anak Lahir Hidup						Nilai p 0,001
	0		1-2 anak		>2 anak		
	n	persen	n	persen	n	persen	
Terpapar terhadap media tentang KB							
• Ya	2529	12,6	11757	58,6	5791	28,8	0,001
• Tidak	1777	10,4	8551	50,0	6791	39,7	
Kontak petugas KB dalam 6 bulan terakhir							
• Ya	208	5,6	2261	61,2	1225	33,2	
• Tidak	4098	12,2	18047	53,9	11357	33,9	
Pendapat suami terhadap KB							
• Setuju	151	0,8	12430	62,0	7459	37,2	0,001
• Tidak setuju	2	0,7	210	62,3	125	37,1	
• Tidak tahu	5	4,3	51	45,1	58	50,9	

Tabel 8. Analisis Hubungan Variabel Umur Melakukan Hubungan Seksual Pertama kali, Segera Melakukan Hubungan Seksual setelah Melahirkan, Umur Melahirkan Anak Pertama dan Jumlah Anak Lahir Hidup yang Dimiliki, SDKI 2012

Umur Hubungan Seksual Pertama Kali	Jumlah Anak Lahir Hidup						Nilai p 0,001
	0		1-2 anak		>2 anak		
	n	persen	n	persen	n	persen	
Tidak pernah	1495	97,2	18	1,2	24	1,6	
• 15	93	3,0	1068	35,0	1891	62	
• 15 – 19	857	5,5	8275	53,3	6385	41,1	
• 20 – 24	1026	8,6	7522	63,2	3361	28,2	
• 25	836	16,1	3424	66,1	920	17,8	
Segera melakukan hubungan seksual setelah melahirkan							0,001
• Ya	0	0,0	8878	68,2	4137	31,8	
• Tidak	0	0,0	1464	71,9	571	28,1	
Umur melahirkan anak pertama							0,001
• 15-19 thn	0	0,0	4463	50,5	4374	49,5	
• 20-24 thn	0	0,0	8031	74,0	2824	26,0	
• 25-29 thn	0	0,0	5135	76,4	1586	23,6	
• 30	0	0,0	2679	41,4	3799	58,6	

Tabel 9. Analisis Hubungan Variabel Infertilitas, Keguguran dan Jumlah Anak Lahir Hidup yang Dimiliki, SDKI 2012

Infertilitas	0		1-2 anak		>2		p
	n	persen	n	persen	n	persen	
1. Tidak	151	0,8	12430	62,0	12582	36,3	0,001
2. Ya	2	0,7	210	62,3	0	0,0	
Keguguran							
1. Tidak	4162	12,5	18577	55,9	10523	31,6	
2. Ya	144	3,7	1729	44,0	2059	52,4	

Tabel 10. Analisis Hubungan Variabel Umur, Tempat tinggal dan Jumlah Anak Lahir Hidup yang Dimiliki, SDKI 2012

Umur	Jumlah Anak Lahir Hidup						Nilai p
	0		1-2 anak		>2		
	n	persen	n	persen	n	persen	
15 – 19	454	48,2	482	51,1	6	0,6	0,001
20 – 24	799	20,4	3049	78,0	62	1,6	
25 – 29	1386	19,9	4939	70,9	646	9,3	
30 – 34	627	9,1	4555	66,4	1681	24,5	
35 – 39	476	6,9	3308	48,0	3113	45,1	
40 – 44	310	5,0	2414	38,6	3524	56,4	
45 – 49	255	4,7	1561	29,1	3551	66,2	
Tempat Tinggal	Jumlah Anak Lahir Hidup						Nilai p
	0		1-2 anak		>2		
	n	persen	n	persen	n	persen	
Perdesaan	0	0,0	1764	67,3	857	32,7	0,001
Perkotaan	0	0,0	9148	69,3	4061	30,7	

Proporsi wanita yang memiliki 1-2 anak lebih tinggi pada wanita yang tidak pernah mengalami keguguran. Sebaliknya wanita yang punya anak lebih dari dua banyak dijumpai pada wanita yang pernah mengalami keguguran. Wanita yang mengalami keguguran punya hubungan bermakna dengan jumlah anak yang dimilikinya dengan nilai  $p=0,001$  (Tabel 10).

### HUBUNGAN ANTARA FAKTOR DEMOGRAFI DAN FERTILITAS

Proporsi wanita yang mempunyai 1-2 anak ditemukan tertinggi pada wanita dalam kelompok umur 20-24 tahun, dan angka ini terus menurun sejalan dengan semakin bertambahnya umur wanita. Sebaliknya, wanita yang mempunyai anak lebih dari dua terlihat proporsinya semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya umur wanita. Kondisi ini menunjukkan

bahwa mereka yang sudah memiliki banyak anak adalah mereka yang telah berusia lebih tua. Umur wanita memiliki hubungan bermakna dengan jumlah anak lahir hidup dengan nilai  $p=0,001$ . Proporsi wanita yang mempunyai 1-2 anak sedikit lebih tinggi diantara wanita yang tinggal di perkotaan dibandingkan mereka yang ada di perdesaan. Sebaliknya, wanita yang mempunyai lebih dari dua anak dijumpai lebih tinggi pada wanita yang tinggal di perdesaan. Dengan nilai  $p=0,001$  menandakan bahwa tempat tinggal memiliki hubungan bermakna dengan jumlah anak lahir hidup (Tabel 11).

### KONTRIBUSI FAKTOR DOMINAN TERHADAP FERTILITAS

Berdasarkan serangkaian tahap proses pemodelan analisis multivariat, diperoleh bahwa variabel yang

paling dominan berkontribusi terhadap anak lahir hidup -baik dikontrol dengan umur dan tempat tinggal maupun tidak- adalah jumlah kematian anak yang dialami WUS. Secara umum, dengan memperhitungkan variabel kontrol (faktor demografi) semua variabel terpilih masuk dalam model akhir tampak berkontribusi terhadap anak lahir hidup sebesar 66 persen. Selanjutnya, pada variabel kontribusi kejadian anak meninggal terlihat bahwa apabila wanita mengalami kematian satu anak, maka akan digantikan oleh kelahiran satu anak lagi (B=0,90). Permodelan akhir yang dihasilkan dari analisis multivariat lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 11.

diinginkan - 0,0521\*Keterpaparan terhadap media – 0,045\*Kontak dengan petugas KB selama 6 bulan terakhir; + 0,069\*Pendapat suami terhadap KB - 0,488\*Segera melakukan hubungan seksual setelah melahirkan +0,302\*Umur melahirkan pertama kali - 1,524\*Infertilitas+0,154\*Keguguran/aborsi+0,450\*U mur ibu -0,113\* tempat tinggal

Dengan model persamaan tersebut, dapat diperkirakan jumlah anak lahir hidup dengan menggunakan 5 variabel langsung dan 6 variabel tidak langsung dan 2 variabel kontrol. Bila nilai koefisien B positif menunjukkan hubungan positif, sebaliknya bila nilai koefisien B negatif menunjukkan hubungan negatif.

Tabel 11. Faktor Dominan Berkontribusi terhadap Jumlah Anak Lahir Hidup Setelah Memperhitungkan Variabel Kontrol (Faktor Demografi), SDKI 2012

Variabel penentu fertilitas	Unstandardized Coefficients		Standar dized Coefficients	t	P Value (Sig).
	B	Std. Error (SE)	Beta		
(Constant)	0,688	0,075		9,128	0,000
1. Indeks kuintil	-0,071	0,006	-0,076	-11,545	0,000
2. Jumlah Anak Mati	0,904	0,022	0,247	41,807	0,000
3. Anak yang di Inginkan	0,291	0,015	0,111	19,058	0,000
4. Media	0,040	0,015	0,015	2,557	0,011
5. Petugas KB	-0,045	0,022	-0,012	-2,055	0,040
6. Pendapat Suami Terhadap KB	0,069	0,016	0,024	4,263	0,000
7. Hubungan seksual pertama	-0,488	0,010	-0,304	-48,483	0,000
8. Segera melakuka hubungan seksual setelah melahirkan	0,092	0,026	0,020	3,479	0,001
9. Umur Melahirkan pertama	0,302	0,015	0,235	19,856	0,000
10. Infertilitas	-1,524	0,084	-0,105	-18,202	0,000
11. Keguguran / Abosrsi	0,154	0,029	0,031	5,383	0,000
12. Umur Ibu	0,450	0,011	0,466	39,656	0,000
13. Tempat Tinggal	-0,113	0,016	-0,044	-6,941	0,000

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
,811(b)	,658	,658	,747

Memperhatikan hasil akhir dengan koefisien pada kolom B, model persamaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$ALH= 0,688 -0,071 \text{ Indeks kekayaan kuintil} + 0,904*\text{Kematian anak} + 0,291*\text{Anak yang diinginkan} + 0,040 * \text{Keterpapanan media} + 0,04279*\text{Anak yg}$$

Sebagai contoh, pada variabel indeks kuintil -0,071, artinya terjadi penurunan kelahiran anak 0,071 jika terjadi peningkatan indeks kekayaan kuintil setelah dikontrol dengan kematian anak, anak yang diinginkan, keterpapanan media, kontak dengan petugas KB selama 6 bulan terakhir, pendapat suami terhadap KB, hubungan seksual pertama, segera melakukan

hubungan seksual setelah melahirkan, umur melahirkan pertama kali, inferilitas (wanita umur 35 tahun dengan punya anak 1 atau tidak punya anak), keguguran/aborsi, umur ibu dan tempat tinggal.

Kematian anak memiliki hubungan bermakna yang cukup tinggi terhadap penambahan anak lahir hidup. Pada kematian anak +0,904 menunjukkan bahwa penambahan anak lahir hidup akan naik sebanyak 0,904 anak setelah dikontrol dengan variabel indeks kuintil, anak yang diinginkan, keterpaparan media, kontak dengan petugas KB selama 6 bulan terakhir, pendapat suami terhadap KB, hubungan seksual pertama, segera melakukan hubungan seksual setelah melahirkan, umur melahirkan pertama kali, inferilitas (wanita umur 35 tahun dengan punya anak 1 atau tidak punya anak), keguguran/aborsi, umur ibu dan tempat tinggal. Kolom t dan sig t menunjukkan uji t yang dapat digunakan untuk mengetahui variabel mana saja yang berperan masuk dalam model. Pada kolom tersebut hasil terakhir memperlihatkan bahwa semua variabel memiliki nilai  $p < \text{nilai alpha}$  (0,05), yang artinya dengan menggunakan alpha 5 persen semua variabel berperan dalam menentukan jumlah anak lahir hidup.

Pada kolom Beta dapat diketahui variabel mana yang paling besar pengaruhnya dalam menentukan variabel dependennya (anak lahir hidup). Semakin besar nilai Beta semakin besar pengaruhnya terhadap variabel dependennya.

## DETERMINAN FERTILITAS BERDASARKAN SDKI 2012

Teori fertilitas yang dikembangkan oleh Davis dan Blake (1956) dikenal dengan *intermediate variabel of fertility* merupakan faktor langsung yang berpengaruh terhadap fertilitas. Selanjutnya variabel ini disebut sebagai *proximate variable of fertility* oleh Bongaarts (1978). Freedman (1975) mengembangkan faktor yang mempengaruhi fertilitas secara tidak langsung yang lebih multidisipliner yaitu mengkaji dari berbagai aspek kehidupan yaitu: sosial, ekonomi, demografi, program, dan norma tentang besar keluarga serta norma tentang *intermediate variable*. Leibenstein (1958), Garry S Becker (1976 dan 1981), Robinson dan Harbinson (1983), Nerlove (1974), Cardwell (1983) mengemukakan teori fertilitas dikaitkan dengan fertilitas atau pendekatan ekonomi sosiologis. Palloni dan Rafalimanana (1997) mengemukakan pengaruh kematian bayi terhadap fertilitas: 1). Kematian bayi secara langsung akan berpengaruh terhadap kesuburan ibunya karena tidak lagi menyusui bayinya maka fungsi ASI sebagai kontrasepsi sudah tidak ada lagi; 2). Psikologi keluarga ketika mengalami kematian

bayi/anak ingin secepatnya menggantikannya dengan hamil dan melahirkan lagi; 3). Pahami anak sebagai tabungan (*saving*) bila secara tiba-tiba terjadi kematian salah satu dari bayi yang dimilikinya, anak sebagai cadangan.

Analisis ini mengacu pada teori yang dikembangkan oleh Freedman. Ketersediaan variabel yang ada dalam SDKI 2012 memungkinkan untuk menerapkan teori Freedman tersebut walaupun ada keterbatasan studi terutama variabel norma/nilai besarnya keluarga dan norma terhadap variabel antara (*proximate determinant*).

Apabila ditinjau dari hasil uji masing-masing variabel, baik variabel yang termasuk dalam faktor langsung maupun tidak langsung, dengan jumlah anak lahir hidup sebagai variabel dependennya, maka semua variabel (25 variabel) memiliki hubungan yang bermakna dengan jumlah anak lahir hidup dengan masing-masing nilai  $p=0,001$ . Hasil analisis hubungan (analisis bivariat) menunjukkan sejalan dengan teori-teori yang telah disampaikan sebelumnya. Tampak faktor sosial dan ekonomi (pendidikan, kegiatan utama, dll) mempengaruhi secara bermakna terhadap jumlah anak lahir hidup. Begitu juga variabel yang merupakan bagian dari faktor lingkungan yaitu: akses terhadap informasi KB dan kontak dengan petugas KB selama 6 bulan terakhir sebelum survei tampak memiliki hubungan bermakna dengan jumlah anak yang dimiliki. Hal ini ditunjukkan oleh proporsi wanita yang memiliki anak lebih sedikit (1-2 anak) terdapat pada wanita yang terakses dengan media yang menyampaikan informasi tentang KB. Demikian pula, hasil analisis ini sejalan dengan teori yang dikembangkan oleh Freedman bahwa pada akhirnya norma dapat dianggap sebagai “resep” untuk membimbing serangkaian tingkah laku tertentu pada berbagai situasi yang sama. Norma/nilai terkait dengan besarnya keluarga merupakan unsur kunci dalam teori sosiologi terkait fertilitas yang dikemukakan oleh Freedman tersebut. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa pendapat suami dalam ber-KB memegang kunci untuk memiliki jumlah anak, yaitu: proporsi wanita yang memiliki 1-2 anak tertinggi terdapat pada mereka/wanita yang suaminya/pasangannya sepakat/setuju untuk menggunakan kontrasepsi.

Selanjutnya analisis ini menunjukkan bahwa enam dari tiga belas variabel yang merupakan faktor tidak langsung berpengaruh terhadap anak lahir hidup memiliki kontribusi yang cukup kuat masuk dalam model akhir, baik dikontrol maupun tidak dikontrol dengan umur dan tempat tinggal. Sementara itu, lima dari sepuluh variabel yang merupakan faktor langsung yang masuk dalam model akhir, baik dikontrol maupun

tidak dikontrol dengan umur dan tempat tinggal, berkontribusi terhadap anak lahir hidup.

Kematian anak merupakan variabel yang paling dominan berkontribusi terhadap anak lahir hidup dari sejumlah 25 variabel yang dianalisis, walaupun kontribusinya sedikit menurun ketika dikontrol dengan umur dan tempat tinggal. Kematian anak ini pun merupakan variabel yang tertinggi berkontribusi terhadap lahir hidup berdasarkan analisis lanjut data SDKI 2007 dan angkanya lebih tinggi, yaitu 123 persen (nilai  $B=1,23$ ) (Iswarati, 2009). Dengan kata lain, semakin banyak anak yang meninggal yang dialami wanita maka cenderung akan melahirkan anak semakin tinggi pula. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Palloni dan Rafalimanana (1997) yang mengemukakan tiga mekanisme yang menggambarkan hubungan antara kematian bayi dan kelahiran. Pertama, kematian bayi secara langsung akan berpengaruh terhadap kesuburan ibunya karena tidak lagi menyusui bayinya yang terkait dengan aspek psikologis ibu dengan peran air susu terhadap kontrasepsi. Kedua, psikologi keluarga yang jika mengalami kematian bayi/anak akan ingin cepat menggantikannya dengan hamil dan melahirkan lagi. Ketiga, paham anak sebagai tabungan (*saving*) bila secara tiba-tiba terjadi kematian salah satu dari bayi yang dimilikinya. Dalam hal ini sepasang suami istri cenderung akan memiliki anak banyak untuk cadangan apabila tiba-tiba kematian terjadi diluar perkiraan.

Selanjutnya, mengingat pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan mobilitas, maka hasil analisis ini telah menjawab hal tersebut bahwa kematian anak berkontribusi tertinggi terhadap anak lahir hidup. Telah diakui bahwa fertilitas cukup menurun tajam jika ditinjau pada kondisi angka kelahiran 5,61 anak per wanita antara tahun 1967-1970 (Sensus Penduduk 1971) dan angka kematian bayi 145 per 1000 kelahiran hidup pada periode yang sama. Namun selama 10 tahun terakhir ini (SDKI 2002/2003, 2007, dan 2012), kematian balita mengalami penurunan walaupun tidak tajam dan dapat dikategorikan masih tinggi, sehingga pada akhirnya memberikan dampak yang cukup berarti kepada fertilitas yang dapat ditunjukkan oleh angka fertilitas total yang stagnan dalam kurun yang sama.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Davis dan Blake (1956) serta Bongaarts (1978), pemakaian kontrasepsi berpengaruh langsung terhadap anak lahir hidup. Dalam analisis ini, uji hubungan pemakaian kontrasepsi dan jumlah anak lahir hidup memiliki hubungan yang bermakna, namun bila variabel pemakaian kontrasepsi diuji hubungannya dengan

jumlah anak lahir hidup secara bersama-sama dengan variabel lainnya, tampak tidak memiliki hubungan bermakna dan tidak masuk dalam permodelan akhir. Hal ini mungkin disebabkan karena variabel lain yang merupakan faktor langsung berpengaruh terhadap fertilitas lebih dominan dibandingkan variabel pemakaian kontrasepsi, seperti: segera melakukan hubungan setelah melahirkan, umur pertama melakukan seksual. Sedangkan pengaruh kontrasepsi terhadap fertilitas oleh hasil penelitian Letamo dan Letamo (2001-2002) menunjukkan fertilitas menurun di Bostwana dan Zimbabwe dipengaruhi terutama oleh pemakaian kontrasepsi modern. Hasil studi tersebut juga mengemukakan bahwa penundaan umur kawin memberikan bukti yang signifikan menurunnya fertilitas di wilayah tersebut. Dalam analisis ini, apabila variabel kontrasepsi dan penundaan usia perkawinan diuji masing-masing dengan variabel dependen (jumlah anak lahir hidup), maka kedua variabel tersebut memiliki hubungan bermakna (analisis bivariat). Namun jika diuji secara bersama-sama dengan variabel lainnya, tampak kedua variabel tersebut tidak muncul sebagai variabel yang dominan berpengaruh terhadap jumlah anak lahir hidup. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa variabel lain dalam faktor langsung (*intermediate variable*) yang lebih kuat pengaruhnya terhadap jumlah anak lahir hidup, yaitu hubungan seksual pertama kali, segera melakukan hubungan seksual setelah melahirkan, umur melahirkan pertama kali, infertilitas, dan keguguran. Namun, mungkin saja pada analisis lain dengan sumber data yang berbeda akan menghasilkan temuan yang berbeda pula. Hal ini hendaknya juga menjadi perhatian bagi segmentasi sasaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam hal penyebaran komunikasi, informasi dan edukatif tentang penjarangan dan pembatasan kelahiran. Penelitian lain (DHS Analytical Studies 23, 2011) menunjukkan hasil yang sejalan bahwa infertilitas mempunyai peranan menurunkan fertilitas. Kondisi infertilitas ini dipengaruhi oleh faktor menyusui secara eksklusif dan lamanya menyusui. Temuan analisis ini tentunya tidak lepas dari keterbatasan yang dijumpai karena tulisan ini merupakan analisis data sekunder yang bersumber pada data SDKI 2012, sehingga semua variabel yang dianalisis sangat tergantung pada ketersediaan variabel yang ada dalam SDKI 2012.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis faktor yang paling berpengaruh pada anak lahir hidup (multivariat), dari 25 variabel yang merupakan faktor langsung dan tidak langsung diperoleh 11 variabel yang dominan berpengaruh pada anak lahir hidup dengan memperhatikan faktor

demografi yaitu: indeks kekayaan, jumlah anak mati, keterpaparan media, kontak dengan petugas KB, pendapat suami terhadap KB, hubungan seksual pertama kali, segera melakukan hubungan seksual setelah melahirkan, umur melahirkan pertama, infertilitas/ketidaksuburan, keguguran/aborsi. Sebelas variabel ini memberikan kontribusi terhadap ALH sebesar 66 persen. Selanjutnya, kematian anak paling dominan berkontribusi terhadap jumlah anak lahir hidup (90 persen).

Hasil analisis menunjukkan kejadian kematian yang dialami oleh keluarga berkontribusi dominan terhadap menambahnya jumlah anak yang dimiliki oleh keluarga. Terkait dengan kondisi tersebut, perlu rekomendasi penguatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terutama dalam hal: penundaan umur kawin terkait dengan umur pertama melahirkan dan umur pertama melakukan hubungan seksual kepada wanita usia muda, kuintil terbawah, pendidikan rendah melalui penguatan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR). Sasaran PIK-KRR sebaiknya tidak hanya anak yang sekolah, namun juga memperhatikan anak putus sekolah, walaupun program ini sudah lama dilaksanakan. Kemudian mengingat tingginya kontribusi jumlah anak mati (90 persen), perlu ada kemitraan dengan Kementerian Kesehatan terutama penguatan KIE dan kualitas pelayanan terkait dengan kesehatan ibu dan anak terutama terkait dengan Program 4T (terlalu muda usia, terlalu tua usia, terlalu dekat jarak kelahiran, terlalu banyak anak yang dimiliki), dan 3T (terlambat terdeteksi bila berisiko, terlambat dibawa ke tempat pelayanan kesehatan, terlambat diberikan tindakan/ditolong) kepada PUS muda. Lebih lanjut diperlukan kebijakan Kementerian Kesehatan tentang peningkatan kualitas pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk menurunkan angka kematian maternal, bayi, dan anak. Disamping itu, diperlukan kebijakan penekanan terhadap pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali selama kehamilan dan penolong persalinan oleh tenaga medis dan paramedis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Departemen Kesehatan, dan Macro International Inc. (MI). 2003. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2002-2003. Jakarta: BPS dan MI.
- Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Departemen Kesehatan, dan Macro International Inc. (MI). 2007. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2007. Calverton, Maryland, USA: BPS dan MI.
- Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Kesehatan, dan Macro International Inc. (MI). 2012. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012. Calverton, Maryland, USA: BPS dan MI.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 1971. Sensus Penduduk 1971. Jakarta: BPS.
- Becker, Gary S. 1976. "An Economic Analysis of Fertility". Dalam Becker, Gary S. *The Economic Approach to Human Behaviour*. The University of Chicago, pp. 171-194.
- Becker, Gary S. 1981. *A Treatise on the Family*. London, England: Harvard University Press.
- Bongaarts. 1978. A Framework for Analyzing the Proximate Determinants of Fertility. *Population and Development Review* 4(1): 105-132.
- Bongaarts dan R.G. Potter. 1983. *Fertility, Biology and Behaviour: an Analysis of the Proximate Determinants*. New York: Academic Press.
- Cardwell, John C. 1983. *Direct Economic Costs and Benefit of Children*. New York/London: Academic Press.
- Davis, Kingsley dan Judith Blake. 1956. *Sosial Structure and Fertility: an Analytical Framework*. *Economic Development and Cultural Change*. Vol.4. No. 3.
- DHS Analytical Studies 23. 2011. *Changes in Direct and Indirect Determinants of Fertility in Sub-Saharan Africa*. USAID, September, 2011.
- Freedman, Ronald. 1961/1962. *The Sociology of Human Fertility: a trend report and bibliography*, "Current Sociology", 10-11 (2): 35-115, New York.
- Freedman, Ronald. 1979. *Theories of Fertility Decline: "a reappraisal"*. Social Force.
- Hastono, Sutanto P. 2001. *Analisis Data*. Jakarta: Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia.
- Iswarati. 2009. *Proximate Determinant Fertilitas di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang KB dan Kesehatan Reproduksi, BKKBN.
- Letamo, Gobopamang dan Haliman N. Letamo. 2001-2002. *The Role of Proximate Determinants in Fertility Transition: A Comparative study of Botswana, Zambia, and Zimbabwe*. *SA Journal of Demography*, 8(1).
- Nerlove, Mark. 1974. *Economic growth and population: Perspective of the new home economics*, Agricultural Development Council, Inc, ADC Reprint Series, dikutip dari Robinson & Harbison, *Ibid*, p.4
- Palloni, Alberto and Hantamala Rafalimanana. 1997. *The Effects of Infant Mortality on Fertility Revisited: Some New Evidence*. CDE Working Paper No. 96-27. Center for Demography and Ecology University of Wisconsin-Madison.

- Roger Frantz. 2007. *Renaissance in Behavioural Economics*  
Essay in honor of Harvey Leibenstein. Routledge  
Taylor & Francis Group.
- Robinson, Warren C. dan Sarah F. Harbison. 1983. *Menuju  
Teori Fertilitas Terpadu (Toward a unified theory of  
fertility)*. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Studi  
Kependudukan UGM.

## JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

*p-ISSN : 1907-2902 (Print)*

*e-ISSN : 2502-8537 (Online)*

### PENGARUH PENDIDIKAN TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN TENAGA KERJA DI INDONESIA

#### *(THE IMPACT OF EDUCATION ON INCOME INEQUALITY AMONG INDONESIAN WORKERS)*

**Ribut Nurul Tri Wahyuni dan Anugerah Karta Monika**

Jurusan Statistik, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, Jakarta

Korespondensi penulis: *rmurult@stis.ac.id*

#### *Abstract*

*Education is an important factor in human resource investment. Education is also expected to increase income as well as decrease income inequality among workers. This paper analyzes returns to education in Indonesia. By processing the National Labor Force Survey data from six regions in Indonesia in 2013, we suggest a robust stylised fact: returns to education are higher for the more skilled individuals (workers who have high schooling). In other words, education can reduce income inequality. Income inequality occurs because of over-education, ability-schooling interactions and school quality or different fields of study. Based on gender, returns to education for men is lower than for women. Education can reduce gender based income gap. Therefore, government can increase investment in education sector to reduce income inequality, including gender based income gap.*

**Keywords:** *Education, Wage Inequality, Gender, Worker*

#### **Abstrak**

Pendidikan merupakan faktor penting dalam investasi sumber daya manusia. Pendidikan juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan serta menurunkan ketimpangan pendapatan tenaga kerja. Tulisan ini bertujuan menganalisis pengaruh pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan tenaga kerja di Indonesia. Hasil pengolahan data Sakernas tahun 2013 di Indonesia menunjukkan bukti kuat bahwa pengaruh pendidikan terhadap pendapatan lebih tinggi untuk tenaga kerja yang lebih terampil (tenaga kerja dengan pendidikan tinggi). Dengan kata lain, pendidikan bisa mengurangi ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan terjadi karena adanya *over-education*, interaksi antara kemampuan dan pendidikan, serta perbedaan kualitas sekolah atau jurusan (bidang studi) antar wilayah. Jika analisis dilakukan menurut gender, ternyata pengaruh pendidikan terhadap pendapatan laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan. Pendidikan bisa mengurangi ketimpangan pendapatan antar gender. Oleh karena itu, pemerintah bisa meningkatkan investasi di bidang pendidikan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, termasuk ketimpangan pendapatan antar gender.

**Kata Kunci:** Pendidikan, Ketimpangan Pendapatan, Gender, Tenaga Kerja

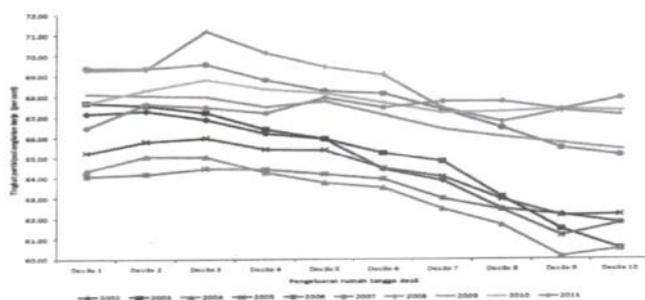
#### **PENDAHULUAN**

Perekonomian Indonesia selama periode 2010-2014 menghadapi penyesuaian dalam indikator-indikator

makroekonominya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia memiliki tren yang menurun selama periode tersebut. Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,38 persen dan pada tahun 2014 turun menjadi 5,02 persen. Penurunan ini terjadi karena pengetatan kebijakan moneter di Amerika Serikat, penyesuaian terhadap kebijakan perdagangan, ketidakpastian fiskal, serta tekanan dalam negeri karena kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan gas.

Pada umumnya, perekonomian Indonesia mampu mencapai tingkat pertumbuhan yang jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat penciptaan lapangan kerja. Tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) rata-rata mencapai 5-6 persen per tahun, sementara tingkat pertumbuhan tenaga kerja terus menurun. Bahkan pertumbuhan tenaga kerja pada tahun 2013 dan 2014 tidak mencapai 2 persen. Kondisi ini merupakan sinyal bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia lebih didominasi oleh sektor yang padat modal. Selain itu, ketimpangan pendapatan di Indonesia juga meningkat. Indeks gini mencapai puncaknya pada tahun 2011 dan 2012, yaitu sebesar 0,41. Meskipun rumah tangga miskin memiliki Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga yang lebih makmur, ternyata tingkat angkatan kerja saat ini tidak memadai untuk mengurangi ketimpangan pendapatan.

Data TPAK rumah tangga miskin (desil 1) sampai rumah tangga kaya (desil 10) di Indonesia pada tahun 2002-2011 menunjukkan tren yang menurun (Gambar 1).



Sumber: ILO (2013)

**Gambar 1. TPAK di Indonesia Berdasarkan Desil Pengeluaran Rumah Tangga pada Tahun 2002-2011 (Persen)**

TPAK rumah tangga miskin lebih tinggi dibanding rumah tangga kaya karena kurangnya pilihan untuk memperoleh pendapatan dari sumber alternatif untuk mendukung hidup mereka. Sayangnya, peluang pasar kerja yang dapat diakses oleh rumah tangga miskin kurang memenuhi standar kebutuhan hidup layak. Pekerjaan tersebut kemungkinan tidak tetap, di bawah pendapatan minimum, dan kurang memiliki

perlindungan terhadap tenaga kerja.

Selama ini, rumah tangga miskin selalu identik dengan pendidikan rendah. Berdasarkan data BPS tahun 2014, persentase kepala rumah tangga miskin yang pendidikannya memenuhi wajib belajar 9 tahun atau pada jenjang SMP hanya sebesar 8,79 persen dan persentase kepala rumah tangga tidak miskin sudah mencapai 32,83 persen (BPS, 2014b). Jika dilihat berdasarkan upah atau gaji atau pendapatan bersih yang diterima tenaga kerja per bulan, tenaga kerja lulusan perguruan tinggi diperkirakan memiliki pendapatan rata-rata tertinggi, yaitu 3,6 juta rupiah pada Februari 2016. Sebaliknya, tenaga kerja yang tidak sekolah, belum tamat SD, dan tamat SD memiliki pendapatan rata-rata terendah, yaitu kurang dari 1,3 juta rupiah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja dengan pendidikan tinggi akan mendapatkan pendapatan yang tinggi. Sebaliknya, tenaga kerja dengan pendidikan rendah akan mendapatkan pendapatan yang rendah. Selain pendapatan rata-rata yang rendah, tenaga kerja dengan tingkat pendidikan rendah juga menghadapi situasi yang lebih sulit karena pertumbuhan pendapatannya relatif lebih lambat (stagnan) dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan tenaga kerja yang memiliki pendidikan lebih tinggi (ILO, 2013). Hal ini sangat memprihatinkan karena secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa mayoritas pertumbuhan pendapatan dialami oleh tenaga kerja berpendidikan tinggi. Kondisi tersebut pada akhirnya bisa berdampak pada meningkatnya ketimpangan pendapatan.

Data di atas sejalan dengan penelitian sebelumnya (Martins dan Pereira, 2004) yang menyimpulkan bahwa pendidikan memiliki dampak yang positif terhadap ketimpangan pendapatan. Sullivan dan Smeeding (1997) juga menyatakan bahwa perbedaan ketimpangan pendapatan di negara-negara maju lebih banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan tenaga kerja.

Selain memiliki dampak yang positif terhadap ketimpangan pendapatan, pendidikan juga bisa mengurangi ketimpangan pendapatan antara tenaga kerja laki-laki dan perempuan (Miki dan Yuval, 2011). Selama periode 2006-2014, rasio kesempatan kerja perempuan terhadap penduduk usia kerja perempuan di Indonesia menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2006, rasionya sebesar 41,7 persen dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 47 persen (ILO, 2015). Kondisi ini mengindikasikan bahwa selama periode tersebut semakin banyak perempuan yang masuk ke pasar tenaga kerja. Meskipun demikian, ketimpangan pendapatan antar gender selalu terjadi di pasar tenaga kerja (Rau dan Wazienski dalam Miki dan Yuval, 2011),

tidak terkecuali di Indonesia. Menurut data BPS, persentase tenaga kerja perempuan yang berpendapatan rendah, selalu lebih tinggi dibanding tenaga kerja laki-laki. Pada tahun 2011, 34,85 persen tenaga kerja perempuan berpendapatan rendah dan pada tahun 2014 proporsi tersebut turun menjadi 32,35 persen. Sedangkan pada tenaga kerja laki-laki, persentasenya selama periode yang sama hanya sebesar 27,32 persen (2011) dan 30,39 persen (2014).

Berdasarkan temuan Martins dan Pereira (2004), Sullivan dan Smeeding (1997), serta Miki dan Yuval (2011), maka tulisan ini menganalisis pengaruh pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan serta pengaruh pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan antar gender di Indonesia.

Pengaruh pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan telah banyak dianalisis dalam literatur ekonomi tenaga kerja. Analisis tersebut terkait dengan pengembalian (*pay-off*) biaya sekolah yang telah dikeluarkan dengan pendapatan yang diterima. Dalam hal ini, pendidikan yang dicapai seseorang bisa menentukan pendapatan yang diterimanya. Oleh karena itu, studi mengenai pendidikan dan pendapatan merupakan informasi penting bagi pengambil kebijakan, baik pemerintah maupun swasta, untuk menentukan berapa banyak investasi yang diperlukan pada sektor ini (Card, 1999).

Salah satu isu terkait pengaruh pendidikan terhadap pendapatan adalah ketimpangan pendapatan. Pada awal 1980-an, ketimpangan pendapatan di negara-negara Barat mengalami peningkatan karena pengaruh globalisasi. Para pembuat kebijakan berpendapat bahwa sekolah merupakan alat terbaik untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ashenfelter dan Rouse (2000). Mereka menyatakan bahwa sekolah adalah tempat yang menjanjikan untuk meningkatkan *skill* dan pendapatan individu. Oleh karena itu, kebijakan terkait pendidikan memiliki potensi untuk mengurangi atau meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Martins dan Pereira (2004) melakukan penelitian di 16 negara pada pertengahan 1990-an dan menemukan bahwa pengaruh pendidikan terhadap pendapatan pada tenaga kerja laki-laki berbeda menurut distribusi pendapatan yang diterima. Selain itu, penelitian tersebut juga membuktikan bahwa pendidikan berdampak positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dalam level (*within-levels wage inequality*). Ini kemungkinan terjadi karena pengaruh *over-education*, interaksi pendidikan dan kemampuan, kualitas sekolah atau perbedaan disiplin ilmu di 16 negara tersebut. Sullivan dan Smeeding (1997) juga menyatakan bahwa perbedaan ketimpangan pendapatan di negara-negara

maju lebih banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan tenaga kerja.

Ketimpangan pendapatan juga terjadi antar gender. Menurut Valian dalam Miki dan Yuval (2011), perempuan akan lebih mudah masuk ke lapangan pekerjaan yang mayoritas membutuhkan tenaga kerja perempuan dengan pendapatan rendah. Sebaliknya perempuan akan lebih sulit masuk ke lapangan pekerjaan yang mayoritas membutuhkan tenaga kerja laki-laki. Pendapatan yang diperoleh akan lebih besar dibandingkan pekerjaan yang didominasi perempuan, tetapi pendapatannya lebih rendah dibanding laki-laki dengan pekerjaan yang sama. Inilah yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan pendapatan antar gender. Penelitian sebelumnya juga membuktikan bahwa pendidikan bisa mengurangi ketimpangan pendapatan antar gender. Perempuan dengan pendidikan yang lebih tinggi bisa lebih bersaing di pasar tenaga kerja dibanding perempuan berpendidikan rendah untuk lapangan pekerjaan yang sama dengan laki-laki (Miki dan Yuval, 2011).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tulisan ini akan menganalisis persoalan yang sama di Indonesia, yaitu pengaruh tingkat pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data *cross section*, yaitu data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2013. Observasi mencakup tenaga kerja yang menerima pendapatan dengan jam kerja minimal 35 jam per minggu.

Analisis dibagi menjadi enam wilayah, yaitu: 1) Sumatra; 2) Jawa; 3) Kalimantan; 4) Sulawesi; serta 5) Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Pembagian wilayah dilakukan karena data pendidikan dan pendapatan yang diterima di Indonesia sangat bervariasi. Provinsi dalam satu pulau atau satu wilayah umumnya memiliki karakteristik yang sama. Misalnya, tenaga kerja berpendidikan Sekolah Dasar (SD) di Jawa Tengah dan Jawa Timur biasanya menerima pendapatan yang sama. Sedangkan dengan pendidikan yang sama, pendapatan yang diterima tenaga kerja di Papua akan cenderung lebih tinggi. Berdasarkan data BPS tahun 2016, rata-rata upah buruh atau karyawan atau pegawai yang diterima tenaga kerja di Indonesia adalah 2,2 juta rupiah (Sumatra); 2,3 juta rupiah (Jawa dan Sulawesi); 2,1 juta rupiah (Bali, NTB, dan NTT); 2,5 juta rupiah (Kalimantan); dan 2,7 juta rupiah (Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat). Perbedaan upah antar provinsi berkaitan dengan adanya kebijakan upah minimum regional (UMR). Metode analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian ini didasarkan pada analisis deskriptif

maupun inferensial dengan menggunakan regresi kuantil.

**REGRESI KUANTIL**

Regresi kuantil biasanya terkait dengan mengurutkan observasi sampel dan bisa diselesaikan dengan menggunakan masalah optimisasi. Pada metode *Ordinary Least Square* (OLS), digunakan rata-rata sampel (*mean*  $\mu$ ) sebagai solusi dengan meminimumkan jumlah kuadrat residual. Jika diketahui random sampel  $\{y_1, y_2, \dots, \dots, y_n\}$  maka solusinya adalah:

$$\min \sum_{i=1}^n (y_i - \mu)^2 = \min \sum_{i=1}^n (y_i - x_i\beta)^2 = \min \sum_{i=1}^n e^2 \tag{1}$$

Sedangkan pada regresi median, digunakan median ( $\gamma$ ) sebagai solusi dengan meminimumkan jumlah absolut residual:

$$\min \sum_{i=1}^n |y_i - \gamma| = \min \sum_{i=1}^n |y_i - x_i\beta| = \min \sum_{i=1}^n |e| \tag{2}$$

Karena simetris, maka jumlah absolut residual harus sama antara jumlah residual positif dan negatif, sehingga menjamin jumlah observasi di bawah dan di atas median sama. Nilai absolut yang simetris hanya terletak di median. Oleh karena itu, pada kuantil lainnya (selain median) kemungkinan dengan meminimumkan jumlah asimetris tertimbang dari absolut residual, yaitu memberikan bobot yang berbeda untuk residual positif dan negatif yang nantinya akan menghasilkan kuantil (Koenker dan Hallock, 2001). diambil dari *cumulative distribution function* (CDF) random variabel Y yang bernilai antara 0 dan 1. Sedangkan kuantil dari distribusi random variabel Y dilambangkan  $Q(\theta)$  dimana:

$$\theta = F(Q(\theta)) = \int_{-\infty}^{Q(\theta)} f(y) dy$$

$$Q(\theta) = F^{-1}(\theta) = \inf\{y: F(y) \geq \theta\}, 0 \leq \theta \leq 1 \tag{3}$$

$F^{-1}(\theta)$  adalah fungsi invers dari CDF,  $\inf$  adalah  $y$  terkecil yang memenuhi  $F(y) \geq \theta$ .

Untuk mengestimasi parameter dari regresi kuantil, maka digunakan metode pemrograman linier yang dirumuskan oleh Koenker dan Bassett (1978). Solusinya adalah:

$$\min \sum_{i=1}^n \rho_{\theta}(y_i - Q_Y(\theta|X))$$

(4)

$\rho_{\theta} = \theta$  jika  $e \geq 0$  atau  $y_i \geq Q_Y(\theta|X)$  dan  $\rho_{\theta} = 1 - \theta$  jika  $e < 0$  atau  $y_i < Q_Y(\theta|X)$ .

Atau

$$\min \left[ \sum_{y_i \geq x_i\beta} \theta |y_i - Q_Y(\theta|X)| + \sum_{y_i < x_i\beta} (1 - \theta) |y_i - Q_Y(\theta|X)| \right]$$

dimana

$$Q_Y(\theta|X) = x_i\beta \tag{5}$$

$\theta |y_i - Q_Y(\theta|X)|$  untuk yang *underprediction* dan  $(1 - \theta) |y_i - Q_Y(\theta|X)|$  untuk yang *overprediction*.  $Q_Y(\theta|X) = \beta_{0\theta} + \beta_{1\theta}X_1 + \dots + \beta_{k\theta}X_k$ , yaitu kuantil bersyarat ke- $\theta$  dari  $y$  *given*  $x$ .

Regresi kuantil memiliki beberapa kelebihan. Pertama, regresi kuantil tidak perlu mengikuti distribusi peluang tertentu, misalnya distribusi normal atau Poisson. Oleh karena itu, regresi kuantil sangat sesuai untuk menganalisis data yang memiliki *strong skewness*. Kedua, regresi kuantil *robust* terhadap *outlier*. Dibandingkan dengan mean dan median, regresi kuantil kurang sensitif terhadap *outlier*. Ketiga, regresi kuantil mengestimasi parameter pada beberapa bagian yang berbeda dari distribusi variabel dependen dan menyediakan gambaran yang lengkap tentang efek dari variabel prediktor (Liu et. al., 2013).

Untuk melihat pengaruh pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan tenaga kerja, digunakan model persamaan 6. Persamaan dalam penelitian ini diambil dari model penelitian Martins dan Pereira (2004), yaitu:

$$\ln y_i = \beta_{0\theta} + \beta_{1\theta}educ_i + \beta_{2\theta}exp_i + \beta_{3\theta}exp_i^2 + e_i \tag{6}$$

$i = 1, 2, \dots, n$  ( $n$  menunjukkan jumlah observasi pada tahun 2013),  $\theta = 0,1; 0,2; \dots; 0,9$  menggambarkan kuantil,  $y$  menunjukkan pendapatan tenaga kerja per jam (rupiah), *educ* adalah pendidikan atau lama sekolah (tahun), sedangkan *exp* berkaitan dengan pengalaman (tahun). Pendapatan tenaga kerja per jam merupakan rasio antara total pendapatan atau gaji atau upah bersih yang diterima tenaga kerja selama sebulan yang lalu dari pekerjaan utama baik berupa uang maupun barang dengan total jam kerja.

Mincer (1974) menemukan formula bahwa pengalaman bisa dihitung dengan menggunakan rumus  $exp = umur - lama\ sekolah - 6$ . Sedangkan Buchinsky (1998) menggunakan rumus  $min(umur - lama\ sekolah - 6, umur - 18)$  untuk menghitung pengalaman. merupakan pengaruh pendidikan terhadap pendapatan (Buchinsky, 1994).  $\beta_{1\theta}$  menggambarkan *pay-off* dari pendidikan (Martins dan Pereira, 2004). Agar lebih informatif, estimasi dengan menggunakan regresi kuantil dibatasi menjadi 9 persamaan kuantil: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; dan 0,9. Observasi dalam penelitian ini hanya mencakup tenaga kerja yang menerima pendapatan atau gaji atau upah bersih dengan jam kerja minimal 35 jam per minggu (Martins dan Pereira, 2004).

Untuk melihat pengaruh pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan tenaga kerja antar gender, digunakan model persamaan 7. Persamaan diambil dari model persamaan 6 dan menambahkan 2 variabel dari penelitian Miki dan Yuval (2011), yaitu: *dummy* gender atau *sex* (0 untuk perempuan dan 1 untuk laki-laki) serta interaksi antara pendidikan dan gender (*educ x sex*).

$$\ln y_i = \beta_{0\theta} + \beta_{1\theta}educ_i + \beta_{2\theta}exp_i + \beta_{3\theta}exp_i^2 + \beta_4sex_i + \beta_5educ \times sex_i + e \quad (7)$$

### INDIKATOR PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA DI INDONESIA

Dalam kehidupan bermasyarakat, gender masih sering digunakan sebagai salah satu variabel pembagian kerja. Laki-laki memiliki kewajiban mencari nafkah dan bekerja, sedangkan perempuan memiliki kewajiban mengurus rumah tangga. Selain itu, laki-laki dianggap memiliki fisik yang kuat sehingga peluang mendapatkan kesempatan kerja lebih tinggi dibandingkan perempuan. Namun disisi lain, banyak juga jenis pekerjaan yang mensyaratkan dilakukan oleh perempuan karena lebih memerlukan ketelatenan dan ketelitian (BPS, 2014a).

**Tabel 1. TPAK di Indonesia Tahun 2014-2016 (Persen)**

TPAK	Feb. 2014	Agt. 2014	Feb. 2015	Agt. 2015	Feb. 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lk	85,04	83,05	84,58	82,71	83,46
Pr	53,37	50,22	54,48	48,87	52,71
Lk + Pr	69,17	66,60	69,50	65,76	68,06

Sumber: BPS (2015, 2016a)

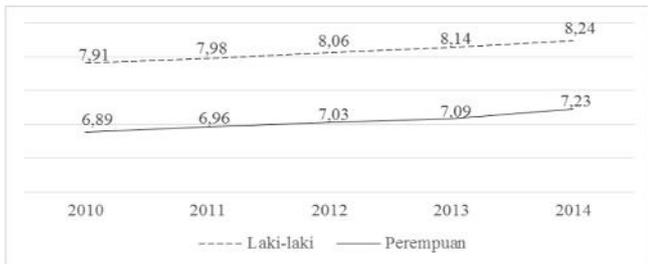
Perbedaan kesempatan kerja akan berdampak pada partisipasi tenaga kerja yang tercermin dari angka TPAK. TPAK menggambarkan persentase penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun keatas) yang berpartisipasi

aktif di pasar tenaga kerja. Pada Februari 2014-Februari 2016, angka TPAK di Indonesia sekitar 65-70 persen. Berdasarkan gender, TPAK perempuan hanya sekitar 50 persen, sedangkan TPAK laki-laki sudah mencapai sekitar 80 persen (Tabel 1). Angka TPAK ini menunjukkan adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek ketenagakerjaan. Terlihat bahwa persentase perempuan yang bekerja masih jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Pada Februari 2016, proporsi perempuan yang bekerja sebesar 52,71 persen. Sedangkan proporsi laki-laki yang bekerja mencapai 83,46 persen (BPS, 2016a).

Stagnasi TPAK perempuan juga dapat dilihat dari aspek ekonomi dan sosial budaya. Menurut Oey dalam Vibriyanti (2013), TPAK perempuan berbanding lurus dengan kemiskinan. Menurunnya TPAK perempuan mengindikasikan mulai membaiknya perekonomian keluarga. Perempuan tidak perlu masuk ke pasar tenaga kerja karena tingginya pendapatan yang diterima oleh laki-laki sebagai kepala keluarga, sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu, meningkatnya pendidikan perempuan juga berpengaruh terhadap pergeseran nilai terkait peran perempuan. Perempuan lebih memilih untuk menjadi ibu rumah tangga sehingga menghambat masuknya mereka ke pasar tenaga kerja. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2014 37,32 persen perempuan mengurus rumah tangga dan 47,08 persen perempuan bekerja.

Rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk (*Employment to Population Ratio* atau EPR) dapat digunakan untuk melihat partisipasi usia muda (15-24 tahun) dalam pasar tenaga kerja. Pada Februari 2016, EPR usia muda hanya sebesar 39,32 (BPS, 2016a). Artinya, dari 100 orang penduduk usia 15-24 tahun, terdapat sekitar 39 orang yang bekerja pada Februari 2016. Ini kemungkinan karena semakin tingginya partisipasi usia muda di bidang pendidikan dan pelatihan.

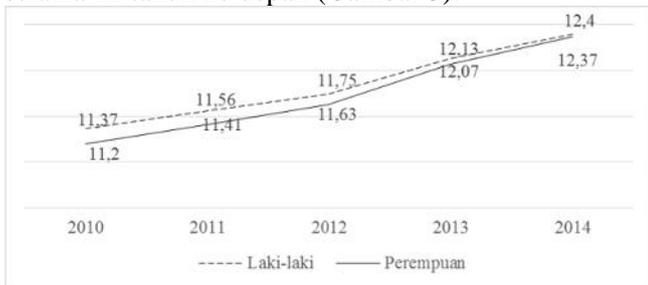
Pada tahun 2014, rata-rata lama sekolah laki-laki sebesar 8,24 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP, lebih tinggi dibanding rata-rata lama sekolah perempuan yang hanya mencapai 7,23 tahun atau setara dengan kelas 1 SMP. Namun demikian, selama periode 2010-2014 rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan cenderung meningkat (Gambar 2). Perbedaan rata-rata lama sekolah antara laki-laki dan perempuan cenderung mengecil, meskipun tidak terlalu signifikan. Hal ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah untuk lebih mengupayakan peningkatan pembangunan pendidikan, khususnya bagi perempuan agar ketimpangan pendidikan antar gender bisa semakin berkurang.



Sumber: BPS (2014a)

**Gambar 2. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Indonesia Berdasarkan Gender pada Tahun 2010-2014 (Tahun)**

Meskipun rata-rata lama sekolah perempuan lebih rendah dari laki-laki, pada tahun 2014 angka Harapan Lama Sekolah (HLS) perempuan relatif sama dengan laki-laki. Angka HLS tersebut menunjukkan adanya kesetaraan gender dimana laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama untuk melanjutkan sekolah selama 12 tahun ke depan (Gambar 3).

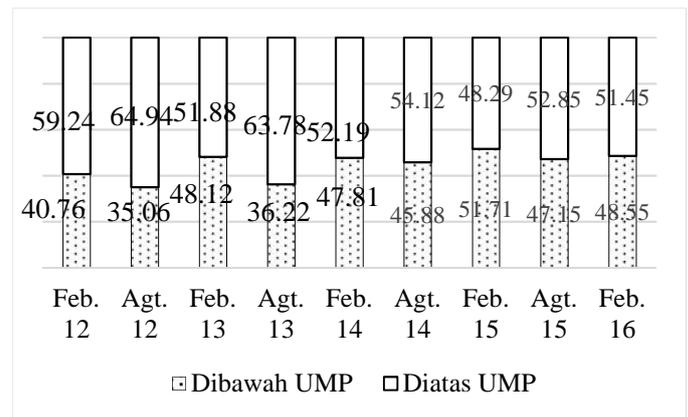


Sumber: BPS (2014a)

**Gambar 3. Harapan Lama Sekolah (HLS) Penduduk Indonesia Berdasarkan Gender pada Tahun 2010-2014 (Tahun)**

Perbedaan pendapatan yang diterima tenaga kerja di negara *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) tentunya bisa memengaruhi produktivitas tenaga kerja. Pada tahun 2013, rata-rata pendapatan yang diterima tenaga kerja Indonesia adalah 174 dollar per bulan, lebih rendah dari Vietnam (181 dollar), Filipina (206 dollar), Thailand (357 dollar), Malaysia (609 dollar), dan Singapura (3.547 dollar). Di banyak negara, pekerjaan dengan pendapatan rendah biasanya digunakan sebagai batu loncatan untuk memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang lebih tinggi. Namun di Indonesia, pekerjaan dengan pendapatan rendah merupakan hal yang normal dan bukan batu loncatan. Pekerjaan dengan pendapatan rendah bisa

mengakibatkan keterampilan tenaga kerja menurun dan pengusaha menganggap tenaga kerja memiliki produktivitas yang rendah, sehingga mengurangi kemungkinan tenaga kerja memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang lebih tinggi. Selain itu, peraturan upah minimum juga belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Pada Februari 2016, 48,55 persen tenaga kerja tetap di Indonesia memperoleh upah di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) (Gambar 4).



Sumber: BPS (2016b)

**Gambar 4. Persentase Buruh/Karyawan/Pegawai Berdasarkan Upah/Gaji Bersih per Bulan yang Dibawah dan Diatas Upah Minimum Provinsi (UMP) pada Februari 2012-Februari 2016**

Berdasarkan gender, rata-rata pendapatan yang diterima laki-laki selalu lebih tinggi dari perempuan. Selama lima tahun terakhir, ketimpangan pendapatan relatif tidak mengalami perubahan, yaitu sekitar 0,8 (BPS, 2014a). Pada Februari 2016, rata-rata upah atau gaji atau pendapatan bersih per bulan yang diterima tenaga kerja laki-laki adalah sebesar 2,111 juta rupiah, sedangkan perempuan hanya sebesar 1,685 juta rupiah. Dibandingkan dengan total tenaga kerja masing-masing gender, ternyata persentase tenaga kerja laki-laki dengan pendidikan tertinggi SMA keatas lebih rendah dibanding perempuan, yaitu laki-laki 51,06 persen dan perempuan 58,15 persen. Ini mengindikasikan bahwa tenaga kerja perempuan lebih unggul dalam pendidikan. Namun jika dikaitkan dengan pendapatan yang diterima, saat pendidikan tertinggi yang ditamatkan sama, rata-rata pendapatan tenaga kerja laki-laki selalu lebih tinggi dibanding perempuan (Tabel 2).

**Tabel 2. Persentase Tenaga Kerja Indonesia dan Upah/Gaji/Pendapatan Bersih yang Diterima per Bulan**

## Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan pada Februari 2016

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Persentase			Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (Rupiah)			Ketimpangan Pendapatan
	Lk	Pr	Lk + Pr	Lk	Pr	Lk + Pr	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tidak/Belum Pernah Sekolah	0,81	2,42	1,34	938.018	644.484	762.276	0,69
Tidak/Belum Tamat SD	7,68	8,54	7,96	1.295.984	725.932	1.092.595	0,56
SD	22,30	17,75	20,79	1.442.381	909.974	1.291.150	0,63
SMP	18,15	13,14	16,49	1.624.507	1.173.390	1.504.890	0,72
SMA	21,52	17,83	20,29	2.208.109	1.682.866	2.054.534	0,76
SMK	15,23	11,67	14,04	2.134.254	1.713.501	2.017.923	0,80
Diploma I/III/III	2,59	7,32	4,16	3.478.968	2.240.846	2.754.185	0,64
Universitas	11,73	21,32	14,92	4.236.423	2.947.318	3.623.725	0,70
Jumlah	100,00	100,00	100,00	2.110.702	1.685.895	1.969.385	0,80

Sumber: BPS (2016b)

### PENGARUH PENDIDIKAN TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN TENAGA KERJA

Berdasarkan model sebagaimana dikemukakan sebelumnya, Tabel 3 menunjukkan statistik deskriptif dari data di setiap wilayah. Jumlah observasi paling banyak di Sumatra (31,7 persen) dan Jawa (25,65 persen). Tingkat pendidikan tenaga kerja di Indonesia dilihat dari rata-rata (*mean*) sudah mencapai jenjang tingkat SMP sederajat atau sudah memenuhi wajib belajar 9 tahun. Sedangkan dilihat dari rata-rata (*mean*) pengalaman, baik dengan formula Mincer maupun Buchinsky, memiliki nilai yang hampir sama di semua wilayah. Nilai formula Mincer berkisar 21,94 sampai dengan 23,71 tahun. Sedangkan nilai formula Buchinsky berkisar 19,10 sampai dengan 20,09 tahun. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah, maka semakin rendah pengalaman.

Tabel 3 juga menggambarkan rata-rata (*mean*), desil ke-1, desil ke-5, dan desil ke-9 dari data pendapatan yang diterima. Tenaga kerja di Bali, NTB, dan NTT memiliki rata-rata (*mean*) pendapatan paling rendah (8.457,19 rupiah per jam). Sedangkan tenaga kerja di Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat memiliki rata-rata (*mean*) pendapatan paling tinggi (12.093,48 rupiah per jam). Rasio antara pendapatan yang diterima tenaga kerja pada desil yang berbeda bisa digunakan sebagai ukuran ketimpangan pendapatan. Rasio pendapatan pada desil ke-9 dibanding desil ke-1 berkisar 6 sampai dengan 9,62. Ini menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima tenaga kerja di Indonesia sangat bervariasi dan memiliki rentang yang besar. Ketimpangan terendah berada di Kalimantan dan ketimpangan tertinggi di Bali, NTB, dan NTT. Pada desil ke-1, tenaga kerja di Kalimantan hanya menerima pendapatan sebesar 3.571,43 rupiah per jam. Sedangkan pada desil ke-9, tenaga kerja di wilayah tersebut menerima pendapatan sebesar 21.428,57 rupiah per jam.

Tabel 3. Statistik Deskriptif dan Ukuran Ketimpangan

Wilayah	Jumlah Obs. (Orang)	Mean Educ. (Tahun)	Mean Exp. (Tahun)		Pendapatan			Rasio Pendapatan			
			Mincer	Bhucinsky	Mean (Rp)	Desil ke-1	Desil ke-5	Desil ke-9	9/1	9/5	5/1
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Jawa	23.450	8,81	23,71	20,09	8.848,33	2.380,95	5.952,38	17.857,14	7,50	3,00	2,50
Sumatra	28.981	9,54	22,32	19,30	9.817,66	2.850,65	7.317,07	18.750,00	6,58	2,56	2,57
Kalimantan	11.695	8,83	22,07	18,44	11.641,10	3.571,43	8.928,57	21.428,57	6,00	2,40	2,50
Sulawesi	12.242	9,17	22,86	19,37	9.678,39	2.232,14	6.710,14	20.833,33	9,33	3,10	3,01
Bali, NTB, NTT	8.312	9,08	22,62	19,13	8.457,19	1.944,44	5.721,73	18.698,72	9,62	3,27	2,94
Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat	6.746	9,86	21,94	19,10	12.093,48	2.976,19	9.375,00	23.437,50	7,87	2,50	3,15

Sumber: Sakernas 2013, diolah

Berdasarkan statistik deskriptif di atas, maka perlu dibuktikan apakah pendidikan berpengaruh secara

signifikan terhadap ketimpangan pendapatan yang diterima oleh tenaga kerja di Indonesia dengan menggunakan analisis inferensial.

Langkah pertama untuk melakukan analisis inferensial adalah melakukan regresi variabel pendidikan dan pengalaman terhadap pendapatan yang diterima tenaga kerja per jam dengan menggunakan metode OLS. Persamaan yang digunakan adalah persamaan polinomial karena hubungan antara pengalaman dengan pendapatan berbentuk kurva U terbalik (Mincer, 1974). Setelah itu, dilakukan uji asumsi OLS. Pelanggaran terhadap asumsi homoskedastisitas dari residual kemungkinan disebabkan variabel dependen memiliki variasi yang tinggi. Pada penelitian ini, uji homoskedastisitas yang digunakan adalah uji Breusch-

Pagan. Seperti yang kita lihat di Tabel 3, rata-rata (*mean*) pengaruh pendidikan terhadap pendapatan adalah 0,08888 dengan standar deviasi 0,01380. Ketika pengaruh pendidikan terhadap pendapatan dengan metode OLS diurutkan dari terendah sampai dengan tertinggi, Kalimantan memiliki pengaruh pendidikan terhadap pendapatan terendah (0,07033), sedangkan Jawa memiliki pengaruh pendidikan terhadap pendapatan tertinggi (0,10880) (Tabel 4). Hasil uji di semua wilayah menunjukkan bahwa residualnya heteroskedastis dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Oleh karena itu, perlu dicari metode lain yang bisa menggambarkan hubungan pendidikan dengan pendapatan yang diterima tenaga kerja per jam, yaitu regresi kuantil.

**Tabel 4. Rangkuman Hasil Estimasi Pengaruh Pendidikan terhadap Pendapatan dengan Metode OLS dan Regresi Kuantil**

Wilayah	OLS		Regresi Kuantil Experience Mincer			Regresi Kuantil Experience Bhucinsky		
	Mincer	Bhucinsky	Desil ke-1	Desil ke-9	Perbedaan	Desil ke-1	Desil ke-9	Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jawa	0,10880	0,09915	0,08369	0,11949	0,03580	0,08031	0,10477	0,02446
Sumatra	0,07828	0,06707	0,06011	0,07931	0,01920	0,05254	0,06753	0,01499
Kalimantan	0,07033	0,05990	0,05852	0,07120	0,01268	0,05077	0,05911	0,00834
Sulawesi	0,08323	0,07189	0,05768	0,08035	0,02267	0,04769	0,06817	0,02048
Bali, NTB, NTT	0,10490	0,09004	0,08666	0,10526	0,01860	0,07834	0,08641	0,00807
Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat	0,08773	0,07686	0,08594	0,07089	-0,01505	0,07559	0,05966	-0,01593
Rata-rata	0,08888	0,07748	0,07210	0,08775	0,01565	0,06421	0,07428	0,01007
Standar deviasi	0,01380	0,01339	0,01338	0,01825	0,01543	0,01401	0,01635	0,01306
CV	0,15530	0,17286	0,18556	0,20797	0,98574	0,21824	0,22010	1,29667

Sumber: Sakernas 2013, diolah

**Tabel 5. Hasil Estimasi Pengaruh Pendidikan terhadap Pendapatan Formula Mincer dengan Metode OLS dan Regresi Kuantil**

Desil ke-	Jawa	Sumatra	Kalimantan	Sulawesi	Bali, NTB, NTT	Maluku, Malut, Papua, Pabar
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	0,08369	0,06011	0,05852	0,05768	0,08666	0,08594
2	0,09176	0,07025	0,06508	0,07387	0,09885	0,10075
3	0,09947	0,07632	0,07065	0,08432	0,10651	0,10084
4	0,10716	0,07992	0,07168	0,09037	0,11202	0,10259
5	0,11267	0,08377	0,07139	0,09572	0,11383	0,09772
6	0,11593	0,08504	0,07099	0,09493	0,11230	0,09048
7	0,11672	0,08552	0,07118	0,09215	0,11171	0,08633
8	0,11568	0,08309	0,06952	0,08605	0,10832	0,08026
9	0,11949	0,07931	0,07120	0,08035	0,10526	0,07089
OLS	0,10880	0,07828	0,07033	0,08323	0,10490	0,08773

Keterangan: semua memiliki *p-value* = 0,000

Sumber: Sakernas 2013, diolah

**Tabel 6. Hasil Estimasi Pengaruh Pendidikan terhadap Pendapatan Formula Bhucinsky dengan Metode OLS dan**

**Regresi Kuantil**

Desil ke-	Jawa	Sumatra	Kalimantan	Sulawesi	Bali, NTB, NTT	Maluku, Malut, Papua, Pabar
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	0,08031	0,05254	0,05077	0,04769	0,07834	0,07559
2	0,08632	0,06010	0,05639	0,06407	0,08513	0,08788
3	0,09085	0,06436	0,05903	0,07543	0,08946	0,09065
4	0,09667	0,06721	0,06092	0,07790	0,09386	0,08929
5	0,10221	0,07090	0,06061	0,08171	0,09567	0,08592
6	0,10420	0,07305	0,06097	0,08214	0,09505	0,08012
7	0,10434	0,07290	0,06030	0,07981	0,09603	0,07340
8	0,10411	0,07118	0,05864	0,07406	0,09269	0,06858
9	0,10477	0,06753	0,05911	0,06817	0,08641	0,05966
OLS	0,09915	0,06707	0,05990	0,07189	0,09004	0,07686

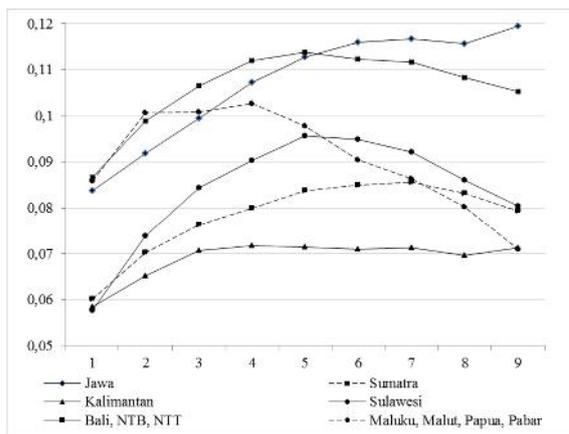
Keterangan: semua memiliki  $p\text{-value} = 0,000$

Sumber: Sakernas 2013, diolah

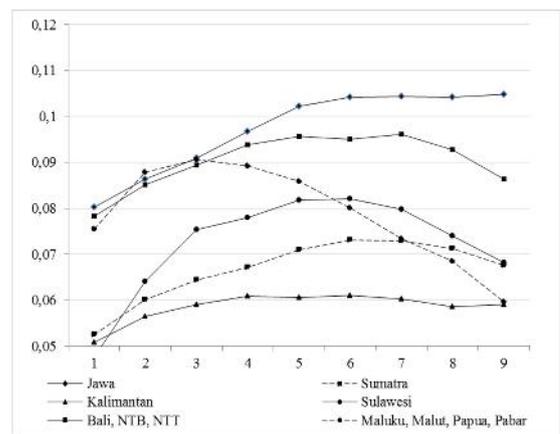
Tabel 5 dan Tabel 6 menunjukkan hasil estimasi pengaruh pendidikan terhadap pendapatan dengan metode OLS dan regresi kuantil pada titik yang berbeda dari distribusi pendapatan tenaga kerja per jam (kuantil 0.1, 0.2, ..., 0.9) di setiap wilayah. Sedangkan gambarnya bisa dilihat di Gambar 5. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum pengaruh pendidikan terhadap pendapatan akan semakin tinggi pada titik yang lebih tinggi dari distribusi pendapatan (*conditional*). Hanya wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat yang tidak mengikuti pola ini.

dilihat secara grafis pada Gambar 6. Semua kategori masuk ke bagian kiri atas, kecuali wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Artinya, mayoritas pengaruh pendidikan terhadap pendapatan pada distribusi teratas yang didekati dari data desil ke-9 lebih tinggi dari distribusi terbawah (desil ke-1). Pada tenaga kerja di Jawa dengan formula Mincer, misalnya, rata-rata (*mean*) pengaruh pendidikan terhadap pendapatannya adalah 0,09709, pada desil ke-1 hanya sebesar 0,08369 dan pada desil ke-9 mencapai 0,11949. Perbedaan pengaruh tersebut mengakibatkan adanya ketimpangan pendapatan di Indonesia. Mayoritas pengaruh pendidikan terhadap pendapatan mengikuti kurva U terbalik, kecuali Jawa.

Hasil dari regresi kuantil pada desil ke-1 dan ke-9 bisa



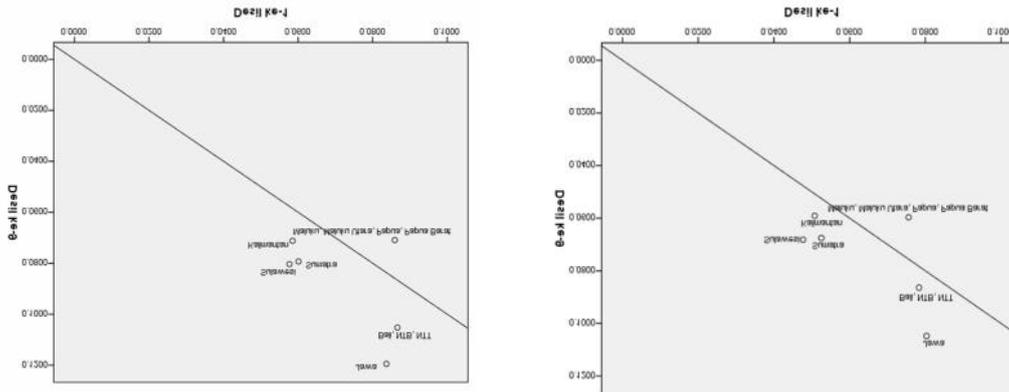
Formula Mincer



Formula Buchinsky

Sumber: Sakernas 2013, diolah

**Gambar 5. Pengaruh Pendidikan terhadap Pendapatan dengan Metode Regresi Kuantil**



Sumber: Sakernas 2013, diolah

**Gambar 6. Pengaruh Pendidikan terhadap Pendapatan dengan Metode Regresi Kuantil**

Ada beberapa kemungkinan yang bisa menjelaskan kenapa pengaruh pendidikan terhadap pendapatan berbeda pada berbagai distribusi pendapatan sehingga berpengaruh pada adanya ketimpangan pendapatan. Menurut Martins dan Pereira (2004), tenaga kerja yang memiliki *skill* yang lebih tinggi (tenaga kerja yang menerima pendapatan per jam yang lebih tinggi sesuai dengan karakteristiknya) dikaitkan dengan pendidikan. Pertama, tenaga kerja dengan pendidikan yang tinggi melakukan pekerjaan yang *low-skill* sehingga mendapatkan pendapatan yang lebih rendah. Ini konsisten dengan hasil dalam penelitian ini. Pendapatan lebih rendah yang dihasilkan dari *over-education* akan meningkatkan dispersi pendapatan. Meskipun pengaruh pendidikan terhadap pendapatan akibat *over-education* lebih rendah dari pengaruh pendidikan terhadap pendapatan sesuai pendidikannya, namun hubungannya masih positif (Hartog dalam Martins dan Pereira, 2004).

Kedua, adanya keterkaitan antara pendidikan dan kemampuan (*ability*). Tenaga kerja dengan pendidikan yang lebih tinggi dianggap memiliki kemampuan yang berbeda (terspesialisasi) sehingga dispersi dari pendapatan yang diterima akan besar. Sedangkan tenaga kerja dengan pendidikan rendah, dianggap memiliki kemampuan yang sama sehingga dispersi dari pendapatan yang diterima menjadi rendah. Akibatnya, ada gap antara tenaga kerja berkemampuan rendah dan berkemampuan tinggi. Interaksi antara pendidikan dan kemampuan juga pernah diteliti oleh Arias, Hallock, dan Sosa-Escudero dalam Koenker dan Hallock (2001). Hasilnya menunjukkan bahwa interaksi antara dua variabel tersebut bisa mengakibatkan pengaruh pendidikan terhadap pendapatan bervariasi (heterogen).

Ketiga, kualitas sekolah antar wilayah dan jurusan (bidang studi) yang berbeda juga kemungkinan berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima. Formula Mincer dan Buchinsky hanya menggunakan data dari sisi kuantitas, bukan kualitas. Tenaga kerja menerima pendapatan yang lebih rendah karena kualitas sekolahnya rendah atau memilih jurusan dengan *poor*

*returns*. Jurusan yang dipilih kurang diminati dalam pasar tenaga kerja sehingga pendapatan yang diterima berada pada distribusi pendapatan terendah.

Ketidakcocokan pendidikan dan kemampuan mengakibatkan tenaga kerja memiliki tingkat pendidikan yang terlalu tinggi (*over-education*) atau terlalu rendah (*under-education*) dari apa yang dibutuhkan oleh pekerjaan tertentu. Sebagai contoh, seorang sarjana bekerja sebagai pegawai tata usaha, yaitu jabatan non-manual yang membutuhkan kemampuan atau ketrampilan rendah, dianggap pendidikannya terlalu tinggi. Sedangkan seorang lulusan SMA bekerja sebagai insinyur, yaitu jabatan non-manual yang membutuhkan kemampuan atau ketrampilan tinggi, dianggap memiliki pendidikan yang rendah. Kondisi ini juga terjadi di Indonesia. Pada tahun 2014, 56 persen tenaga kerja di Indonesia tidak memenuhi syarat, 37 persen sangat cocok, dan sisanya (7 persen) melampaui syarat (ILO, 2015).

Pada penelitian ini, kebijakan yang bisa dilakukan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan tenaga kerja adalah meningkatkan investasi di bidang pendidikan. Kondisi di Indonesia menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan merupakan persoalan struktural dan dibutuhkan waktu yang lama untuk mengubah profil pendidikan suatu negara. Bentuk keseriusan Pemerintah untuk meningkatkan investasi di bidang pendidikan tertuang dalam Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Amandemen ke-4 yang mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini juga dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-VI/2008 dan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003.

Berdasarkan data APBN 2010-2015, alokasi anggaran pendidikan telah memenuhi amanat UUD 1945, yaitu

minimal 20 persen dari APBN dan APBD. Alokasi anggaran pendidikan dilakukan tiga jalur. Pertama, alokasi anggaran pendidikan melalui belanja Pemerintah Pusat meningkat dari 96,5 triliun rupiah pada tahun 2010 menjadi 154,2 triliun rupiah pada tahun 2015. Alokasi anggaran pendidikan pada Pemerintah Pusat digunakan antara lain untuk penyediaan beasiswa bagi siswa atau mahasiswa kurang mampu, rehabilitasi ruang kelas, pembangunan unit sekolah baru dan ruang kelas baru, serta pembangunan prasarana pendukung dan pemberian tunjangan profesi guru.

Kedua, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah. Selama periode 2010-2015, alokasi anggaran pendidikan yang ditransfer ke daerah juga mengalami perkembangan yang sangat signifikan, yaitu dari 127,7 triliun rupiah pada tahun 2010 menjadi 254,9 triliun rupiah pada tahun 2015. Alokasi anggaran pendidikan pada transfer ke daerah sebagian besar disalurkan melalui Dana Alokasi Umum (DAU), tunjangan profesi guru, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Ketiga, anggaran pendidikan melalui Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) yang terdiri dari dana abadi (*endowment funds*) pendidikan dan dana cadangan pendidikan. Dana tersebut dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang merupakan satuan kerja dari Kementerian Keuangan. *Endowment Funds* adalah DPPN yang dialokasikan dalam APBN dan atau APBN Perubahan (APBN-P) yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi (*intergenerational equity*). Sedangkan dana cadangan pendidikan dialokasikan dalam APBN dan atau APBN-P untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam. Pada tahun 2010, alokasi DPPN adalah sebesar 1,0 triliun triliun rupiah dan pada tahun 2014 meningkat menjadi sebesar 8,4 triliun rupiah (Ashari, 2014).

Selain investasi di bidang pendidikan, Pemerintah juga perlu membekali penduduk usia kerja dan generasi di masa depan dengan pelatihan ketrampilan sehingga memiliki kemampuan yang berbeda (terspesialisasi). Kemampuan yang berbeda dapat memudahkan mereka untuk melakukan pekerjaan produktif yang memiliki potensi meningkatkan pendapatan. Pada awal tahun 2016, misalnya, Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) melaksanakan program percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pengembangan program pelatihan terpadu. Program ini meliputi pelatihan, pemagangan dan sertifikasi yang dilakukan secara bersama antara lembaga pelatihan, lembaga

sertifikasi, dan industri. Diharapkan kerjasama ini dapat menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki daya saing. Sekitar 2.000 perusahaan di bawah Kadin akan berpartisipasi dengan menerima 100 pemegang per perusahaan per tahun.

Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga melakukan revitalisasi, reorientasi, dan rebranding Balai Latihan Kerja (BLK). Saat ini, jumlah BLK di seluruh Indonesia adalah 279 buah, terdiri dari 17 buah milik Pemerintah Pusat dan 262 buah milik Pemerintah Daerah. Persyaratan pendaftaran peserta tidak dibatasi umur dan pendidikan sehingga setiap penduduk bisa mengakses. Harapannya adalah pengangguran bisa masuk pasar kerja setelah kemampuannya meningkat dan kompetensi tenaga kerja meningkat sehingga daya saing dan pendapatan tenaga kerja ikut meningkat (Kemdikbud, 2016).

### **PENGARUH PENDIDIKAN TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN TENAGA KERJA ANTAR GENDER**

Analisis inferensial yang kedua adalah meneliti pengaruh pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan tenaga kerja antar gender. Hasil estimasi pada Tabel 7 dan Tabel 8 menunjukkan bahwa gender berpengaruh signifikan terhadap perilaku penentuan pendapatan di pasar tenaga kerja Indonesia. Di Jawa, misalnya, pada desil ke-1 koefisien variabel *dummy* adalah positif (0,55348). Artinya, pendapatan yang diterima tenaga kerja laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Semua desil dan semua wilayah juga memberikan hasil yang sama. Hasil tersebut sejalan dengan hasil analisis deskriptif yang sudah diuraikan sebelumnya, yaitu tenaga kerja laki-laki di Indonesia selalu memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dibanding perempuan (Tabel 2).

Ketika terjadi interaksi antara pendidikan dan gender, ternyata pengaruh pendidikan terhadap pendapatan laki-laki lebih kecil dibanding perempuan. Dengan kata lain, pendidikan bisa mengurangi ketimpangan pendapatan tenaga kerja antar gender. Di Jawa, misalnya, pada desil ke-1 pengaruh pendidikan terhadap pendapatan laki-laki adalah 0,06993, diperoleh dari 0,08449-0,01456. Sedangkan pengaruh pendidikan terhadap pendapatan perempuan adalah 0,08449. Semua desil dan semua wilayah juga memberikan hasil yang sama. Hasil ini konsisten dengan penelitian Pscharopoulos dalam Miki dan Yuval (2011). Perempuan di Indonesia bisa menempuh pendidikan lebih tinggi untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antar gender di pasar tenaga kerja. Agar tujuan tersebut tercapai, pemerintah berusaha mengurangi bias gender dalam pendidikan.

**Tabel 7. Rangkuman Hasil Regresi Kuantil dengan *Dummy* Jenis Kelamin dan Formula Mincer**

Variabel	Hasil Estimasi Koefisien Desil ke-								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>Jawa</b>									
▪ <i>educ</i>	0,08449	0,10053	0,11117	0,12184	0,12957	0,13533	0,13552	0,13214	0,13319
▪ <i>sex</i>	0,55348	0,58536	0,55031	0,53673	0,51430	0,49339	0,45521	0,37969	0,32508
▪ <i>educ x sex</i>	-0,01456	-0,02497	-0,02554	-0,02821	-0,02865	-0,02937	-0,02822	-0,02302	-0,01851
▪ <i>Return</i>	0,06993	0,07556	0,08563	0,09363	0,10092	0,10596	0,10730	0,10912	0,11468
<b>Sumatra</b>									
▪ <i>educ</i>	0,07598	0,08893	0,10048	0,11094	0,11591	0,11508	0,11302	0,10872	0,10116
▪ <i>sex</i>	0,71239	0,71448	0,71177	0,72923	0,67571	0,60599	0,53552	0,48356	0,41777
▪ <i>educ x sex</i>	-0,02652	-0,03050	-0,03694	-0,04465	-0,04493	-0,04120	-0,03519	-0,03224	-0,02549
▪ <i>Return</i>	0,04946	0,05843	0,06354	0,06629	0,07098	0,07388	0,07783	0,07648	0,07567
<b>Kalimantan</b>									
▪ <i>educ</i>	0,07710	0,08328	0,09017	0,09583	0,09395	0,09151	0,08806	0,08397	0,08004
▪ <i>sex</i>	0,74933	0,67544	0,64708	0,58876	0,51879	0,45072	0,41001	0,37904	0,34022
▪ <i>educ x sex</i>	-0,03014	-0,02667	-0,02999	-0,03138	-0,02876	-0,02291	-0,01936	-0,01545	-0,00842
▪ <i>Return</i>	0,04696	0,05661	0,06018	0,06445	0,06519	0,06860	0,06870	0,06852	0,07162
<b>Sulawesi</b>									
▪ <i>educ</i>	0,07889	0,08945	0,11507	0,13319	0,13872	0,13339	0,12622	0,11885	0,10523
▪ <i>sex</i>	0,71814	0,67192	0,78357	0,86750	0,82532	0,72060	0,60723	0,57366	0,43517
▪ <i>educ x sex</i>	-0,02369	-0,02403	-0,04140	-0,05680	-0,05806	-0,05114	-0,04266	-0,03841	-0,02615
▪ <i>Return</i>	0,05520	0,06542	0,07367	0,07639	0,08066	0,08225	0,08356	0,08044	0,07908
<b>Bali, NTB, NTT</b>									
▪ <i>educ</i>	0,08220	0,09766	0,11263	0,11964	0,12510	0,12560	0,12719	0,12412	0,11470
▪ <i>sex</i>	0,22551	0,28640	0,35559	0,39769	0,38717	0,36659	0,35870	0,31892	0,23219
▪ <i>educ x sex</i>	0,00178	-0,00349	-0,01134	-0,01767	-0,01990	-0,01930	-0,02092	-0,01991	-0,01164
▪ <i>Return</i>	0,08398	0,09417	0,10129	0,10197	0,10520	0,10630	0,10627	0,10421	0,10306
<b>Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat</b>									
▪ <i>educ</i>	0,11046	0,13561	0,13021	0,11626	0,11435	0,10480	0,09795	0,08856	0,07728
▪ <i>sex</i>	0,53677	0,63960	0,47173	0,28073	0,34303	0,29342	0,26438	0,22119	0,21382
▪ <i>educ x sex</i>	-0,03261	-0,04391	-0,03368	-0,02058	-0,02329	-0,01686	-0,01366	-0,00844	-0,00379
▪ <i>Return</i>	0,07785	0,09170	0,09653	0,09568	0,09106	0,08794	0,08429	0,08012	0,07349

Keterangan: semua memiliki *p-value* = 0,000

*Return* = pengaruh pendidikan terhadap pendapatan tenaga kerja laki-laki

Sumber: Sakernas 2013, diolah

Salah satu kebijakan yang telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi bias gender dalam pendidikan adalah meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sampai wilayah pedesaan. Selain itu, biaya pendidikan, baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung (*opportunity cost*) sekolah, juga disubsidi oleh pemerintah melalui program BOS. Program tersebut merupakan salah satu program pemerintah yang netral gender. Namun demikian, pemerintah juga menyadari bahwa pencapaian hasil pendidikan tidak hanya didukung oleh adanya akses yang baik. Dalam beberapa tahun terakhir, upaya dalam mendukung mutu, relevansi, dan pencapaian hasil juga telah dilakukan oleh pemerintah, misalnya pendekatan pembelajaran yang responsif gender, kesetaraan gender dalam kurikulum, kesetaraan gender dalam pengembangan guru, dan kesetaraan gender dalam pencapaian hasil pembelajaran (ACDP, 2013). Kebijakan tersebut diharapkan bisa menjadi katalis dan memberikan kontribusi terhadap adanya pemahaman kesetaraan antara perempuan dan

laki-laki di aspek kehidupan lainnya, termasuk pasar tenaga kerja.

*“Upaya untuk mencapai kesetaraan gender melalui akses pendidikan merupakan langkah awal yang baik. Namun demikian, memiliki akses yang setara belum menjamin tercapainya kesetaraan itu sendiri. Untuk mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan, diperlukan kesempatan yang sama untuk laki-laki maupun perempuan dan perlakuan yang setara dan adil. Perlakuan tersebut pada gilirannya akan meningkatkan kesetaraan yang lebih luas dalam kinerja pembelajaran dan hasil-hasilnya. Lebih jauh lagi, anak-anak Indonesia diharapkan akan mendapatkan kesempatan yang setara di pasar tenaga kerja dan bidang kehidupan lainnya”*

*(Deputi Meneg PPN/Kepala Bappenas*

*Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan dalam ACDP, 2013)*

**Tabel 8. Rangkuman Hasil Regresi Kuantil dengan *Dummy* Jenis Kelamin dan Formula Bhucinsky**

Variabel	Hasil Estimasi Koefisien Desil ke-								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Jawa									
▪ <i>educ</i>	0,08105	0,09458	0,10215	0,11200	0,11853	0,12366	0,12349	0,12042	0,11936
▪ <i>sex</i>	0,57907	0,58673	0,54388	0,54605	0,51729	0,49645	0,45057	0,38661	0,33239
▪ <i>educ x sex</i>	-0,01690	-	-	-	-	-	-	-	-
▪ <i>Return</i>	0,06415	0,06975	0,07726	0,08311	0,08949	0,09386	0,09576	0,09664	0,10041
Sumatra									
▪ <i>educ</i>	0,06811	0,07838	0,08762	0,09904	0,10371	0,10411	0,10079	0,09700	0,08899
▪ <i>sex</i>	0,70422	0,71724	0,71077	0,74529	0,69797	0,63755	0,54844	0,50276	0,42462
▪ <i>educ x sex</i>	-0,02439	-	-	-	-	-	-	-	-
▪ <i>Return</i>	0,04372	0,04783	0,05062	0,05279	0,05684	0,05986	0,06394	0,06346	0,06343
Kalimantan									
▪ <i>educ</i>	0,06989	0,07408	0,0801	0,08248	0,08480	0,08094	0,07778	0,07295	0,06851
▪ <i>sex</i>	0,760350	0,68560	0,64974	0,58430	0,54133	0,46220	0,44326	0,38794	0,35088
▪ <i>educ x sex</i>	-0,03079	-	-	-	-	-	-	-	-
▪ <i>Return</i>	0,03910	0,04690	0,04959	0,05249	0,05424	0,05748	0,05653	0,05757	0,05921
Sulawesi									
▪ <i>educ</i>	0,06994	0,08210	0,10424	0,12074	0,12455	0,12308	0,11644	0,10701	0,09270
▪ <i>sex</i>	0,71321	0,68230	0,80544	0,87036	0,81768	0,75304	0,65861	0,59501	0,45418
▪ <i>educ x sex</i>	-0,02149	-	-	-	-	-	-	-	-
▪ <i>Return</i>	0,04845	0,05777	0,06200	0,06333	0,06608	0,06800	0,07004	0,06688	0,06517
Bali, NTB, NTT									
▪ <i>educ</i>	0,07324	0,08957	0,09721	0,10316	0,10835	0,10969	0,11146	0,10603	0,09605
▪ <i>sex</i>	0,24345	0,35197	0,37561	0,40411	0,42941	0,40174	0,38183	0,33081	0,22777
▪ <i>educ x sex</i>	0,00081	-	-	-	-	-	-	-	-
▪ <i>Return</i>	0,07405	0,08043	0,08375	0,08514	0,08465	0,08681	0,08935	0,08632	0,08465
Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat									
▪ <i>educ</i>	0,10287	0,12396	0,11727	0,10572	0,10271	0,09584	0,08605	0,07739	0,06836
▪ <i>sex</i>	0,56741	0,64676	0,47228	0,30841	0,32408	0,32531	0,26303	0,25012	0,26046
▪ <i>educ x sex</i>	-0,03473	-	-	-	-	-	-	-	-
▪ <i>Return</i>	0,06814	0,08045	0,08316	0,08286	0,0799	0,07686	0,07224	0,06724	0,06057

Keterangan: semua memiliki  $p\text{-value} = 0,000$

*Return* = pengaruh pendidikan terhadap pendapatan tenaga kerja laki-laki

Sumber: Sakernas 2013, diolah

## KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis pengaruh pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan yang diterima tenaga kerja di Indonesia. Terdapat temuan bahwa pengaruh pendidikan terhadap pendapatan semakin meningkat seiring meningkatnya distribusi pendapatan (desil). Dengan kata lain, penambahan pendapatan karena pendidikan, lebih tinggi pada distribusi pendapatan teratas (desil ke-9). Akibatnya, terjadi ketimpangan pendapatan. Pengaruh pendidikan terhadap pendapatan yang berbeda tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh *over-education*, interaksi pendidikan-kemampuan, dan perbedaan kualitas sekolah atau jurusan (bidang studi).

Kebijakan yang bisa dilakukan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan adalah meningkatkan investasi pada bidang pendidikan. Realisasinya, pengalokasian 20 persen APBN dan APBD untuk investasi pada bidang pendidikan sudah dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 2010, antara lain untuk penyediaan beasiswa, rehabilitasi ruang kelas, pembangunan unit sekolah baru dan ruang kelas baru, pembangunan prasarana pendukung, dan pemberian tunjangan profesi guru. Selain itu, Pemerintah juga melakukan pengembangan BLK dan menjalin kemitraan dengan pelaku usaha untuk meningkatkan ketrampilan penduduk usia kerja. Kebijakan tersebut diharapkan bisa meningkatkan rata-rata lama sekolah serta meningkatkan kemampuan dan

kualitas angkatan kerja. Ketika masuk ke pasar tenaga kerja, mereka bisa bersaing dan memperoleh pendapatan yang tinggi sehingga pada akhirnya bisa mengurangi ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan data BPS, pada tingkat pendidikan yang sama, pendapatan yang diterima tenaga kerja laki-laki selalu lebih besar dibanding perempuan. Namun demikian, pengaruh pendidikan terhadap pendapatan perempuan lebih besar dibanding laki-laki sehingga pendidikan bisa mengurangi ketimpangan pendapatan antar gender. Saat ini kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sudah tepat. Pemerintah berusaha meningkatkan rata-rata lama sekolah perempuan dengan mengurangi bias gender di bidang pendidikan di Indonesia, misalnya meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sampai wilayah pedesaan, memberikan subsidi pendidikan, dan melakukan pendekatan pembelajaran yang responsif gender. Peningkatan investasi pendidikan dan beberapa kebijakan kesetaraan gender di bidang pendidikan diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih luas, termasuk kesetaraan gender di pasar tenaga kerja.

#### DAFTAR PUSTAKA

- ACDP. (2013). Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan di Indonesia. Diakses pada 12 Juni 2016 di <http://www.acdp-indonesia.org/wp-content/uploads/2015/01/Policy-Brief-ACDP-Gender-Equality-Indonesia-FINAL.pdf>
- Ashari, H. (2014). Anggaran Pendidikan 20 Persen, Apakah Sudah Dialokasikan? Diakses pada 12 Juni 2016 di <http://www.bppk.kemenu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20310-anggaran-pendidikan-20,-apakah-sudah-dialokasikan>.
- Ashenfelter, O., Rouse, C. (2000). *Schooling, Intelligence and Income in America*. In: Arrow, K., Bowles, S., Durlauf, S. (Eds.), *Meritocracy and Economic Inequality*. Princeton: Princeton Univ. Press.
- BPS. (2014a). *Indeks Pembangunan Gender 2014*. Jakarta: 2014.
- BPS. (2014b). *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2014*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2015). *Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Februari 2015*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2016a). *Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Februari 2016*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2016b). *Keadaan Pekerja di Indonesia Februari 2016*. Jakarta: BPS.
- Buchinsky, M. (1998). The Dynamics of Changes in the Female Wage Distribution in the USA: A Quantile Regression Approach. *Journal of Applied Econometrics*, 13, 1-30.
- Card, D. (1999). The Causal Effect of Education on Earnings. In: Ashenfelter, O., Card, D. (Eds.), *Handbook of Labour Economics*, 3, 1801–1863.
- ILO. (2013). *Trend Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia 2013*. Jakarta: ILO.
- ILO. (2015). *Trend Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia 2014-2015*. Jakarta: ILO.
- Kemdikbud. (2016). Pemerintah Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Buruh. Diakses pada 12 Juni 2016 di <http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/05/pemerintah-komitmen-tingkatkan-kesejahteraan-buruh>.
- Koenker, R., Bassett, G. (1978). Regression Quantiles, *Econometrica*, 46 (1), 33-50.
- Koenker, R., Hallock, K. F. (2001). Quantile Regression, *The Journal of Economic Perspectives*, 15 (4), 143-156.
- Liu, X., Saat, M.R., Qin, X., Barkan, C. P. L. (2013). Analysis of U.S. Freight-Train Derailment Severity Using Zero-Truncated Negative Binomial Regression and Quantile Regression, *Accident Analysis and Prevention*, 59, 87-93.
- Martins, P. S., Pereira, P.T. (2004). Does Education Reduce Wage Inequality? Quantile Regression Evidence from 16 Countries. *Labour Economics*, 11, 355-371.
- Miki, M., Yuval, F. (2011). Using Education to Reduce the Wage Gap Between Men and Women. *The Journal of Socio-Economics*, 40, 412-416.
- Mincer, J. (1974). Schooling, Experience and the Distribution of Earnings and Employment: An Overview. *National Bureau of Economic Research*, 71-94.
- Sullivan, D., Smeeding, T. (1997). Educational Attainment and Earnings Inequality in Eight Nations. *International Journal of Educational Research*, 27, 513–525.
- Vibriyanti, D. (2013). Ketimpangan Gender dalam Partisipasi Ekonomi: Analisis Data Sakernas 1980-2012. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 8, 1-16.

## JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

*p-ISSN : 1907-2902 (Print)*

*e-ISSN : 2502-8537 (Online)*

### ANALISIS KEMISKINAN ANAK BALITA PADA RUMAH TANGGA DI PROVINSI SUMATERA BARAT

#### (ANALYSIS OF CHILDREN POVERTY IN HOUSEHOLDS IN WEST SUMATERA)

**Nasri Bachtiar, Mora J.Rasbi, dan Rahmi Fahmi**

Fakultas Ekonomi Universitas Andalas

Korespondensi penulis: *nasrib@yahoo.com*

#### **Abstract**

*The purpose of this study is to analyze factors that influence children poverty in West Sumatera Province based on household and parents characteristics. To address this issue, the 2013 National Socioeconomic Survey was derived from the Indonesian Statistics Agency and analyzed using logistic regression. Research results showed factors that significantly affected the probability of children fall into absolute poverty are low education level of parents, mother and head of household's employment status, location of residences in villages, and having more than one child. Policies on poverty alleviation have been implemented by the government. However, a more comprehensive effort particularly for family with children under-five needs to be taken into account.*

**Keywords:** *Child Poverty, Birth Certificate, Exclusive Breastfeeding, Basic Immunization, Early Childhood Education*

#### **Abstrak**

Artikel ini bertujuan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan anak Balita di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan karakteristik rumah tangga dan orang tua. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2013 dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pengolahan dan analisa data didasarkan pada persamaan regresi logistik. Hasil kajian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi peluang anak Balita jatuh pada kondisi kemiskinan absolut adalah disebabkan karena rendahnya pendidikan, pekerjaan ibu dan kepala rumah tangga, status tinggal di wilayah pedesaan, dan memiliki Balita lebih dari satu orang. Intervensi kebijakan pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi diperlukan implementasi yang lebih komprehensif, dan berfokus pada keluarga miskin dengan anak Balita.

**Kata Kunci:** *Kemiskinan Anak, Akte Kelahiran, ASI Eksklusif, Imunisasi Dasar, Pendidikan Usia Dini*

#### **PENDAHULUAN**

Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu program kerja yang disepakati dalam program *Sustainable Development Goals* (SDGs) disamping program-program lainnya. Program ini antara lain bertujuan untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan kaum perempuan dan anak-anak melalui peningkatan harapan hidup, status gizi dan kesehatan, serta akses terhadap pendidikan khususnya bagi anak-anak dibawah 5 tahun (Balita). Selain itu, program SDG'S yang merupakan kelanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDGs) juga dapat memberikan

sebuah kerangka pemikiran bagi pengambil kebijakan untuk memastikan bahwa hak-hak dasar anak, seperti akte kelahiran, ASI eksklusif, imunisasi lengkap dan partisipasi pendidikan prasekolah (PAUD) dapat terpenuhi (UNICEF, 2012).

Alkire dan Foster (2011) serta Sen (1996) mengemukakan bahwa kemiskinan secara umum dapat diukur melalui kondisi ekonomi, namun untuk memahami gambaran kemiskinan yang sesungguhnya ukuran kondisi ekonomi saja tidak cukup. Pendekatan yang terbaik untuk mengukur kemiskinan menurut ketiga ahli ini adalah melalui pendekatan *deprivasi*.

Menurut pendekatan ini, kemiskinan tidak hanya diukur dengan indikator pendapatan, tetapi juga dapat diukur dari berbagai dimensi lain yang mencerminkan kemiskinan sesungguhnya, seperti terbatasnya akses terhadap air bersih dan sanitasi, pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta pencatatan kelahiran.

UNICEF & SMERU (2013) mengemukakan lebih dari separuh anak-anak di negara berkembang tumbuh dalam kemiskinan. Kemiskinan ini membuat mereka kehilangan kemampuan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dan berkembang, serta membuat anak-anak lebih rentan terhadap eksploitasi, pelecehan, diskriminasi, dan stigmatisasi. Oleh karena itu, pembangunan bangsa ke depan tidak hanya menitikberatkan pada penduduk dewasa saja, tetapi juga pada kelompok anak-anak yang jumlahnya mencapai hampir sepertiga dari jumlah penduduk dunia.

Di Indonesia, persentase anak usia 0-6 tahun pada rumah tangga miskin (16,94 persen) lebih tinggi dibanding rumah tangga tidak miskin (12,96 persen). Sedangkan persentase penduduk usia 19 tahun ke atas (penduduk dewasa) pada rumah tangga miskin (56,34 persen) lebih rendah dibanding pada rumah tangga tidak miskin (64,78 persen) (BPS, 2013). Angka ini menunjukkan bahwa tidak setiap orang bisa memperoleh manfaat dari transformasi ekonomi yang terjadi di Indonesia dan anak-anak merupakan pihak yang paling banyak terkena dampak dari kemiskinan. Berdasarkan penelitian UNICEF & SMERU (2013) yang menggunakan data panel Susenas tahun 2009 yang menganalisis kemiskinan anak dari enam dimensi *deprivasi* yaitu dimensi pendidikan, kesehatan, partisipasi dalam dunia kerja, tempat tinggal, sanitasi, dan air, ditemukan bahwa hanya sekitar 18,3 persen anak Indonesia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, seperti akte kelahiran, ASI eksklusif, imunisasi lengkap dan partisipasi dalam pendidikan prasekolah (PAUD).

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang mengalami kemiskinan anak multidimensi. Dimensi-dimensi yang melanda anak di Sumatera Barat, seperti masalah kepemilikan akte kelahiran, kelengkapan lima imunisasi dasar, memperoleh ASI eksklusif, dan keikutsertaan dalam pendidikan anak usia dini (PAUD) cukup tinggi. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2012 yang dipublikasikan BPS pada Statistik Kesejahteraan Rakyat 2012, sebanyak 42,52 persen anak usia 0-4 tahun di Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki akte kelahiran. Selanjutnya hanya 53,06 persen anak usia 2-4 tahun yang mendapatkan ASI eksklusif. Ini sangat jauh dari target yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yaitu 80 persen (Pramono,

2014). Sementara itu, di Provinsi Sumatera Barat hanya 61,57 persen anak Balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Selanjutnya, hanya 8,7 persen rumah tangga miskin yang anaknya pernah mengikuti PAUD.

Kemiskinan pada anak sangat berkaitan dengan karakteristik orang tua dan rumah tangga dimana mereka tinggal. Hal ini seperti terungkap dalam kajian Nichols (2008) mengenai kaitan antara faktor keluarga dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan anak di Amerika Serikat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis apakah fluktuasi kemiskinan anak di Amerika Serikat dipengaruhi oleh variabel kebijakan pemerintah daerah di bidang ekonomi, komposisi, dan jumlah anggota keluarga, serta perubahan perilaku bekerja orang tua dalam memperoleh penghasilan. Dengan menggunakan regresi logistik ditemukan bahwa faktor yang dominan memengaruhi kemiskinan anak adalah kondisi ekonomi keluarga yang terkendala karena adanya kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, ditemukan juga bahwa pendidikan dan pekerjaan orang tua mempengaruhi pula probabilitas anak menjadi miskin.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemiskinan anak Balita pada rumah tangga di Propinsi Sumatera Barat. Secara lebih khusus, tujuan penelitian ini adalah: (1). Mengkaji kemiskinan anak yang berumur di bawah lima tahun (Balita) menurut karakteristik orang tua dan rumah tangga dimana anak Balita tersebut tinggal; (2). Menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi probabilitas kemiskinan absolut anak Balita di Provinsi Sumatera Barat.

## KONSEP KEMISKINAN ANAK

Kemiskinan anak penting dipelajari karena didasarkan kepada kenyataan bahwa kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya (Bappenas, 2004). Hak-hak kebutuhan dasar tersebut antara lain adalah: (a). Terpenuhinya sandang dan pangan; (b). Kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup; (c). Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan (d). Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik (BPS, 2009).

Kemiskinan pada rumah tangga akan berdampak pada anak-anak yang tinggal di rumah tangga tersebut. Anak-anak merupakan kelompok umur yang paling rentan didera oleh kemiskinan dibandingkan dengan kelompok umur lainnya. Kemiskinan yang menimpa anak-anak

akan menyebabkan kerusakan jangka panjang, baik terhadap perkembangan mental anak maupun fisiknya. Hal ini pada gilirannya akan terus berlanjut pada generasi selanjutnya ketika mereka menjadi orang dewasa yang tetap terjebak dalam mata rantai kemiskinan dan tidak mampu memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka (Kumala *et.al*, 2013).

Secara umum tidak ada pendekatan yang sempurna untuk mengukur kemiskinan anak, semua tergantung pada ketersediaan data dan tujuan penelitian itu sendiri. Kemiskinan anak yang kompleks tentu memerlukan kebutuhan data yang kompleks juga karena harus meliputi faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan mental, fisik, emosional dan spiritual dari anak (Roelen dan Gassmann, 2008). Oleh karena itu, pendekatan pengukuran kemiskinan pada anak tidak boleh dipandang pada ukuran moneter saja, tapi juga melalui pendekatan multidimensi, seperti pendekatan pemenuhan hak asasi manusia, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pendekatan kemampuan anak.

Beberapa lembaga memberikan definisi kemiskinan anak dengan beberapa pendekatan sebagaimana dikutip UNICEF (2006). UNICEF (2006) dengan menggunakan pendekatan moneter menyatakan bahwa anak-anak yang hidup dalam kemiskinan (adalah mereka yang) mengalami perampasan material, sumber daya spiritual, dan emosional yang diperlukan untuk bertahan hidup, mengembangkan diri dan berkembang, sehingga mereka tidak dapat menikmati hak-hak mereka, mencapai potensi penuh mereka atau berpartisipasi sebagai anggota penuh dan setara dalam masyarakat. *The Christian Children's Fund (CCF)* pada tahun 2002 dengan menggunakan pendekatan *tangible component* (moneter yang didekati diproksi dengan menggunakan pendapatan atau pengeluaran untuk pemenuhan barang dan jasa) dan pendekatan *intangible component* (rasa aman, terhindar dari pelecehan dan kekerasan serta pengucilan sosial dalam masyarakat) mengemukakan bahwa anak yang mengalami kemiskinan merupakan anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya, diperlakukan tidak sama dan merasa tidak aman dengan lingkungan tumbuh mereka. Selanjutnya, *The Childhood Poverty Research and Policy Center (CHIP)* pada tahun 2004 menggunakan pendekatan moneter dan mengkontribusikan pemenuhan HAM. Melalui pendekatan ini, kemiskinan anak merupakan keadaan dimana anak dan orang muda tumbuh tanpa akses ke berbagai jenis sumber daya yang penting bagi kesejahteraan dan pemenuhan potensi mereka. *Save The Children* (2003) dengan pendekatan moneter dan mendukung pendekatan HAM dalam mengatasi kemiskinan anak mengemukakan bahwa anak yang

mengalami kemiskinan merupakan anak yang tinggal dalam keluarga yang miskin.

Selanjutnya untuk mengukur tingkat kemiskinan anak Balita dipakai ukuran kemiskinan absolut (*absolute poverty*) pada anak. Ukuran kemiskinan absolut pada anak mengalami *deprivasi* pada beberapa dimensi kebutuhan dasar mereka sebagaimana yang dikemukakan oleh Roelen, Gassmann dan De Neubourg (2009). Ketiga ahli tersebut mendefinisikan anak yang mengalami kemiskinan absolut adalah anak-anak yang mengalami *deprivasi* pada dua atau lebih indikator dimensi kebutuhan dasarnya, seperti akte kelahiran, ASI eksklusif, imunisasi lengkap dan partisipasi pendidikan prasekolah (PAUD).

Penelitian tentang kemiskinan anak merupakan isu yang harus ditanggapi dengan serius, terutama bila dikaitkan dengan hak kebutuhan dasarnya. Kemiskinan anak pada penelitian ini difokuskan pada empat dimensi kebutuhan dasarnya, yaitu kepemilikan akte kelahiran, ASI eksklusif, kelengkapan imunisasi dasar, dan partisipasi pendidikan pra sekolah (PAUD). Untuk mengukur kemiskinan anak, penelitian ini memakai pendekatan kemiskinan absolut anak-anak Balita yang tidak terpenuhi minimal dua kebutuhan dasarnya sebagaimana yang dirumuskan oleh Roelen and Gassmann (2008):

jika , dimana 1 = miskin absolut, dan 0 = lainnya

Unit observasi dari penelitian ini adalah anak yang berumur kurang dari lima tahun (Balita) yang tinggal pada rumah tangga di Provinsi Sumatera Barat. Data yang digunakan adalah *raw data* hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2013 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia khususnya untuk 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Untuk melihat tingkat pemenuhan kebutuhan dasar pada anak Balita menurut karakteristik orang tua dan rumah tangga, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan analisis tabulasi silang dan gambar/grafik. Karakteristik orang tua yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendidikan kepala rumah tangga, pendidikan ibu kandung, status pekerjaan kepala rumah tangga, kegiatan utama, dan lapangan usaha kepala rumah tangga. Sedangkan untuk karakteristik rumah tangga difokuskan pada wilayah tempat tinggal, kemiskinan rumah tangga, dan jumlah Balita yang tinggal dalam suatu rumah tangga dimana anak Balita tinggal.

Untuk menganalisis pengaruh karakteristik orang tua dan karakteristik rumah tangga terhadap kemiskinan absolut pada anak Balita digunakan model analisis regresi logistik. Model regresi logistik biasa digunakan

untuk melihat peluang (probabilitas) terjadinya suatu keadaan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang memengaruhinya, dan membandingkan risiko munculnya suatu keadaan sebagai akibat dari suatu faktor setelah memperhitungkan faktor-faktor lainnya dalam model. Model persamaan regresi logistik ini dapat dirumuskan sebagai berikut (Hosmer & Lemeshow, 1989):

$$P = P(Y = 1) = \frac{S_0 + S_1X_1 + S_2X_2 + \dots + S_pX_p}{1 + \exp(S_0 + S_1X_1 + S_2X_2 + \dots + S_pX_p)}$$

Di mana  $p(x)$  adalah peluang terjadinya  $Y = 1$ , atau dalam penelitian ini peluang seorang anak jatuh kepada kemiskinan absolut.

Dengan melakukan transformasi logit dari  $p(x)$ , didapat persamaan yang lebih sederhana yaitu:

$$g(x) = \ln \frac{f(x)}{1 - f(x)}$$

Persamaan tersebut merupakan fungsi linier dalam parameter-parameternya. Persamaan ini dijadikan model pengujian sebagai berikut:

$$G(x) = S_0 + S_1X_1 + S_2X_2 + \dots + S_pX_p$$

$$G(x) = \ln [p/(1-p)]$$

$\ln [p/(1-p)]$  adalah *odds ratio*

Dimana :

- $p$  = persentase dari anak yang miskin
- $(1-p)$  = persentase dari anak yang tidak miskin
- $0$  = konstanta
- $i$  = koefisien regresi ( $1, 2, \dots, p$ )
- $X_i$  = variabel bebas ( $X_1, X_2, \dots, X_p$ )

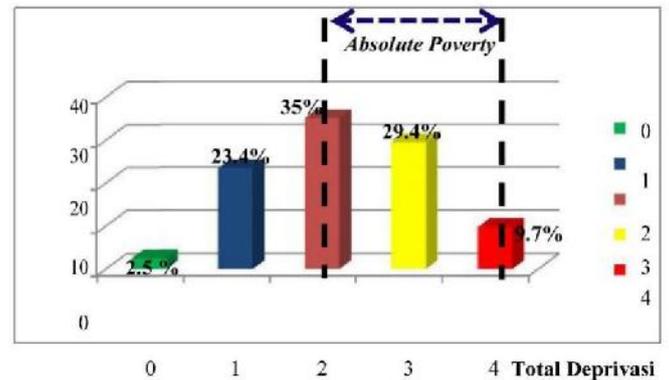
**Tabel 1. Keterangan Variabel**

No.	Ket. Variabel	Value label	Jenis Data
(1)	(2)	(3)	(4)
1	$Z(x)$ = Kemiskinan absolut Balita	= Miskin absolut, 0 = Tidak Miskin	Kateg orik
2	$PDDK\_KRT$ = Pendidikan KRT	= SLTP ke atas, 0 = SD 1 ke bawah	Kateg orik
3	$PDDK\_Ibu$ = Pendidikan Ibu	= SLTP ke atas, 0 = SD 1 ke bawah	Kateg orik
4	$KERJA\_KRT$ = Status pekerjaan KRT	1 = formal, 0 = informal	Kateg orik
5	$StatusKerja\_Ibu$ = Kegiatan u ibu	= tidak bekerja, 0 = 1 bekerja	Kateg orik
6	$LU\_KRT$ = Lapangan usaha KRT	= Non pertanian, 0 = 1 Pertanian	Kateg orik
7	$WILTING$ = Wilayah tempat tinggal	= Kota, 0 = 1 Desa	Kateg orik
8	$RT\_Miskin$ = Kemiskinan RT	1= RT tidak miskin, 0 = RT miskin	Kateg orik
9	$J\_BALITA$ = Jumlah Balita dalam RT	= 1 orang, 0 = Lebih dari 1	Kateg orik

Sebelum melakukan proses analisis dengan menggunakan *multiple logistic regression*, terlebih dahulu dilakukan uji korelasi terhadap variabel independen yang digunakan. Uji korelasi tersebut dilakukan dengan uji  $\chi^2$  atau uji korelasi terhadap korelasi Pearson. Bila di antara variabel independen yang digunakan mempunyai hubungan atau korelasi yang kuat, maka salah satu dari variabel independen tersebut harus dikeluarkan. Selanjutnya untuk menguji signifikan atau tidaknya koefisien variabel regresi logistik digunakan fungsi log likelihood (G). Jika  $G > \chi^2$ , berarti parameter model signifikan.

### KEMISKINAN ANAK DAN FAKTOR YANG BERPENGARUH

Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, kemiskinan absolut pada anak Balita yaitu anak Balita yang terpapar pada dua dimensi atau lebih kebutuhan dasarnya (kepemilikan akte kelahiran, ASI eksklusif, imunisasi dasar lengkap, dan pendidikan pra sekolah). Dari pengolahan data Susenas tahun 2013 ditemukan bahwa terdapat 74,10 persen anak Balita di Provinsi Sumatera Barat menderita kemiskinan absolut. Sedangkan yang benar-benar terbebas dari deprivasi empat dimensi kebutuhan dasar hanya 2,50 persen atau dengan kata lain terpenuhi semua dimensi kebutuhan dasarnya. Angka ini mengindikasikan bahwa anak Balita di Sumatera Barat sangat banyak yang mengalami kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar mereka.



Sumber: BPS, Susenas 2013 (diolah)

**Grafik 1. Persentase Anak Balita yang Mengalami Deprivasi Kebutuhan Dasar di Provinsi Sumatera Barat**

Tingkat pencapaian pemenuhan hak dasar bagi anak Balita pada rumah tangga di Sumatera Barat tahun 2013 dapat ditinjau berdasarkan masing-masing dimensi kebutuhan dasar sebagaimana yang disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Persentase Anak Balita Berdasarkan Indikator Pemenuhan Hak Dasar Anak Menurut Klasifikasi Wilayah Tempat Tinggal Provinsi Sumatera Barat, 2013**

Indikator	Klasifikasi Wilayah Tempat Tinggal				Jumlah (Perkotaan+Perdesaan)	
	Perkotaan		Perdesaan		Ya	Tidak
	Ya	Tidak	Ya	Tidak		
Akte Kelahiran	76,3	23,7	52,9	47,1	62,7	37,3
ASI Eksklusif	59,7	40,3	56,6	43,4	57,9	42,1
Imunisasi Dasar Lengkap	51,3	48,7	52,0	48,0	51,7	48,3
PAUD	9,3	90,7	6,0	94,0	7,4	92,6

Catatan: Ya = terpenuhi, Tidak = tidak terpenuhi  
 Sumber: BPS, Susenas 2013 (diolah)

Dari Tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa di Provinsi Sumatera Barat sekitar 76,3 persen anak Balita di wilayah perkotaan telah memiliki akte kelahiran, sedangkan di wilayah pedesaan hanya 52,9 persen. Sementara itu, untuk indikator pemenuhan ASI eksklusif, sebanyak 59,7 persen anak Balita di wilayah perkotaan telah memperoleh ASI eksklusif, sedangkan di wilayah pedesaan sebesar 56,6 persen. Indikasi ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar dilihat dari akte kelahiran terdapat perbedaan antara perkotaan dan pedesaan, sementara dalam pemenuhan ASI eksklusif tidak begitu berbeda.

Selanjutnya, untuk indikator imunisasi dasar lengkap, persentase pemenuhannya lebih tinggi di wilayah pedesaan (52,0 persen) dari pada perkotaan (51,3 persen). Untuk indikator pendidikan anak usia dini (PAUD), tingkat pemenuhan baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan sangat rendah. Hanya 9,30 persen anak Balita di wilayah perkotaan yang pernah mengikuti PAUD dan hanya 6,00 persen di wilayah pedesaan. Jika dilihat secara umum, tingkat pemenuhan kebutuhan dasar anak pada Balita di wilayah perkotaan lebih tinggi dari pada wilayah pedesaan kecuali untuk indikator imunisasi dasar. Indikator yang paling banyak terpenuhi adalah kepemilikan akte kelahiran, sedangkan yang paling sedikit yaitu indikator PAUD. Untuk melihat karakteristik kemiskinan absolut pada anak Balita, tingkat kemiskinan absolut pada anak Balita ditabulasi silang dengan variabel penjelas.

**KARAKTERISTIK ORANG TUA DAN RUMAH TANGGA ANAK BALITA MISKIN ABSOLUT**

Kemiskinan absolut pada anak Balita dapat dikaji lebih lanjut dengan mengaitkannya dengan karakteristik

orang tua dan karakteristik rumah tangga. Tabel 3 di bawah mendeskripsikan hubungan antara pendidikan kepala rumah tangga (KRT) dan pendidikan ibu dengan kemiskinan absolut pada anak Balita.

**Tabel 3. Persentase Kemiskinan Absolut Pada Anak Balita Berdasarkan Tingkat Pendidikan Ibu dan Kepala Rumah tangga Di Provinsi Sumatera Barat, 2013**

Tingkat Pendidikan KRT	Kemiskinan Absolut		Tingkat Pendidikan Ibu	Kemiskinan Absolut	
	Ya	Tidak		Ya	Tidak
SD Ke Bawah	47,3	34,4	SD Ke Bawah	36,4	20,8
SLTP Sederajat	19,0	20,5	SLTP Sederajat	20,7	20,9
SLTA Sederajat	27,1	34,3	SLTA Sederajat	29,8	36,9
PT	6,6	10,8	PT	13,1	21,4
Jumlah	100	100	Jumlah	100	100

Catatan: Ya = miskin, Tidak = tidak miskin  
 Sumber: BPS, Susenas 2013 (diolah)

Dari Tabel 3 diketahui bahwa proporsi terbesar anak yang miskin absolut adalah anak Balita dengan KRT yang pendidikan SD ke bawah yaitu sebanyak 47,3 persen dan ibu yang juga pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 34,4 persen. Perbedaan proporsi tingkat kemiskinan absolut pada anak Balita menurut tingkat pendidikan KRT dan pendidikan ibu merupakan perbedaan yang signifikan (tingkat signifikansi 5% dengan nilai *chi-square* 51.704 dan *p-value* 0.000 (untuk pendidikan KRT) dan untuk pendidikan Ibu dengan nilai *chi-square* 88.481 dan *p-value* 0.000. Hal ini berarti terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan KRT dan pendidikan ibu dengan kemiskinan absolut pada anak Balita.

Selanjutnya, jika dihubungkan dengan karakteristik pekerjaan kepala rumah tangga (KRT), diketahui bahwa anak yang mengalami kemiskinan absolut kebanyakan berasal dari rumah tangga dengan KRT yang bekerja di sektor informal. Sedangkan jika dikaji menurut kegiatan utama ibu, anak yang tidak miskin absolut kebanyakan berasal dari ibu yang bekerja, yaitu sebesar 56,8 persen. Ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada kemiskinan absolut anak Balita menurut pekerjaan KRT dan partisipasi bekerja ibu, dengan tingkat signifikansi sebesar 5 persen. Hal ini ditandai dengan nilai *chi-square* 39.210 dan *p-value* 0.000, serta nilai *chi-square* 5.930 dan *p-value* 0.015 untuk status pekerjaan KRT dan kegiatan utama ibu.

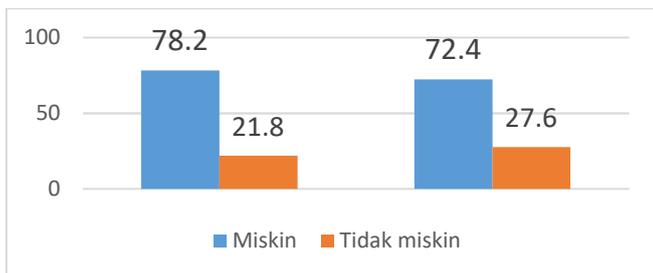
**Tabel 4. Persentase Kemiskinan Absolut Pada Anak Balita Berdasarkan Pekerjaan Kepala Rumah Tangga dan Kegiatan Utama Ibu Di Provinsi Sumatera Barat, 2013**

Status Pekerjaan KRT	Kemiskinan Absolut		Tingkat Pendidikan Ibu	Kemiskinan Absolut	
	Ya	Tidak		Ya	Tidak
Formal	34,3	46,2	Tidak Bekerja	48,0	43,2
Informal	65,7	53,8	Bekerja	52,0	56,8
Jumlah	100	100	Jumlah	100	100

Catatan: Ya = miskin, Tidak = tidak miskin  
 Sumber: BPS, Susenas 2013 (diolah)

Pada Tabel 5 juga disajikan karakteristik kemiskinan absolut anak Balita menurut kemiskinan rumah tangga dimana anak Balita tinggal. Anak yang miskin absolut, 5,8 persen tinggal pada rumah tangga miskin. Sedangkan anak yang tidak miskin absolut, 7,6 persen tinggal pada rumah tangga miskin. Ke miskin absolut pada anak Balita tidak terdapat perbedaan menurut kemiskinan rumah tangga dimana anak Balita tinggal. Hal ini diketahui dari nilai *chi-square* sebesar 3.376 dengan *p-value*  $0.066 < 0,05$ . Ini berarti tidak terdapat hubungan antara kemiskinan absolut pada anak Balita dengan kemiskinan rumah tangga.

Sementara itu, berdasarkan pengolahan data yang disajikan pada Grafik 2 mendeskripsikan persentase kemiskinan absolut pada anak Balita menurut jumlah Balita dalam satu rumah tangga dimana anak Balita tinggal. Pada rumah tangga yang memiliki anak Balita lebih dari satu orang, 78,2 persen anak Balita yang tinggal di sana berada pada kondisi miskin, sedangkan pada rumah tangga yang memiliki anak Balita satu orang, 72,4 persen anak Balitanya berada pada kondisi miskin.



Sumber: BPS, Susenas 2013 (diolah)

**Grafik 2. Persentase Kemiskinan Absolut Anak Balita Menurut Jumlah Balita dalam Rumah Tangga dimana Anak Balita Tinggal Di Provinsi Sumatera Barat, 2013**

Perbedaan proporsi tingkat kemiskinan absolut pada anak Balita menurut jumlah Balita dalam rumah tangga dimana anak Balita tinggal merupakan perbedaan yang signifikan (tingkat signifikansi 5 persen) dengan nilai

*chi-square* 12 .385 dan *p-value* 0.000. Hal ini berarti terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah Balita dalam suatu rumah tangga dengan kemiskinan absolut pada anak Balita. Banyaknya jumlah Balita dalam suatu rumah tangga mengindikasikan banyaknya beban tanggungan rumah tangga dalam merawat Balita dan juga menggambarkan jarak antara dua kelahiran yang bisa menjadi evaluasi untuk keberhasilan Program Keluarga Berencana (KB)

**PENGARUH KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA TERHADAP KEMISKINAN ANAK**

Untuk mengetahui kaitan antara karakteristik orang tua dan karakteristik rumah tangga terhadap kemiskinan absolut pada anak Balita dibangun model regresi logistik. Hasil *output* dari pengolahan data untuk model kemiskinan absolut pada anak Balita dengan SPSS dapat dilihat pada Tabel 6.

**Tabel 6. Hasil Estimasi, Nilai Uji Wald, Signifikansi, dan Nilai Odds Ratio Dari Regresi Logistik Di Provinsi Sumatera Barat, 2013**

Variabel	B	Wald	Sig.	Odds Ratio /Exp(B)
PDDK_KRT	-.206	4.849	.028	.814
PDDK_Ibu	-.620	34.528	.000	.704
KERJA_KRT	-.351	16.346	.000	1.222
StatusKerja_Ibu	.201	6.131	.013	1.097
LU_KRT	.093	.904	.342	.809
WILTING	-.212	5.726	.017	1.378
RT_Miskin	.321	4.109	.053	.701
J_Balita	-.355	15.094	.000	5.244
Constant	1.657	74.284	.000	.704

Sumber: BPS, Susenas 2013 (diolah)

Selanjutnya mengenai pengujian statistik, dilakukan uji kelayakan secara keseluruhan (*Overall Fit Test*) dengan menggunakan uji *Chi-square*. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan SPSS v.16 diperoleh nilai statistik *Chi-square* sebesar 136.572 dan *p-value* 0.000 yang jauh lebih kecil dari 0.05. Hal ini berarti dengan tingkat kepercayaan 95 persen minimal ada satu variabel bebas yang berpengaruh pada variabel terikat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model layak dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Selain pengujian secara *overall*, terdapat pula uji kecocokan model (*goodness of fit*) dari *Hosmer and Lemeshow*. Dari hasil pengolahan *Hosmer and Lemeshow Test* diperoleh nilai *Chi-square* 5.147 dan *p-value* atau *significant value* 0.742 yang jauh lebih besar dari 0.05. Hal ini menghasilkan kesimpulan dengan tingkat keyakinan 95 persen, dapat diyakini bahwa model regresi logistik yang digunakan telah cukup

mampu menjelaskan data/cocok, dengan kata lain model regresi logistik cocok dan layak dipakai untuk analisis selanjutnya karena tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati.

Berdasarkan hasil pengolahan yang disajikan pada Tabel 6 diketahui bahwa hasil pendugaan parameter menunjukkan bahwa pendidikan kepala rumah tangga dan ibu, status pekerjaan kepala rumah tangga, kegiatan utama ibu, wilayah tempat tinggal, dan jumlah Balita berpengaruh signifikan terhadap peluang anak Balita berada pada kondisi kemiskinan absolut. Hal ini diketahui dari nilai *significant value* kecil dari 0.05 (Tabel 6). Hal yang menarik adalah jika mengkaji antara kemiskinan rumah tangga dengan kemiskinan absolut pada anak Balita secara makro (level nasional) memberikan gambaran hubungan yang positif dan signifikan sebagaimana hasil temuan dari Prasetyo (2010) yang menyatakan bahwa kemiskinan rumah tangga merupakan salah satu faktor yang berperan besar dalam timbulnya kemiskinan anak. Pengkajian hubungan tersebut secara mikro (level Sumatera Barat) memberikan hasil yang berbeda. Kondisi kemiskinan rumah tangga ternyata bukanlah faktor yang berpeluang menyebabkan anak Balita berada pada kondisi kemiskinan absolut karena kemiskinan rumah tangga memiliki nilai *significant value*  $0.053 > 0.05$ .

#### **a. Pengaruh Pendidikan Kepala Rumah Tangga**

Pendidikan kepala rumah tangga menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga yang berkaitan erat dengan tingkat pengetahuan. Kepala rumah tangga yang berpendidikan tinggi mengindikasikan tingkat pengetahuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepala rumah tangga yang berpendidikan rendah. Hasil pengolahan menunjukkan nilai *odds ratio* sebesar 0,814, maka kemungkinan anak Balita yang pendidikan kepala rumah tangganya SLTP ke atas berpeluang menderita miskin absolut 0,814 kali dibandingkan dengan anak Balita yang pendidikan kepala rumah tangganya SD ke bawah. Nilai *odds ratio* kecil dari 1 (satu) berarti anak Balita yang lebih berpeluang mengalami miskin absolut adalah anak Balita yang kepala rumah tangganya berpendidikan SD ke bawah. Dengan kata lain peluang anak Balita yang kepala rumah tangganya berpendidikan SD ke bawah cenderung menjadi miskin absolut sebesar  $1/0,814 = 1,229$  kali dibandingkan anak Balita yang pendidikan kepala rumah tangganya SLTP ke atas. Semakin rendah tingkat pendidikan kepala rumah tangga semakin tinggi peluang anak Balita menderita miskin absolut. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Puspongoro (2013), probabilitas kemiskinan anak Balita pada rumah

tangga dengan rata-rata pengeluaran yang terletak pada kuantil pertama tahun 2010 dipengaruhi oleh pendidikan ayah dan ibu.

Pendidikan juga merupakan hal yang sangat penting untuk pengentasan kemiskinan. Sirovátka dan Hora (2008) yang melakukan penelitian di Republik Ceko menggambarkan betapa pentingnya memerangi kemiskinan dari sisi pendidikan. Kemiskinan yang berlanjut antar generasi diindikasikan terjadi karena ketidakmampuan keluarga untuk mengirim anak mereka bersekolah. Dengan tidak bersekolahnya anak akan mendorong anak tersebut ke jurang kemiskinan ketika dewasa nanti karena tidak bisa bersaing di pasar kerja. Persaingan di pasar kerja membutuhkan tingkat pendidikan sesuai yang diminta pasar. Hal ini akan terus terjadi jika masalah pendidikan tidak dikelola dengan baik.

#### **b. Pengaruh Pendidikan Ibu**

Mayoritas masyarakat di Sumatera Barat menganut sistem garis keturunan ibu (matrilineal). Sosok ibu memiliki peranan penting dalam keluarga dan dalam pembinaan anak. Seorang ibu yang berpendidikan diharapkan mampu mengetahui kebutuhan anaknya dan mengetahui yang terbaik bagi anaknya. Dari nilai *odds ratio* sebesar 0,538, maka kemungkinan anak Balita yang pendidikan ibunya SLTP ke atas berpeluang menderita miskin absolut 0,538 kali dibandingkan dengan anak Balita yang pendidikan kepala rumah tangganya SD ke bawah. Nilai *odds ratio* kecil dari 1 (satu) berarti anak Balita yang lebih berpeluang mengalami miskin absolut adalah anak Balita yang ibunya berpendidikan SD ke bawah. Dengan kata lain peluang anak Balita yang ibunya berpendidikan SD ke bawah cenderung menjadi miskin absolut sebesar  $1/0,538 = 1,859$  kali dibandingkan anak Balita yang pendidikan ibunya SLTP ke atas.

Temuan ini mengindikasikan bahwa pentingnya pendidikan bagi seorang ibu. Dengan berpendidikan yang tinggi, seorang ibu dapat mengetahui betapa pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar pada anak. Seorang ibu yang berpendidikan juga akan memiliki otonomi yang lebih besar dalam menentukan keputusan yang diambil dalam rumah tangga seperti keputusan dalam pendidikan dan kesehatan anak (Saputra, 2003).

#### **c. Pengaruh Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga**

Berdasarkan hasil regresi logistik, kepala rumah tangga di Provinsi Sumatera Barat yang bekerja di sektor formal memiliki risiko 0,704 kali untuk menjadikan

anak mereka miskin absolut dibandingkan kepala rumah tangga yang bekerja di sektor informal. Nilai *odds ratio* 0,704 yang kecil dari 0 (nol) memperlihatkan bahwa yang lebih berpeluang menyebabkan anak menjadi miskin absolut adalah kepala rumah tangga yang bekerja di sektor informal. Dengan demikian kepala rumah tangga yang bekerja di sektor informal berisiko  $1/0,704 = 1,420$  kali anak mereka menderita miskin absolut dibandingkan dengan kepala rumah tangga yang bekerja di sektor formal.

Pekerja sektor informal yang umum dijumpai di Indonesia ada kecenderungan untuk memiliki pendapatan yang rendah dan resiko ketidakpastian usaha yang tinggi sehingga sedikit untuk bisa diandalkan dalam membangun rumah tangga yang sejahtera. Sebagaimana dikemukakan oleh Hidayat (1978), pekerja di sektor informal bercirikan kegiatan usahanya tidak terorganisir dengan baik, tidak punya ijin usaha, teknologi bersifat primitif, serta modalnya kecil. Dengan demikian, dapat diindikasikan bahwa kepala rumah tangga yang bekerja di sektor informal akan cenderung menjadikan rumah tangga tersebut berada pada kondisi keterbatasan ekonomi. Apabila orang tua berada pada kondisi ekonomi yang terbatas akan berimbas kepada anak yaitu akan berkurangnya perhatian terhadap kebutuhan anak bahkan pada kondisi ekstrim. Dengan keadaan ini akan memaksa anak untuk bekerja membantu orang tua dan kehilangan masa kanak-kanak mereka (Usman, 2002).

#### **d. Pengaruh Status Pekerjaan Ibu**

Bekerja dalam penelitian ini memakai konsep bekerja menurut BPS. Bekerja merupakan melakukan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Seorang ibu dalam rumah tangga yang turut serta bekerja biasanya bertujuan untuk membantu menambah penghasilan rumah tangga dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah tangga itu sendiri. Dari hasil pengolahan Susenas 2013, ibu dari anak Balita di Sumatera Barat sebanyak 53,2 persen bekerja. Berdasarkan hasil regresi logistik, peluang anak Balita yang ibunya tidak bekerja menjadi miskin absolut 1,222 kali dibandingkan dengan anak Balita yang ibunya tidak bekerja.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Dong (2015) pada rumah tangga di Indonesia, dimana ia meneliti keterkaitan antara *bargaining power* (daya tawar) wanita yang bekerja dalam pengambilan keputusan di rumah tangga. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa ada hubungan positif antara jam kerja pada seorang wanita dan daya tawarnya dalam pengambilan

keputusan di rumah tangga. Wanita yang bekerja memiliki peranan dan memiliki daya tawar dalam pengambilan keputusan seperti dalam hal pendidikan dan kesehatan anak. Jadi seorang ibu yang bekerja selain akan menambah penghasilan rumah tangga juga akan meningkatkan peranannya dalam pengambilan keputusan di rumah tangganya.

#### **e. Pengaruh Tempat Tinggal**

Keberadaan suatu rumah tangga berdasarkan tempat tinggal juga turut mempengaruhi faktor sosial ekonomi rumah tangga. Hal ini sebagaimana telah dikemukakan oleh Teori Ekologis Bronfenbrenner bahwa setiap periode perkembangan manusia berhubungan dengan berbagai faktor yang mendukung perkembangannya seperti lingkungan tempat tinggalnya. Dari hasil regresi logistik didapat nilai *odds ratio* 0,809. Ini artinya anak Balita yang tinggal di daerah pedesaan berisiko  $1/0,809=1,236$  kali menderita miskin absolut dibandingkan dengan anak Balita yang tinggal di daerah perkotaan. Hal ini juga sejalan dengan temuan Puspongoro (2013), probabilitas kemiskinan anak Balita pada rumah tangga dengan rata-rata pengeluaran yang terletak pada kuantil pertama tahun 2008-2010 dipengaruhi oleh wilayah tempat tinggal.

Hal ini mengindikasikan masih terjadinya ketimpangan pembangunan fasilitas yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar anak Balita di Sumatera Barat. Perbedaan ketersediaan fasilitas terutama dalam hal informasi, pendidikan dan kesehatan akan menjadikan ketimpangan intelektualitas antara anak-anak pedesaan dengan perkotaan pada perkembangannya di masa mendatang.

#### **f. Pengaruh Jumlah Anak**

Banyaknya jumlah Balita dalam rumah tangga bisa menjadi cerminan tingkat keberhasilan program keluarga berencana dalam hal pengaturan jarak kelahiran. Semakin banyaknya Balita yang tinggal akan menambah semakin beratnya beban rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar anak Balita. Hasil regresi logistik menunjukkan nilai *odds ratio* sebesar 0,701. Maka probabilitas anak Balita yang tinggal pada rumah tangga yang memiliki Balita lebih dari 1 (satu)  $1/0,701=1,427$  kali menjadi miskin absolut dibandingkan dengan anak Balita yang tinggal pada rumah tangga yang hanya memiliki satu anak Balita. Tingginya peluang yang terjadi pada rumah tangga yang memiliki Balita lebih dari satu anak menggambarkan bahwa pengaturan jarak kelahiran menjadi salah satu faktor yang dominan dalam terjadinya kemiskinan absolut pada anak.

**KESIMPULAN**

Anak Balita di Sumatera Barat sebesar 74,1 persen menderita kemiskinan absolut (terpapar pada dua dimensi atau lebih pada kebutuhan dasar). 25,9 persen yang tidak miskin secara absolut. Sebanyak 9,7 persen anak Balita terdeprivasi empat dimensi atau tidak terpenuhi satupun dari keempat kebutuhan dasarnya. Hanya 2,5 persen yang benar-benar terbebas dari deprivasi empat dimensi atau yang terpenuhi semua kebutuhan dasarnya. Dilihat dari masing-masing indikator kebutuhan dasar pada anak Balita, tingkat pencapaian tertinggi adalah kepemilikan akte kelahiran diikuti oleh tingkat pemenuhan ASI eksklusif dan imunisasi dasar lengkap. Sedangkan capaian terendah adalah partisipasi pendidikan pra sekolah (PAUD).

Menurut klasifikasi wilayah tempat tinggal, tingkat pemenuhan kebutuhan dasar pada Balita yang tinggal di wilayah perkotaan lebih tinggi dari pada yang tinggal di wilayah pedesaan kecuali untuk indikator imunisasi dasar lengkap. Dari hasil regresi logistik, faktor yang signifikan menyebabkan anak berpeluang berada pada kondisi kemiskinan absolut adalah pendidikan kepala rumah tangga, pendidikan ibu, status pekerjaan kepala rumah tangga, kegiatan utama ibu, wilayah tempat tinggal, dan jumlah Balita dalam rumah tangga.

Berkaitan hasil temuan, pengaruh pendidikan pada kepala rumah tangga maupun pada ibu signifikan terhadap kemiskinan anak pada Balita, maka hal ini hendaknya menjadi perhatian yang lebih serius bagi pemerintah. Pengentasan kemiskinan anak Balita dapat dimulai dengan adanya perbaikan tingkat pendidikan masyarakat terutama difokuskan pada generasi mendatang. Pendidikan dasar merupakan hak setiap warga negara. Pemerintah perlu menggalakkan lagi program wajib belajar sembilan tahun khususnya di Sumatera Barat sampai tuntas. Selain itu bagi yang sudah putus sekolah karena ketidakmauan mereka, diperlukan pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan agar mereka mandiri dan menjadi produktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepala rumah tangga yang bekerja di sektor informal cenderung untuk memiliki anak yang miskin absolut. Untuk itu diperlukan peran pemerintah dalam membina pekerja di sektor informal. Perlu adanya pembinaan mengenai keahlian (*skill*), keterampilan dan dalam hal pemasaran. Selain itu juga pemerintah perlu membangun kemitraan dengan perbankan melalui paket UKM dan kredit lunak. Dengan demikian diharapkan sektor informal bisa maju dan bersaing sehingga bisa menjadi motor penggerak perekonomian khususnya di Sumatera Barat.

Selanjutnya seorang ibu yang bekerja cenderung anaknya tidak mengalami kemiskinan absolut dibanding ibu yang tidak bekerja. Untuk itu perlu kebijakan pengadaan lapangan kerja bagi perempuan, namun jam kerja dan pengupahannya harus memihak pada perempuan. Untuk itu perlu adanya pemberdayaan ekonomi kreatif dan responsif bagi ibu rumah tangga. Hal ini sejalan dengan penelitian Dong (2015) bahwa jumlah jam kerja pada seorang ibu dalam rumah tangga berhubungan positif dengan posisi tawarnya dalam pengambilan keputusan di rumah tangganya. Pengambilan keputusan ini termasuk dalam menentukan pendidikan dan kesehatan bagi anak.

Hasil temuan dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa anak Balita yang tinggal di wilayah pedesaan cenderung miskin absolut dibanding anak Balita yang tinggal di wilayah perkotaan. Untuk mengatasi hal ini kesenjangan antar desa dan kota harus dikurangi dengan cara mempercepat pembangunan pedesaan, terutama dalam penyediaan fasilitas kesehatan seperti pos kesehatan desa, pembangunan fasilitas sekolah dasar, dan pembangunan fasilitas pendidikan pra sekolah (PAUD) yang terjangkau bagi semua kalangan.

Banyaknya Balita berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan absolut pada anak Balita. Untuk itu, rekomendasi yang disarankan untuk hal ini yaitu lebih menggiatkan lagi program Keluarga Berencana dengan memberi layanan pada masyarakat berupa penyuluhan tentang pengaturan jarak antar kelahiran, dan pemberian alat kontrasepsi gratis. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah mengedukasi masyarakat melalui program wawasan GENRE (generasi berencana). Dengan demikian diharapkan akan terbentuk keluarga kecil yang sejahtera.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Alkire, S., dan J.E. Foster . 2011. "Counting and multidimensional poverty measures". *Journal of Public Economics* 95 pp 476-487.
- Badan Pusat Statistik. 2009. *Data dan Informasi Kemiskinan 2008*. Jakarta: BPS.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Survei Sosial Ekonomi Nasional 2013 Pedoman Pencacah*. Jakarta: BPS.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Kajian Anak Pada Rumah Tangga Miskin*. Jakarta: BPS
- Bappenas. 2004. *Rencana Strategik Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Bappenas.BPS
- Provinsi Sumatera Barat. (2013). *Raw Data Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2013*. Padang: BPS Provinsi Sumatera Barat

- Dong, X. S. 2015. Do Working Women Have More Intra-Household Bargaining Power? - A Natural Experiment Approach Using Direct Measures of Intra-Household Bargaining Power. Australian National University. <https://sites.google.com/site/sarahxuedong/>. Diakses dari pada Tanggal 19 Agustus 2015, dari [www.google.com](http://www.google.com): [https://drive.google.com/file/d/0Bw\\_JJMG8xZwzSVRiM0ljS1ZKR1k/view](https://drive.google.com/file/d/0Bw_JJMG8xZwzSVRiM0ljS1ZKR1k/view)
- Hidayat. 1978. Peranan Sektor Informal dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Keuangan Indonesia (EKI)* Vol. XXVI, No.4, Desember 1978.
- Kumala, Armelia Zukma, Haerani Natali Agustini, dan Rais. 2013. Dinamika Kemiskinan Pengukuran Kerentanan Kemiskinan Dalam Upaya Melindungi Anak-anak Dari Dampak Kemiskinan. *Child Poverty and Social Protection Conference*. Jakarta: UNICEF, BAPPENAS, Lembaga Penelitian SMERU.
- Nichols, Austin. 2008. *Understanding Recent Changes in Child Poverty*, New Federalism- Urban Institute.
- Prasetyo, H. 2010. *Determinan Deprivation dan Kemiskinan Anak di Indonesia*, Tesis. Depok : Program Pasca Sarjana Kependudukan dan Sumber Daya Manusia Universitas Indonesia.
- Puspongoro, Novi Hidayat. 2013. Kemiskinan Anak Usia Kurang Dari Lima Tahun Pada Rumah Tangga Dengan Rata-rata Pengeluaran Yang Terletak Pada Kuantil Pertama Tahun 2008-2009 Di Indonesia. *Child Poverty and Social Protection Conference*. Jakarta: UNICEF, BAPPENAS, Lembaga Penelitian SMERU.
- Roelen, Keetie & Gassmann, Franziska. 2008. 'Measuring Child Poverty & Well-Being: a literature review', Munich : Munich Personal RePec Archive., [http://mpra.ub.uni-muenchen.de/8981/1/MPRA\\_paper\\_8981.pdf](http://mpra.ub.uni-muenchen.de/8981/1/MPRA_paper_8981.pdf).
- Roelen, Keetie, Franziska Gassmann, Chris de Neubourg 2009. *Child Poverty In Vietnam Providing Insights Using A Countryspecific & Multidimensional Model. Working paper MGSOG/2009/WP001*. Maastricht : Maastricht Graduate School of Governance, Maastricht University.
- Saputra, Muda. 2003. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Otonomi Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Dalam Rumah tangga*. Tesis. Depok : Program Pasca Sarjana Kependudukan dan Sumber Daya Manusia Universitas Indonesia.
- Sen, Amartya. 1996. *Development as Freedom*. Oxford : Oxford University Press, 1999.
- Sirovátka, Tomáš, Ond ej Hora. 2002, *Income poverty & material deprivation in the Czech Republic with focus on children*, Bratislava : Paper for the International Workshop Impact of Poverty & Social Exclusion on Children's Lives & Their Well-being.
- United Nations Children's Fund (UNICEF). 2012. *MDG, Keadilan dan Anak-anak: Jalan ke depan bagi Indonesia*. UNICEF Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Children Living In Poverty: Overview of Definition, Measurements and Policy*. Division of Policy and Planning. New York, USA: UNICEF.
- \_\_\_\_\_ dan SMERU. 2013. *Urgensi Penanggulangan Kemiskinan Multidimensi Pada Anak Di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.
- Usman, Hardius. 2002. *Determinan dan Eksploitasi Pekerja Anak di Indonesia (Analsis Data Susenas 2000 KOR)*. Program Pasca Sarjana Kependudukan dan Sumber Daya Manusia Universitas Indonesia.

**MEMUDARNYA NILAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT  
DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

**(WANING VALUE OF LOCAL WISDOM IN  
THE MANAGEMENT OF WATER RESOURCES)**

**Deny Hidayati**

Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
Korespondensi penulis: [gatsu.lt10@yahoo.com](mailto:gatsu.lt10@yahoo.com)

**Abstract**

*Water is vital for human and thus it has to be made available for our life. Many communities in Indonesia, with their local knowledge, customs, and culture that are passed from generations, utilize water resources in their areas to meet daily needs. They manage the resources and live in harmony with the surrounding nature. The wisdom of community on water resource management, unfortunately, has experienced a shift. Water has then become an important issue that requires significant attention. This paper discusses shift in the value of local wisdom on water resources. Data and information in this paper is based on desk reviews from research/assessment results, books, documents and the author's field experiences in implementing relevant researches. The discussion focuses on the waning of local knowledge and wisdom as social capital in the provision of community water supply and as a form of their protection against water resources, such as the erosion of togetherness and mutual cooperation among members of the community, change in the value of water from social good to commercialization, the waning of local and traditional institutions, and the community's sense of belonging to their common property resources. This paper also analyze the shift of local wisdom's role in maintaining balance and harmony between the communities and their surrounding environment, and challenges to the existence of local wisdom associated with population pressures, modernization and development activities with less attention to the preservation of water resources and environment.*

**Keywords:** *Local wisdom, Community, Water Resource Management, Population Pressure, Economic and Development Activities*

**Abstrak**

Air merupakan kebutuhan vital manusia dan karena itu harus tersedia agar dapat bertahan hidup. Sebagian masyarakat Indonesia, dengan pengetahuan lokal, kebiasaan dan budaya yang telah diwariskan secara turun temurun, memanfaatkan sumber air di daerahnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan mereka hidup harmonis dengan alam dan lingkungan di sekitarnya. Kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, sayangnya, telah memudar. Tulisan ini mendiskusikan pergeseran kearifan lokal sebagai modal sosial dalam pemenuhan kebutuhan air dan sebagai bentuk perlindungan masyarakat terhadap sumber daya air. Data dan informasi dalam tulisan ini merupakan hasil *desk reviews* dari berbagai laporan penelitian/kajian, buku dan dokumen serta pengalaman penulis ketika melakukan penelitian-penelitian yang relevan. Diskusi terfokus pada memudarnya nilai kearifan lokal masyarakat, seperti nilai kebersamaan dan gotong royong, bergesernya nilai air dari dimensi sosial ke arah komersialisasi ekonomi, luntarnya pranata lokal dan lembaga pengelolaan air tradisional, serta tergerusnya 'rasa' kepemilikan bersama terhadap sumber daya air di sekelilingnya. Tulisan ini juga mendiskusikan pergeseran fungsi kearifan lokal dalam 'menjaga' hubungan yang harmonis antara masyarakat dan alam, serta tantangan terhadap eksistensi kearifan lokal terutama yang terkait dengan tekanan penduduk, modernisasi dan kegiatan pembangunan yang kurang memperhatikan preservasi sumber daya air dan lingkungan.

**Kata Kunci:** Kearifan Lokal, Masyarakat, Pengelolaan Sumber Daya Air, Tekanan Penduduk, Kegiatan Ekonomi dan Pembangunan

## PENDAHULUAN

Air merupakan kebutuhan vital dalam kehidupan manusia dan mutlak harus tersedia untuk menunjang hidup dan kehidupannya. Masyarakat dengan pengetahuan, kebiasaan, dan budaya yang diwariskan secara turun menurun memanfaatkan sumber air di wilayahnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka mengelola sumber daya tersebut secara bersama-sama dan hidup harmonis dengan alam di sekitarnya.

Subak adalah salah satu contoh kearifan masyarakat dari Bali yang mengatur pergiliran dan pembagian air serta peraturan pola tanam. Pengaturan pemanfaatan air ini merupakan hasil musyawarah masyarakat yang didasarkan pada falsafah *Tri Hita Karana*. Falsafah masyarakat Bali ini menekankan pada asas keharmonisan, keseimbangan, dan keserasian hubungan antar sesama anggota masyarakat, masyarakat dengan lingkungan, serta masyarakat dengan Tuhan. Dalam kondisi air yang terbatas, pengaturan sangat diperlukan agar semua anggota masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan air sesuai dengan cara dan tempat yang disepakati bersama. Salah satu cara pengaturan air adalah *masa gadon* dimana wilayah subak dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok *masa* yang mendapat giliran air pada musim hujan dan kelompok *gadon* yang mendapat giliran air pada musim kemarau. Sedangkan pola tanam, jenis tanaman, dan jadwal kapan menanam ditentukan dan disepakati oleh pengurus dan anggota subak. (Aprianto dkk, 2008; Ardana, 2005; dan Sutawan, 2003).

Kearifan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia sayangnya banyak yang telah mengalami pergeseran. Kebutuhan akan air terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk (dengan berbagai jenis kebutuhannya) dan kegiatan pembangunan yang kurang memperhatikan kelestarian sumber daya air dan lingkungan. Air saat ini telah menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian serius dikarenakan penurunan kapasitas dan kualitas sumber daya air di sebagian besar wilayah negeri ini.

Tulisan ini mendiskusikan pergeseran nilai kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Pembahasan difokuskan pada mudarnya kearifan lokal sebagai modal sosial dalam pemenuhan kebutuhan air masyarakat, dan sebagai bentuk perlindungan masyarakat terhadap sumber daya air. Peran kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan masyarakat dengan alam di sekitarnya menghadapi banyak tantangan. Kondisi ini berpengaruh

terhadap eksistensi tatanan sosial masyarakat, utamanya dalam upaya pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan.

Data dan informasi yang digunakan dalam tulisan ini berasal dari dua sumber. Sumber pertama adalah dari hasil *desk reviews* berbagai hasil studi yang telah dikemas dalam artikel, laporan, dan buku serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan topik yang dibahas, yaitu kearifan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Sumber kedua adalah pengalaman lapangan penulis ketika melakukan riset yang relevan, seperti kontribusi masyarakat: pengelolaan irigasi di Lahat, antara peningkatan degradasi versus kearifan lokal dalam pengelolaan DAS di Jambi, adaptasi orang Jawa di daerah Pasang Surut dan Dataran Tinggi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, adaptasi petani terhadap perubahan iklim dan degradasi sumber daya alam di Kota Batu dan Kabupaten Demak.

### Pengertian dan Makna Kearifan Lokal

Kearifan lokal adalah tatanan sosial budaya dalam bentuk pengetahuan, norma, peraturan dan keterampilan masyarakat di suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan (hidup) bersama yang diwariskan secara turun temurun. Kearifan lokal merupakan modal sosial yang dikembangkan masyarakat untuk menciptakan keteraturan dan keseimbangan antara kehidupan sosial budaya masyarakat dengan kelestarian sumber daya alam di sekitarnya.

Definisi kearifan lokal bervariasi menurut referensi dan cakupannya, namun dari definisi-definisi tersebut terdapat beberapa kata kunci, yaitu: pengetahuan, gagasan, nilai, keterampilan, pengalaman, tingkah laku, dan kebiasaan adat yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah tertentu (Keraf, 2002; Ardana, 2005; Aprianto dkk, 2008; Wahyu *dalam* Mukti, 2010; Yamani, 2011). Pengetahuan dan pengalaman masyarakat, menurut Sunaryo (2003), menyatu dengan sistem norma, kepercayaan, kebersamaan, keadilan yang diekspresikan sebagai tradisi masyarakat sebagai hasil abstraksi dan interaksinya dengan alam dan lingkungan di sekitarnya dalam kurun waktu yang lama. Kearifan lokal, karena itu menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat (Wardana, 2005).

Kearifan lokal sebagai modal sosial sangat penting dalam pengelolaan sumber daya air di suatu wilayah. Kearifan lokal mempunyai dua peran utama, yaitu: memenuhi kebutuhan air untuk hidup dan kehidupan masyarakat, dan menjaga hubungan yang harmonis

antara masyarakat dengan sumber daya air dan lingkungan di sekitarnya.

Kearifan lokal mencakup lima dimensi sosial, yaitu pengetahuan lokal, budaya lokal, keterampilan lokal, sumber-sumber lokal, dan proses sosial lokal (Aprianto dkk, 2008). Kelima dimensi ini mereka gambarkan dalam pengelolaan air DAS Citanduy dan Subak Bali sebagai berikut.

- Pengetahuan lokal tentang pembuatan aliran air dari bambu dan penanaman pohon dadap dan kiara oleh masyarakat Desa Bingkeng DAS Citanduy, dan pembuatan bangunan penangkap air sungai yang diletakkan pada bagian ujung sungai oleh petani Subak di Bali.
- Budaya lokal berupa larangan (tabu dan pamali) oleh masyarakat di DAS Citanduy, dan konsep Tri Hita Karana oleh masyarakat (Subak) di Bali.
- Keterampilan lokal berupa pembuatan aliran air di DAS Cintanguy, dan pembuatan bangunan penangkap air/empelan yang dapat disesuaikan bila diperlukan di Subak Bali.
- Sumber lokal dengan pemanfaatan potensi lokal, seperti pohon dadap di DAS Citanduy, dan terowongan irigasi dibuat melengkung mengandalkan kekuatan batuan asli di Subak.
- Proses sosial lokal berupa keramatisasi pengelolaan sumber daya air di DAS Citanduy, dan upacara ritual sebelum pekerjaan di sawah dimulai di Subak Bali.

Masyarakat memenuhi kebutuhan airnya dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya air yang ada di wilayahnya, sesuai dengan kearifan lokal yang dipraktikkan secara turun temurun. Bentuk atau jenis kearifan lokal bervariasi menurut kelompok masyarakat dan wilayah, namun sebagai modal sosial, kearifan lokal memiliki nilai universal yang sama, yaitu gotong royong dan tolong menolong untuk mendapatkan air dan menjaga kelestarian sumber dayanya.

Eksistensi kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia, sayangnya, telah mengalami penurunan. Kondisi ini digambarkan dari banyaknya nilai-nilai kearifan lokal yang sudah tidak dipraktikkan lagi, dan di banyak tempat, keberadaan kearifan lokal sudah 'diabaikan' dan tinggal menjadi cerita masyarakat. Di beberapa tempat lainnya, kearifan lokal bahkan telah hilang. Masyarakat, terutama generasi muda sudah tidak mengetahui lagi adanya kearifan lokal di daerahnya, hanya ada satu atau dua 'sesepuh' anggota masyarakat yang mengetahui namun karena faktor usia (sudah tua) dan kesehatan, beliau sudah

tidak dapat menjelaskannya dengan lengkap dan baik. (penjelasan dengan contoh-contoh yang lebih detail dapat dibaca pada bagian selanjutnya).

Pergeseran nilai sosial kearifan lokal digambarkan dari mudarnya tatanan yang disepakati masyarakat dan dipraktikkan oleh anggota masyarakat secara bersama-sama. Bentuk pergeseran bervariasi menurut kelompok masyarakat dan daerah, seperti keberadaan sumber air, waktu pengambilan air, kalender yang mengatur ketersediaan air dan kecepatan/arahan angin sesuai musim (hujan/kemarau) dengan kegiatan pertanian dan kenelayanan (contoh-contoh lihat penjelasan selanjutnya).

### **Memudarnya Nilai Kebersamaan dan Gotong Royong**

Nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal sarat dengan makna kebersamaan dan mempunyai fungsi sosial dan ekologi yang tinggi dalam pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Tetapi, fungsi sosial ekologi ini telah bergeser ke arah fungsi ekonomi. Hal ini diindikasikan oleh mudarnya kebersamaan dalam mengelola air, mudarnya kebiasaan gotong royong dan sebaliknya tumbuh kembangnya nilai ekonomi dari air.

Padahal, gotong royong dan tolong menolong merupakan kebiasaan budaya masyarakat Indonesia (Baiquni, 2009; dan Ikaputra, 2009). Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan masyarakat secara bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan bersama (publik) yang sifatnya sukarela. Sedangkan tolong menolong biasanya dilakukan antar anggota masyarakat untuk keperluan perseorangan (individual) yang dilaksanakan untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti pembangunan saluran air ke rumah dan pembangunan rumah.

Mudarnya kebersamaan dan kegiatan gotong royong dialami masyarakat di sebagian besar masyarakat Indonesia. Di Kalimantan Tengah, misalnya, masyarakat dulunya membuat dan memelihara *handil* (berupa parit atau sungai kecil di daerah pasang surut) secara bersama-sama, namun kegiatan ini telah mudar. Padahal kearifan masyarakat ini sangat diperlukan, karena *handil* mempunyai multi fungsi, seperti: saluran untuk mengairi sawah, jalur transportasi air masyarakat dari permukiman ke sawah atau ladang/kebun dan ke hutan untuk mengambil hasil hutan yang dibutuhkan masyarakat untuk kehidupan sehari-hari, dan tempat MCK (mandi, cuci dan kakus). (Octora dkk, 2010).

Dengan memudarnya nilai kebersamaan dan kegiatan gotong royong, maka kegiatan masyarakat untuk kepentingan bersama, seringkali dilakukan dengan kompensasi, umumnya dalam bentuk 'uang'. Anggota masyarakat yang terlibat dengan demikian menjadi 'pekerja' dalam kegiatan tersebut. Solidaritas sosial masyarakat semakin berkurang dengan dibagikannya bantuan-bantuan, baik dalam bentuk tunai maupun barang, yang dilakukan oleh pemerintah maupun pada donor. Pembagian dan pemberian kompensasi atau peng'upah'an kegiatan untuk kepentingan masyarakat ini tidak hanya melunturkan tatanan sosial yang ada, tetapi juga berpotensi menimbulkan perselisihan antar anggota masyarakat.

### **Bergesernya Nilai Air dari Dimensi Sosial ke Dimensi Ekonomi**

Memudarnya kearifan lokal masyarakat berkaitan erat dengan bergesernya orientasi masyarakat terhadap nilai air dan sumber daya alam, yaitu dari dimensi sosial ke dimensi ekonomi. Air yang semula dimanfaatkan secara 'gratis' tanpa adanya kompensasi, ternyata mempunyai nilai ekonomi dan nilai ini semakin tinggi dari waktu ke waktu. Komersialisasi terhadap air tumbuh dan berkembang seiring dengan semakin banyaknya volume air yang dibutuhkan masyarakat dan bervariasi jenis kebutuhan terhadap sumber daya tersebut. Kondisi ini terutama terjadi karena sumber daya air semakin terbatas dan sebaliknya kebutuhan akan air semakin tinggi. Selain itu, nilainya akan semakin tinggi dengan meningkatnya kegiatan pembangunan dan investasi di kawasan sumber air tersebut.

Akibatnya, masyarakat yang dulunya mendapatkan air secara gratis sekarang 'harus' mengeluarkan 'uang'. Mereka mengeluarkan uang 'membeli' air untuk konsumsi (minum dan masak) serta keperluan lainnya. Meskipun akses terhadap air relatif mudah dan ketersediaan air juga berlimpah, dengan memudarnya kebersamaan dan gotong royong dalam penyediaan air, dan menurunnya kualitas air, maka masyarakat harus berupaya untuk menyediakan air sendiri-sendiri atau menggunakan jasa perorangan atau perusahaan, seperti jasa pedagang air keliling dan air galon, Perusahaan Air Minum (PAM) atau Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Masuknya proyek Penampungan Air Hujan (PAH) dan proyek pipa air minum PDAM di Telaga Omang dan Ngeloro di Yogyakarta, misalnya, menyebabkan runtuhnya larangan pengambilan air telaga pada malam hari, karena kebutuhan air masyarakat sekarang dipasok melalui PDAM.

### **Lunturnya Pranata Lokal dan Tergerusnya Lembaga Pengelola Air Tradisional**

Menurunnya penggunaan *pronoto mongso* (merupakan tatanan yang mengatur kegiatan pertanian masyarakat Jawa) merupakan contoh lunturnya aturan lokal. *Pronoto mongso* merupakan sistem kalender musim yang digunakan petani dalam mengatur usaha taninya. Musim atau *mongso*, yang selama ini diyakini merefleksikan ketersediaan air dan waktunya dapat diperhitungkan oleh petani, telah digantikan oleh kemajuan teknologi melalui sistem irigasi teknis yang dapat berfungsi sepanjang tahun. Penggunaan teknologi sayangnya berimplikasi pada biaya yang harus ditanggung oleh petani sebagai kompensasi ketersediaan air di lahan pertaniannya.

Memudarnya nilai kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air juga berkaitan dengan lunturnya kelembagaan tradisional yang digantikan oleh kelembagaan resmi yang umumnya dikembangkan oleh pemerintah, seperti Persatuan Petani Pemakai air (P3A). Perubahan ini menyebabkan berubahnya pengelolaan air dari semula berbasis 'nilai dan tradisi' dalam masyarakat yang dipadukan dengan keselarasan hidup dengan alam di sekitarnya, menjadi pengelolaan yang berbasis 'hubungan struktural' yang merupakan hubungan relasi kekuasaan, misalnya pemerintah dari instansi yang terkait, pengurus dan anggota P3A serta masyarakat lainnya.

Lunturnya kelembagaan *handil* (merupakan kelembagaan masyarakat yang mengurus saluran air) di daerah pasang surut berkairan erat dengan dibangunnya saluran tersier di lokasi pasang surut oleh pemerintah. Kondisi ini bertolak belakang dengan tujuan pemerintah untuk lebih mengoptimalkan peran *handil* dengan dibangunnya saluran dan sistem irigasinya (teknis atau setengah teknis). Kawasan pengairan dengan sistem irigasi dengan demikian akan lebih luas dan air akan terdistribusi dengan lebih baik. Pembangunan saluran air pada kenyataannya merubah pengelolaan air di wilayah pasang surut tersebut, dari kelembagaan masyarakat yang diketuai oleh kepala *handil* menjadi kelembagaan yang dibentuk secara resmi oleh pemerintah seperti P3A. Meskipun pengurus P3A adalah wakil dari masyarakat, perubahan sistem dalam pengelolaan *handil* juga berimplikasi pada bentuk dan cara dalam pengelolaan yang sifatnya lebih resmi dengan aturan tugas dan kewajiban yang resmi dan *rigid* juga.

### Memudarnya Rasa Kepemilikan terhadap Sumber Daya Milik Komunal

Sumber daya air, di daerah-daerah yang kearifan lokalnya masih berjalan, merupakan hak milik komunal setiap anggota masyarakat hukum adat atau dikenal dengan *common property resources*. Konsep *common property resources* adalah konsep universal mengingat air dibutuhkan oleh semua orang dan sumber daya air merupakan bagian dari wilayah (hutan) yang dimiliki secara bersama dengan segala kewajiban yang melekat pada semua anggota masyarakat. Rasa ‘memiliki’ masyarakat terhadap sumber daya ini sangat tinggi dan karena itu mereka bertanggung jawab untuk menjaga dan melindunginya dari gangguan atau eksploitasi pihak luar.

*Common property resources* mengalami pergeseran dari pengelolaan oleh masyarakat beralih kepada pemerintah atau *stakeholders* lain. Pengalihan hak pengaturan hutan dari komunitas adat kepada pemerintah merupakan satu alasan penting memudarnya rasa memiliki atau *sense of belonging* masyarakat. Kondisi ini berimplikasi pada berkurangnya rasa tanggung jawab yang terpatrit dalam kearifan lokal masyarakat.

Yamani (2011) mengemukakan memudarnya kearifan lokal masyarakat adat di Bengkulu disebabkan oleh perubahan sistem pemerintah dari *Marga* menjadi Desa sebagai implikasi dari berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Perubahan sistem pemerintahan ini berpengaruh signifikan terhadap tatanan pengaturan kehidupan masyarakat dan berdampak pada lunturnya hukum lokal komunitas adat di Bengkulu. Masyarakat yang semula taat pada peraturan adat dan berpartisipasi aktif dalam memelihara hutan, termasuk sumber daya air, sekarang sudah mengabaikannya. Mereka mengeksploitasi sumber daya hutan dan air sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing tanpa mempertimbangkan kelestarian sumber daya tersebut.

### MEMUDARNYA FUNGSI KEARIFAN LOKAL DALAM ‘MENJAGA’ HUBUNGAN YANG HARMONIS DENGAN ALAM

Kearifan lokal juga berfungsi sebagai tatanan masyarakat dalam menjaga hubungan yang harmonis dengan sumber daya air dan lingkungan di sekitarnya. Hubungan yang harmonis ini berdampak pada perlindungan fungsi sumber daya air dan keseimbangan lingkungan untuk mencapai pengelolaan secara berkelanjutan. Hubungan ini digambarkan dari beberapa sistem nilai dalam kearifan lokal, seperti

*pengkeramatan*, *pamali*, dan tabu yang mempunyai makna sebagai ‘peraturan’ dan ‘larangan’ bagi masyarakat untuk melakukan tindakan yang dapat mengganggu atau merusak suatu kawasan/wilayah tertentu.

Di beberapa desa di DAS Citanduy, seperti di Desa Bingkeng dan Desa Batulawang, terdapat beberapa tempat yang ‘dikeramatkan’ pada setiap dusunnya. Masyarakat di tempat-tempat keramat tersebut tidak boleh, ‘tabu’, atau ‘pamali’ melakukan kegiatan ekonomi atau aktifitas lainnya. Dengan demikian, sumber daya air dan ekosistem di tempat-tempat yang dikeramatkan ini ‘dijaga dan dilindungi’ oleh masyarakat atau secara implisit tempat-tempat tersebut menjadi daerah ‘konservasi’.

Sistem nilai pada kearifan lokal yang berfungsi sebagai ‘pelindung’ sumber daya air, seperti ‘pengkeramatan, tabu dan pamali’, sayangnya banyak yang telah ditinggalkan masyarakat. Peraturan dan larangan dalam sistem nilai tersebut mungkin di‘anggap’ sebagai pembatasan bagi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya air dan lingkungan di sekitarnya.

Tabu atau larangan dulunya juga dipraktikkan oleh komunitas adat suku Lembak Delapan di Bengkulu. Mereka menamakan tabu sebagai *tanjung kerapusan*, *suak uluh tulong*, *tinjau terkukuh*, *tanam tukung*, dan aturan adat *utan tiga ragi*. Tabu berlaku untuk pengelolaan hutan secara berkelanjutan, termasuk pengelolaan sumber daya air di kawasan hutan, seperti larangan menebang pohon di sekitar sumber atau mata air, membuka ladang di sekitar mata air dan di lereng atau cekungan yang rawan erosi dan longsor, serta penguasaan sumber air secara individual karena sumber air tersebut merupakan milik bersama masyarakat. Memudarnya kearifan lokal masyarakat adat di Bengkulu dalam melindungi sumber daya air berdampak pada upaya mereka melindungi hutan, karena sumber daya air merupakan bagian dari kawasan hutan. Padahal, masyarakat dulunya mempunyai kesepakatan untuk melindungi hutan dan memperhatikan larangan bagi setiap anggota masyarakat (Yamani, 2011).

Hasil studi Sulastriyono (2009) di Telaga Omang dan Ngeloro, Desa Planjan, Yogyakarta, juga menginformasikan lunturnya praktik kearifan lokal di daerah tersebut. Larangan menebang pohon sudah tidak diindahkan lagi oleh masyarakat setempat. Pohon-pohon besar di sekitar telaga telah ditebang tahun 2003 ketika pemerintah melakukan renovasi telaga tanpa memperhatikan kearifan lokal yang ada. Padahal pohon-pohon tersebut berfungsi sebagai penyerap air

dan air tanah juga mengalir ke telaga. Pohon-pohon besar di pinggir Telaga Ngeloro digantikan dengan tanggul yang terbuat dari beton/semen. Air tanah akibatnya tidak dapat meresap ke telaga dan bangunan tersebut bahkan menutup sebagian mata air. Akibatnya, telaga sekarang hanya berfungsi sebagai penampung air hujan pada musim hujan, karena mata airnya telah mati, tertutup semen tanggul. Padahal, menjamin peresapan air sebanyak-banyaknya kedalam tanah, menurut Soeprbowati (2010) merupakan upaya konkrit dari pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan.

Memudarnya kearifan lokal sangat disayangkan karena dalam pengelolaan air, kearifan lokal mengandung nilai pelestarian sumber daya. Masyarakat memahami bagaimana seharusnya mengatur keseimbangan dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber daya air melalui larangan.

Masyarakat di Telaga Omang, Ngeloro, Kecamatan Saptosari, Yogyakarta mengetahui banyak larangan untuk melindungi air telaga, namun larangan tersebut kebanyakan juga sudah diabaikan. Mereka dilarang untuk menebang pohon-pohon besar/tertentu (seperti beringin, asem, widoro, preh, elo dan gayam) di sekitar telaga yang menjadi sumber air. Mereka juga tidak diperbolehkan mengambil air di telaga pada malam hari (jam 19.00 – 24.00), memancing ikan sebelum panen (musim kemarau), dan menangkap binatang liar di sekitar telaga. Mereka juga dilarang membuang sampah di sekitar telaga (Sulastriyono, 2009).

Larangan-larangan yang disepakati dalam kearifan lokal sangat erat kaitannya dengan upaya menjaga telaga agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan terjaga kelestarian ekosistemnya. Namun informasi di atas mengemukakan bahwa banyak larangan yang sudah tidak dipatuhi lagi oleh masyarakat setempat dan/atau orang/pengusaha dari luar. Padahal, keberadaan pohon-pohon besar seperti beringin dan asem, misalnya, mempunyai peran penting dalam menyerap air dan melindungi sumber air di telaga. Mengambil air pada malam hari berkaitan dengan upaya menjaga ketersediaan air dan keselamatan dalam pengambilan air. Larangan memancing ikan sebelum waktu panen sangat penting untuk memberi kesempatan ikan di telaga untuk tumbuh dan berkembang agar dapat dimanfaatkan (produksi) secara berkelanjutan.

Sedangkan larangan pembuangan sampah sarat dengan makna menjaga telaga atau sungai dari pencemaran, yang menjadi salah satu masalah penting dalam pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Pentingnya budaya bersih dalam kearifan lokal di beberapa daerah sangat ditekankan. Larangan untuk

membuang sampah bagi masyarakat di Telaga Omang dan Ngeloro, Gunung Kidul, Yogyakarta dulu memang ditaati, tetapi sekarang sudah dilanggar, diindikasikan dari banyaknya sampah plastik di sekitar telaga (Sulastriyono, 2009).

Kearifan lokal dalam pengelolaan air juga berkaitan dengan pengaturan pembagian air dalam kegiatan pertanian, seperti *handil* di Kalimantan dan Subak di Bali. *Handil* berfungsi sebagai saluran irigasi dan drainase di lahan sawah di daerah pasang surut. Pengaturan *handil* sangat diperlukan mengikuti waktu pasang dan surutnya air laut. Sedangkan pengaturan air dalam kegiatan Subak di Bali mengacu pada ketersediaan air musim hujan dan musim kemarau (Octora dkk, 2010; Sutawan, 2003 dalam Aprianto dkk, 2008). Pengaturan air baik di *handil* maupun *subak* berorientasi pada proses alam, bagaimana mengatur pemanfaatan air sesuai atau harmoni dengan kondisi alam dan lingkungan di sekitarnya.

## TANTANGAN TERHADAP EKSISTENSI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT

Kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya air idealnya perlu terus dipraktikkan, namun tatanan sosial ini, seiring dengan perkembangan dan perjalanan waktu, menghadapi banyak tantangan, sehingga mempengaruhi eksistensinya. Kondisi ini disebabkan oleh banyak faktor, terutama yang berkaitan dengan tekanan penduduk terhadap sumber daya air dan alam di sekitarnya, kegiatan pembangunan, dan modernisasi. Pawitan (2011) dan Ryadi (2012) mengungkapkan bahwa sumber daya air di Indonesia telah mengalami degradasi, diindikasikan dari penggunaan air yang berlebihan, meningkatnya pencemaran air, serta ancaman kekeringan pada musim kemarau dan banjir pada musim hujan. Permasalahan semakin kompleks dengan terjadinya konflik kepentingan antar *stakeholders* terkait dengan sumber daya air di wilayah bagian hulu dan/atau hilir, degradasi sungai, dan danau serta erosi tanah.

### Tekanan Penduduk

Tekanan penduduk terhadap sumber daya air berkaitan erat dengan peningkatan jumlah dan mobilitas penduduk, dan perilaku mereka dalam pengelolaan sumber daya tersebut. Peningkatan jumlah dan mobilitas penduduk berkaitan dengan aspek kuantitas, berupa peningkatan kebutuhan air untuk konsumsi dasar (minum, makan, dan MCK) dan kehidupan lainnya. Peningkatan ini juga berkaitan dengan aspek kualitas, terutama perilaku masyarakat yang

menyebabkan degradasi sumber daya dan pencemaran air.

### **Peningkatan Jumlah Penduduk dan Keterbatasan Ketersediaan Air**

Indonesia mempunyai populasi penduduk yang sangat besar, menduduki posisi nomor empat di dunia, yaitu setelah China, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk meningkat dengan pesat dari 179,38 juta jiwa tahun 1990 menjadi 205,13 juta jiwa tahun 2000 dan 237,56 juta jiwa tahun 2010, meskipun tingkat pertumbuhan penduduknya cenderung mengalami penurunan dari 1,49 persen antara 1990-2000 turun jadi 1,2 antara 2000-2010 (BPS, 2013). Penduduk Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi 273,22 juta jiwa pada tahun 2025 (Bappenas, BPS dan United Nations Population Fund, 2013).

Tingginya perkembangan jumlah penduduk Indonesia berimplikasi pada besarnya peningkatan kebutuhan akan air, baik untuk konsumsi maupun kebutuhan lainnya. Air tidak hanya mempunyai fungsi sosial yang dapat dimanfaatkan semua orang, tetapi juga menjadi komoditas ekonomi yang diperlukan oleh rumah tangga, kegiatan pertanian, industri, infrastruktur, transportasi, dan jasa (Manik, 2009; dan Suparmoko, 2008).

Meskipun sebagian besar wilayah Indonesia adalah air, hampir semua kota di Indonesia memiliki masalah besar tentang ketersediaan air dan pemenuhan kebutuhan air bagi penduduknya. Penduduk merupakan pengguna air terbanyak. Menurut standar WHO, kebutuhan air bersih penduduk sebanyak 2.000 m<sup>3</sup> per orang per tahun. Sedangkan cadangan air di Indonesia, menurut Kementerian Riset dan Teknologi tahun 2007 sebesar 1.700 m<sup>3</sup> per orang. Data ini menggambarkan bahwa menurut standar kebutuhan Indonesia masih kekurangan air bersih.

Kondisi ini juga dijelaskan oleh Bappenas, sekitar 100 juta penduduk Indonesia tahun 2013 belum bisa menikmati air minum yang aman menurut standar kesehatan. Jumlah ini jauh lebih besar, hampir dua kali lipat, jika dibandingkan dengan tahun 2008 ketika UNICEF menginformasikan sebanyak 55 juta orang Indonesia tidak mempunyai akses terhadap air bersih. Sebagian besar penduduk Indonesia, sekitar 70 persen, mengkonsumsi air dari sumber-sumber yang tercemar (ADB, 2006). Informasi minimnya ketersediaan air bersih bagi penduduk negeri ini juga dikemukakan oleh Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas yang mengatakan hanya 55,4 persen penduduk Indonesia yang dapat mengakses air minum yang layak tahun

2011 dan hanya meningkat 1,6 persen (menjadi 57,0 persen) tahun 2012.

Gambaran memprihatinkan yang serupa juga terjadi pada sanitasi lingkungan. Menurut Bappenas, sekitar 100 juta penduduk Indonesia tidak memiliki akses terhadap sanitasi. Jumlah ini jauh lebih besar dari data UNICEF tahun 2008 ketika 69 juta tidak memiliki akses untuk sanitasi. Sedangkan menurut Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas penduduk Indonesia yang dapat mengakses sanitasi hanya 55,6 persen tahun 2011 dan meningkat sedikit menjadi 57,2 persen tahun 2012. Kondisi ini masih dibawah target MDGs tahun 2015, yaitu 68,8 persen untuk air minum dan 62,4 persen untuk sanitasi.

Selain itu, peningkatan jumlah penduduk juga berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan akan lahan untuk area permukiman, lahan pertanian, industri, serta sarana dan prasarana lain yang mendukung kehidupan. Besarnya alih fungsi lahan berkorelasi dengan besarnya eksploitasi air tanah yang berakibat pada penurunan kuantitas dan kualitas air tanah dan intrusi air laut.

### **Masih Terbatasnya Perilaku dan Budaya Bersih**

Perilaku masyarakat berkaitan dengan kebersihan dan sanitasi lingkungan juga berpengaruh terhadap ketersediaan dan kualitas air. Budaya bersih di sebagian masyarakat masih minim, digambarkan dari perilaku masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan. Selain itu, sebagian masyarakat juga masih membuang air besar (BAB) secara sembarangan, sekitar 41 juta orang setiap harinya (Kompas, 23 Juni 2013). Perilaku buang sampah dan BAB secara sembarangan ini menyebabkan pencemaran air. Pencemaran menjadi salah satu masalah penting dalam pengelolaan air secara berkelanjutan.

Kebiasaan membuang sampah sembarangan, selain menyebabkan pencemaran, juga seringkali menyumbat dan merusak jaringan atau saluran air yang mengakibatkan terjadinya banjir. Banyaknya sampah mengakibatkan rusaknya sejumlah saluran irigasi, terutama pada musim hujan, karena saluran air kapasitasnya tidak kuat menampung material sampah dan air. Sampah yang menumpuk di saluran air juga mengakibatkan tersendatnya aliran air dan karenanya sering menyebabkan banjir pada musim hujan dan sebaliknya kekeringan pada musim kemarau.

### **Kegiatan Pembangunan dan Modernisasi**

Kegiatan pembangunan dan modernisasi teknologi dan informasi menurut banyak referensi berpengaruh

signifikan terhadap eksistensi kearifan lokal (Keraf, 2002; Sulastriyono, 2009; Yamani, 2011). Percepatan laju pembangunan di segala sektor menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dalam pengelolaan sumber daya air. Pergeseran nilai terjadi semakin cepat karena pembangunan berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan kurang memperhatikan tatanan sosial dalam masyarakat dan fungsi ekologi dari kearifan lokal masyarakat.

Pembangunan yang mengandalkan eksploitasi sumber daya alam mempercepat laju degradasi sumber daya air. Penebangan hutan dan alih fungsi lahan yang dilakukan secara berlebihan dan sembarangan menyebabkan rusaknya sumber daya air. Kondisi ini mengakibatkan penurunan daya dukung sumber daya air dan lingkungan di sekitarnya, dan tingginya fluktuasi debit air pada musim hujan dan musim kemarau.

Eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan menyebabkan rusaknya daerah aliran sungai (DAS), baik di bagian hulu maupun hilir. Pohon-pohon pelindung sumber-sumber air terus ditebang sehingga mengganggu peresapan air ke dalam tanah dan berkurangnya debit air di sumber atau mata air. Kondisi ini juga menyebabkan terjadinya erosi tanah, sedimentasi, banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau. Konsekuensinya, kompetisi masyarakat dalam memanfaatkan air semakin tinggi, sehingga sangat potensial menimbulkan konflik antar *stakeholders* (Adnyana, 2003, Hidayati dkk, 2012).

Kerusakan hutan dan penyusutan vegetasi penutup tanah masih terus berlangsung. Menurut the World Resource Institute tahun 2015 Indonesia kehilangan tutupan hutan sekitar satu juta hektar pada 2013 dan hutan primer seluas 8.400 km<sup>2</sup> tahun 2012. Kondisi ini berimplikasi pada menurunnya pasokan air secara signifikan, baik untuk konsumsi maupun pengembangan sektor pertanian yang sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan.

Pemerintah atas nama pembangunan sering mengabaikan pengetahuan dan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya air yang telah dilakukannya secara turun temurun. Hal ini diindikasikan oleh upaya-upaya pemerintah, seperti dalam meningkatkan produksi padi melalui teknologi dan subsidi harga untuk pupuk dan pestisida/herbisida (Dick, 1982; Fox, 1991; Mears, 1984), dan mengontrol harga beras serta pembangunan infrastruktur, terutama sistem irigasi (Collier *et al*, 1982; Dick, 1982; Fox, 1991). Akibatnya, pengelolaan air mengalami perubahan dari oleh masyarakat menjadi oleh pemerintah dengan pendekatan *top-down*. Akibatnya, banyak sistem nilai

dalam pengelolaan sumber daya air dan tataguna air untuk pertanian yang telah dilakukan masyarakat secara turun temurun terancam oleh modernisasi pembangunan sistem irigasi dan kegiatan pembangunan lainnya.

Pengelolaan air, dengan pengembangan sistem irigasi, beralih dari masyarakat kepada pemerintah. Pada mulanya, masyarakat dengan kearifan lokal yang ada bergotong royong membuat saluran dan mengatur pergiliran air sesuai dengan kondisi dan kebutuhan petani, namun dalam sistem irigasi, pemerintah membangun saluran irigasi menggunakan teknologi dan mengatur pengelolaannya, misalnya melalui P3A. Perubahan sistem ini sangat mempengaruhi tatanan yang berkembang di masyarakat, yang semula berdimensi sosial budaya bergeser menjadi ekonomi berbasis teknologi.

Kemajuan teknologi di bidang pertanian telah menggeser pengetahuan lokal dan kepercayaan petani dalam mengatur waktu dan cara bercocok tanam mereka. Maraknya pembangunan irigasi teknis untuk meningkatkan frekuensi tanam dan produksi hasil pertanian telah menyebabkan tergerusnya pengetahuan lokal tentang ‘perbintangan’ yang digunakan sebagai pedoman untuk mengetahui musim dan curah hujan, misalnya pada *Pronoto Mongso* petani Jawa. Pedoman ini sangat penting untuk menentukan kegiatan petani, misalnya kapan mulai menyemai bibit dan menanam serta kapan waktu panen. Selain itu, maraknya penggunaan teknologi *input* pertanian dari bahan-bahan kimia, seperti pestisida, insektisida dan herbisida, juga berimplikasi pada menurunnya penggunaan pengetahuan dan kearifan lokal dalam menanggulangi hama dan penyakit tanaman dengan predator alam.

Kemajuan teknologi pertanian di satu sisi sangat diperlukan untuk peningkatan produksi, namun di sisi lain penerapan teknologi mempunyai dampak negatif terhadap petani, usaha tani, dan sumber daya lahan serta lingkungan di sekitarnya. Kemajuan teknologi, baik dalam bentuk peralatan, seperti traktor dan pompa air, maupun *input* atau sarana produksi (*saprodi*) pertanian (pupuk, pestisida/herbisida) dari bahan kimia bermanfaat untuk meningkatkan frekuensi tanam, namun hal ini menyebabkan peningkatan kebutuhan akan air dan limbah pertanian yang mengakibatkan meningkatnya pencemaran air. Selain itu, perubahan ini tidak prospektif karena menjadikan ketergantungan masyarakat petani kepada pemerintah dan *input* pertanian yang tidak ramah lingkungan.

Kegiatan pembangunan dan modernisasi teknologi memberikan harapan akan peningkatan kesejahteraan

bagi masyarakat, tetapi kalau tidak dilakukan secara bijak dan terencana akan memberikan hasil yang sebaliknya. Penerapan teknologi yang tidak ramah lingkungan akan mengancam keberlangsungan sumber daya alam dan mengikis tatanan sosial di masyarakat. Modernisasi dan globalisasi merupakan tantangan besar terhadap keberlangsungan kearifan lokal di Indonesia. Masuknya teknologi dan nilai-nilai baru menyebabkan perubahan perilaku dan budaya dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia, karena itu perlu dihadapi dan disikapi juga dengan arif.

Perilaku masyarakat yang tidak ramah terhadap lingkungan dan pengelolaan yang tidak tepat menjadi penyebab utama kerusakan sumber daya air dan mengancam keberlanjutan sumber daya tersebut. Permasalahan ini berkaitan erat dengan faktor ekonomi, terutama kemiskinan dan keserakahan, dan faktor non ekonomi, termasuk kurangnya pengetahuan dan informasi, dan kekurangpedulian masyarakat terhadap pentingnya pelestarian sumber daya alam tersebut. Sebagian anggota masyarakat memahami bahwa kegiatan mereka telah berdampak negatif terhadap kondisi air di sekitar lingkungannya, tetapi mereka tidak peduli terhadap dampak yang disebabkan oleh ulah mereka dan karena itu terus melakukan kegiatan yang merusak tersebut. Keserakahan juga menjadi alasan penting terjadinya perusakan sumber daya air, biasanya dilakukan oleh sekelompok kecil masyarakat yang punya modal atau pengusaha-pengusaha. Motif mereka berbeda dengan masyarakat desa yang miskin, yang pemilik modal/pengusaha-pengusaha inginkan adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan cara mudah. Hal ini terutama terjadi di daerah-daerah yang (akan) menjadi pusat-pusat pembangunan dan kegiatan ekonomi di seluruh negeri ini.

Masuknya perusahaan-perusahaan kelapa sawit merupakan contoh pembukaan tutupan hutan secara besar-besaran yang berimplikasi pada rusaknya sumber daya air di berbagai daerah di Indonesia, seperti di Provinsi Jambi. Perusahaan-perusahaan tersebut mengkonversi hutan menjadi lahan monokultur kebun kelapa sawit yang menyebabkan degradasi ekosistem dan sumber daya air di daerah pasang surut. Selain itu, keberadaan kebun-kebun sawit yang sangat luas juga mengakibatkan penurunan atau bahkan gagalnya produksi padi di sawah-sawah di sekitar perkebunan tersebut dikarenakan sumber-sumber air yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan padi sawah berkurang secara signifikan dan /atau air sangat asam karena tercampur atau terkontaminasi dengan pirit di lahan pasang surut. Pada musim hujan, meskipun air berlimpah, petani sawah tidak dapat memanfaatkan limpahan air dari saluran-saluran di sekitar kebun-

kebun sawit, karena airnya asam, sedangkan pada musim kemarau akan kekurangan air/kekeringan.

## **PENUTUP**

Masyarakat Indonesia dahulu hidup harmonis dengan alam dan sumber daya air di lingkungan sekitarnya. Kearifan lokal yang berkembang di masyarakat menjadi panduan bagi sikap dan tindakan mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kearifan tersebut, ternyata telah memudar. Tulisan ini menginformasikan banyak tradisi masyarakat yang telah diabaikan dan tradisi lainnya sudah tinggal menjadi kenangan. Hal ini sangat disayangkan, karena dalam pengelolaan air, kearifan lokal mengandung nilai pelestarian sumber daya tersebut. Sumber daya air saat ini berada dalam kondisi yang memprihatinkan karena adanya peningkatan secara signifikan pemanfaatan air, polusi air, dan kegiatan eksploitasi secara berlebihan yang menyebabkan degradasi sumber daya alam dan lingkungan di sekitarnya.

Memudarnya kearifan lokal berkaitan erat dengan menurunnya solidaritas dan kebersamaan dalam kegiatan gotong royong di masyarakat, rasa kepemilikan bersama masyarakat terhadap sumber daya alam di daerahnya, dan berkurangnya hubungan yang harmonis antara sesama anggota masyarakat, sumber daya air dan lingkungan di sekitarnya. Tekanan penduduk terhadap air dan sumber daya alam mempunyai kontribusi yang besar, terutama peningkatan jumlah penduduk secara signifikan dan perilaku mereka yang merusak sumber daya dan lingkungan di sekitarnya. Kegiatan pembangunan dan modernisasi melalui proses globalisasi juga dijadikan alasan sebagai penyebab utama kerusakan sumber daya air. Penggunaan teknologi dan nilai-nilai baru terhadap sumber daya air telah berdampak signifikan terhadap terjadinya pergeseran perilaku dan budaya dalam pengelolaan sumber daya air tersebut.

Pengelolaan sumber daya air karena itu sangat diperlukan, namun saat ini pengelolaan lebih terfokus pada fungsi ekonomi, sedangkan fungsi sosial dan ekologi telah mengalami degradasi. Hal ini diindikasikan oleh luntarnya praktik pengelolaan air berbasis kearifan lokal yang menekankan pada aspek fungsi sosial dan ekologi dalam pengelolaan air. Modernisasi dan globalisasi merupakan tantangan besar terhadap keberlangsungan kearifan lokal di Indonesia. Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan karena itu harus berakar dari hubungan yang harmonis dan berfungsinya sumber daya air dalam aspek ekonomi, sosial dan ekologi.

Tulisan ini meng*highlights* pentingnya eksistensi kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Kearifan lokal harus dilestarikan dalam suatu masyarakat guna menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya air dengan lingkungan dan sekaligus upaya pelestariannya. Tradisi masyarakat dalam mengelola air harus terus dipertahankan, menyeimbangkan dan menyelaraskan hubungan antara kehidupan sosial ekonomi dan preservasi sumber daya alam di lingkungan sekitarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprianto, Y., Pardede, I.A., dan Fernando, E.R. 2008. "Kearifan Lokal dalam Mewujudkan Sumber Daya Air Yang Berkelanjutan. Bogor: Institute Pertanian Bogor.
- Adnyana, I.G.N.S. 2003. 'Tantangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan'. Makalah disampaikan dalam Seminar *Peran Budaya Lokal dalam Menunjang Sumber Daya Air yang Berkelanjutan*. Kerjasama antara BAPPENAS dengan FAO-UN, Kuta Beach, Bali, 2 Oktober 2003.
- Ardhana, G. 2005. Kearifan Lokal Tanggulangi Masalah Sosial Menuju Ajeg Bali. <http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/11/12/o2.htm>. diakses 14 November 2007.
- Bappenas, BPS dan United Nations Population Fund. 2013. *Proyeksi Penduduk Indonesia 2000-2025*. Jakarta: BAPPENAS.
- Dick, H. 1982: Survey of recent developments. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 18, 1-38.
- Fox, J.J. 1991: Managing the ecology of rice production in Indonesia. In Joan, H., editor, *Indonesia: resources, ecology, and environment*. Singapore: Oxford University Press, 61-84.
- Hidayati, D. 2012. *Peran Radio dalam Peningkatan Pemahaman Petani dan Nelayan terhadap Perubahan Iklim*. Bogor: PT Sarana Komunikasi Utama, hal 223 – 254.
- Keraf, A.S. 2002. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Mears, L.A. 1984: Rice and food self-sufficiency in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 20, 122-137.
- Pawitan, H. 2011. Konsep Ekohidrologi sebagai Paradigma Baru Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan. Makalah disajikan dalam KIPNAS X Thema: *Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Membangun Kemandirian serta Kedaulatan Bangsa dan ditengah Perubahan Global*. Jakarta, 8-10 November 2011.
- Prasodjo, N.W. 2005. Pengetahuan Lokal dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citanduy (Studi Desentralisasi Pengelolaan dan Sistem Tata Pemerintahan Sumber Daya ALam). *Working Paper Series No.14*. Jakarta: PSP-IPB dan Partnership for Governmence Reform in Indonesia – UNDP.
- Octora, Y., Rompas, A., Subahani, E., dan Alfons, F. 2010. *Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Eks PLG*. Palangkaraya: Walhi – Kemitraan Partnership.
- Soeprobawati, T.R. 2010. Ekohidrologi Konsep Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan. *BIOMA No.1, Vol 12, Juni 2010*, hal 13-19.
- Sulastryono. 2009. Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Telaga Omang dan Ngloro, Kecamatan Saptosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. *Mimbar Hukum, Volume 21, Nomor 2, Juni 2009*, hal: 203-408.
- Sunaryo dan Joshi. L. 2003. Peranan Pengetahuan Ekologi Lokal dalam Sistem Agroforestri. Bogor: World Agroforestry Centre (ICRAF).
- Sutawan, N. 2003. 'Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Air dan Upaya-upaya Pemberdayaan Subak di Bali'. Makalah Seminar *Peran Budaya Lokal dalam Menunjang Sumber Daya Air yang Berkelanjutan*. Kerjasama antara BAPPENAS dengan FAO-UN, Kuta Beach, Bali, 2 Oktober 2003.
- Yamani, M. 2011. Strategi Perlindungan Hutan Berbasis Hukum Lokal di Eman Komunitas Adat Daerah Bengkulu. *Jurnal Hukum No.2 Vol. 18, April 2011*, hal 175-192.

## JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

p-ISSN : 1907-2902 (Print)

e-ISSN : 2502-8537 (Online)

### **KARAKTERISTIK KEWIRAUSAHAAN PENGUSAHA KECIL DAN STRATEGI PENGEMBANGAN USAHANYA DI MASA DEPAN: STUDI KASUS PENGUSAHA PAKAIAN JADI DI DEPOK**

#### ***(ENTREPRENEURIAL CHARACTERISTICS OF SMALL ENTREPRENEURS AND THEIR BUSINESS DEVELOPMENT STRATEGY IN THE FUTURE: CASE STUDY OF APPAREL ENTREPRENEURS IN DEPOK)***

**Zantermans Rajagukguk**

Peneliti Utama Bidang Manajemen Bisnis Kecil pada Puslitbang Ketenagakerjaan,  
Badan Perencanaan dan Pengembangan, Kementerian Ketenagakerjaan

Korespondensi penulis: *kingucok2@gmail.com*

#### **Abstract**

*To increase the numbers of entrepreneurs in Indonesia, the existence of small-scale apparel businesses in the township Bulak Timur, Depok becomes fascinating, as they naturally emerge and evolve, as well as face various problems with their abilities. However, lately, there are some concerns about whether they would be able to survive. Therefore, this article aims to identify the characteristics of small-scale apparel entrepreneurs in Bulak Timur, Depok City to understand their strengths, weaknesses, opportunities, and challenges that they experience. The results would then be formulated as strategies and conveyed to both business players and government. Respondents were selected using a simple random sampling by the number of 32 entrepreneurs (25% of the population). Primary data were collected using a survey method through face-to-face interview techniques, with the help of questionnaires and in-depth interview based on interview guidelines. Data collected was processed and analyzed by using descriptive statistics. The results of this study concluded that apparel entrepreneurs in Depok still have many weaknesses rather than strengths,*

*which led to a lower value of their entrepreneurial characteristics. In addition, there are still many barriers faced in the development of entrepreneurship in Depok, including government policies and program that were not optimal. Further efforts must be made to grow small-scale businesses with high-value entrepreneurial characteristics in Depok. First, small-scale entrepreneurs should strive to build and enhance their entrepreneurial characteristics. They must also understand and implement survival management. Second, Depok City Government should provide support among other things by increasing business incubator and training on business management, including survival management; draw up a blueprint of small-scale businesses to prevent unfair competition, which can also be used as material to develop technopreneurship.*

**Key Words:** *Entrepreneurship, Apparel, Small Business, Depok.*

### Abstrak

Dalam upaya meningkatkan jumlah wirausaha di Indonesia, keberadaan usaha-usaha kecil pakaian jadi di Bulak Timur, Kota Depok menjadi sangat menarik, karena usaha-usaha ini muncul dan berkembang secara alamiah, serta menghadapi dan mengatasi berbagai masalah dengan kemampuan masing-masing. Namun akhir-akhir ini muncul kekhawatiran, apakah mereka dapat bertahan? Artikel ini bertujuan mengidentifikasi karakteristik kewirausahaan pengusaha kecil pakaian jadi di Bulak Timur Kota Depok; untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan yang ada pada mereka, yang selanjutnya dapat dirumuskan saran strategi yang harus dilakukan, baik oleh pengusaha maupun pemerintah. Sumber data yang digunakan adalah data primer hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei terhadap 32 pengusaha atau sekitar 25% dari populasi yang dipilih secara acak sederhana. Selain itu juga dilakukan wawancara mendalam berdasar pedoman wawancara dengan beberapa nara sumber terpilih. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis secara deskriptif kuantitatif maupun kualitatif. Hasil analisis menyimpulkan bahwa para responden masih memiliki banyak kelemahan ketimbang kekuatan, yang mengakibatkan rendahnya nilai karakteristik kewirausahaan mereka. Selain itu, hambatan yang mengakibatkan terkendalanya perkembangan kewirausahaan di Depok juga masih banyak, termasuk belum optimalnya kebijakan atau program pemerintah. Agar usaha-usaha kecil di Depok dapat berkembang dengan karakteristik kewirausahaan yang tinggi, banyak hal yang harus dilakukan. Pertama, para pengusaha kecil harus berupaya membangun dan meningkatkan karakteristik kewirausahaannya, dan juga harus memahami serta melaksanakan manajemen *survival*. Kedua, Pemerintah Kota Depok harus memberikan dukungan antara lain dengan memperbanyak inkubator bisnis dan pelatihan-pelatihan tata kelola usaha, menyusun cetak biru usaha kecil, agar tidak terjadi persaingan tidak sehat, yang dapat juga dijadikan sebagai bahan untuk mengembangkan *technopreneurship*.

**Kata kunci:** Kewirausahaan, Usaha Kecil, Pakaian Jadi, Depok.

### PENDAHULUAN

Para pakar mengatakan bahwa kondisi kewirausahaan di Indonesia masih belum baik karena belum maksimal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang sebaik-baiknya. Sebagaimana diungkapkan oleh *Marketing Research Indonesia* (12 Maret 2015), Pemerintah Indonesia mengakui bahwa jumlah wirausaha domestik masih tertinggal jauh dibanding negara-negara lain di kawasan ASEAN dan Asia. Di waktu mendatang, target 2% jumlah wirausaha dari total penduduk ditargetkan tercapai dalam 5 tahun. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa periode tahun 2014, jumlah wirausaha Indonesia baru sebanyak 1,65% dari 253,61 juta jiwa penduduk Indonesia. Jumlah tersebut masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang masing-masing mencapai 5% dan 7%. Bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat, perbandingannya lebih jauh lagi. Di Jepang, komposisi wirausahanya mencapai 10% dan Amerika Serikat mencapai 12% dari total penduduk. Oleh karena itu Bank Indonesia menilai bahwa perkembangan wirausaha di Indonesia masih terbilang minim. Berdasarkan *The EY G20 Entrepreneurship Barometer 2013*, di antara negara-negara G20 Indonesia termasuk dalam kuartil keempat yaitu kelompok negara yang memiliki ranking terendah dalam ekosistem kewirausahaan.

Meskipun demikian, nampaknya harapan untuk mencapai rasio yang ideal sebagaimana telah ditetapkan bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai, karena survei yang dilakukan oleh *Global Entrepreneurship Monitor (GEM)* pada tahun 2013 tentang keinginan berwirausaha di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua negara ASEAN yang memiliki keinginan tertinggi untuk berwirausaha setelah Filipina. Setelah Indonesia terdapat negara Vietnam, Thailand, Singapura dan Malaysia. Hal ini mencerminkan optimisme bahwa Indonesia dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi baru dengan mengoptimalkan semangat kewirausahaan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa kewirausahaan merupakan hal yang sangat penting bagi semua negara, karena para wirausaha adalah salah satu penggerak kekuatan pertumbuhan ekonomi negara bersangkutan. Seperti dikatakan oleh Zimmerer (2000), kewirausahaan ialah penerapan inovasi dan kreativitas untuk pemecahan masalah dan memanfaatkan berbagai peluang yang dihadapi orang lain setiap hari.

Pengertian yang lebih luas dari kewirausahaan dapat pula dilihat dalam Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 961/KEP/M/XI/1995, dimana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Berkaitan dengan konteks ini, tidak kalah penting untuk diketahui adalah para pegiat kewirausahaan itu sendiri, yakni para wirausaha. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan wirausaha sama dengan wiraswasta, yaitu orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya.

Lebih lanjut, bagaimana kita dapat mengenali kewirausahaan secara tepat? Ebert and Griffin (2013) dan Boone (2013), mengidentifikasi beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai ciri kewirausahaan, yakni:

- mempunyai hasrat untuk selalu bertanggung jawab bisnis dan sosial;
- komitmen terhadap tugas;
- memilih resiko yang moderat;
- merahasiakan kemampuan untuk sukses;
- cepat melihat peluang;
- orientasi ke masa depan;
- selalu melihat kembali prestasi masa lalu;
- memiliki skill dalam organisasi;
- toleransi terhadap ambisi; dan
- fleksibilitas tinggi.

Pada sisi lain, Meredith (1996) mengemukakan ciri-ciri dan watak kewirausahaan sebagai berikut:

- selalu berusaha untuk berprestasi, berorientasi pada laba, memiliki ketekunan dan ketabahan, memiliki tekad yang kuat, suka bekerja keras, energik dan memiliki inisiatif;
- memiliki kemampuan mengambil risiko dan suka pada tantangan;
- bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain dan suka terhadap saran dan kritik yang membangun;

- memiliki inovasi dan kreativitas tinggi, fleksibel, serba bisa dan memiliki jaringan bisnis yang luas;
- memiliki persepsi dan cara pandang yang berorientasi pada masa depan; dan
- memiliki keyakinan bahwa hidup itu sama dengan kerja keras.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, secara statistik rasio kewirausahaan di Indonesia masih tergolong rendah, tetapi potensi kewirausahaan itu sendiri sebenarnya cukup besar. Kepioniran beberapa daerah di Indonesia menunjukkan bahwa potensi itu hanya memerlukan penanganan dan bimbingan serius, yang memungkinkannya muncul ke permukaan. Potensi yang sampai saat ini harus diakui keberadaannya adalah industri kecil pakaian jadi di sebuah perkampungan di Kota Depok, yang dikenal dengan nama Bulak Timur, terletak di Kelurahan dan Kecamatan Cipayang.

Menurut beberapa nara sumber, industri kecil pakaian jadi di Bulak Timur sudah ada sejak akhir tahun 90an, saat terjadi krisis moneter. Sebuah media lokal di Depok menuturkan bahwa kampung ini jadi salah satu primadona pengusaha pakaian jadi. Tak tanggung-tanggung, omzet per harinya mencapai ratusan juta rupiah. Kampung kecil di pinggiran Kota Depok itu bagaikan magnet bagi para distributor, agen, dan pengecer di Pasar Tanah Abang. Dituturkan bahwa pada mulanya industri pakaian jadi di Bulak Timur hanya dilakukan oleh dua atau tiga rumah, Itupun hanya mengolah limbah bahan sisa pabrik atau kain perca. Maklum saja, dulunya hampir sebagian besar warga kampung ini adalah pekerja pabrik pakaian jadi. Setelah krisis moneter tahun 1998, banyak warga yang terkena pemutusan hubungan kerja. Mereka pun berinisiatif membuka usaha pakaian jadi kecil-kecilan hingga akhirnya sekarang hampir sebagian besar warga mengubah rumah mereka menjadi pabrik dan toko pakaian. Melihat perkembangan ini, bagai semut menemukan gula, banyak pendatang yang ingin turut mencicipi gula tersebut lalu mendirikan usaha sejenis. Para pendatang ini kebanyakan adalah orang-orang Batak, orang Sunda (Sukabumi dan Tasik).

Berdasar latar belakang tersebut artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik kewirausahaan pengusaha kecil pakaian jadi di Bulak Timur Kota Depok. Selain itu, akan dianalisis pula kekuatan dan kelemahan yang ada pada pengusaha kecil tersebut, serta peluang dan hambatan yang mereka hadapi, yang

selanjutnya akan digunakan untuk menyampaikan saran strategi yang harus dilakukan, baik oleh pengusaha maupun Pemerintah Daerah Kota Depok.

Artikel ini merupakan hasil kajian yang menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data primer - data kuantitatif dikumpulkan melalui survei atau wawancara langsung, dengan bantuan instrumen daftar pertanyaan terhadap 32 pengusaha atau sekitar 25% dari populasi. Mengingat unit analisis adalah pengusaha pada golongan usaha pakaian jadi, baik sebagai produsen maupun pedagang, yang berarti homogen, maka pemilihan responden dilakukan secara acak sederhana (*simple random sampling*). Para pengusaha yang akan dijadikan responden dipilih dengan mempertimbangkan kemudahan dalam melakukan wawancara (*convenience*) dan juga kemampuan serta kesediaan responden untuk diwawancarai. Pertanyaan yang diajukan kepada responden mencakup identitas pribadi, dan profil usaha yang keseluruhannya ditujukan untuk mengetahui sejarah dan perkembangan usaha; karakteristik kewirausahaan responden; dan hambatan yang dihadapi serta perkembangan di masa depan. Selain itu, dikumpulkan pula data kualitatif melalui teknik wawancara mendalam terhadap beberapa nara sumber terpilih berdasarkan pedoman wawancara untuk mengetahui latar belakang, motivasi dan sejarah dalam melakukan usaha serta berbagai permasalahan yang dialami dalam pengembangan usaha, serta pengamatan dan observasi. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis secara deskriptif kuantitatif maupun kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan identitas pribadi responden dan profil usaha yang dikelola.

Karakteristik kewirausahaan yang dianalisis merupakan karakteristik psikologis kewirausahaan, yang mencerminkan ciri wirausaha, yakni:

- memiliki rasa percaya diri;
- berorientasi pada tugas dan hasil;
- berani mengambil resiko dan suka tantangan;
- memiliki jiwa pemimpin;
- memiliki keorsinilan; dan
- berorientasi ke masa depan.

Penilaian atas ciri kewirausahaan tersebut di atas dibagi menjadi empat kategori, mulai dari yang tertinggi/terbaik sampai yang terendah/terburuk. Selanjutnya, akan dihitung berapa persen dari seluruh responden yang mencapai kategori terbaik atau tertinggi pada tiap-tiap sub-ciri dari ciri kewirausahaan

tertentu. Dengan ketentuan bahwa persentase yang tertinggi adalah 100%, dan yang terendah adalah 0%, maka range persentase ini akan dibagi menjadi empat kategori, yakni sebagai berikut:

- Baik 75 - 100
- Cukup baik 50 - 74
- Kurang baik 25 - 49
- Tidak baik 0 - 24

Dengan demikian secara garis besar akan dapat disimpulkan bagaimana karakteristik kewirausahaan dari responden.

Lebih lanjut, untuk mengetahui strategi yang harus dilakukan untuk mengembangkan usaha kecil di Depok ini dilakukan melalui pendekatan analisis Kekuatan (K), Kelemahan (L), Peluang (P), dan Hambatan (H), atau yang lebih dikenal dengan SWOT (*Strength*), (*Weakness*), (*Opportunity*), dan (*Threat*). Dua faktor yang disebut lebih dahulu, yaitu kekuatan dan kelemahan, merupakan faktor yang berada di dalam diri para pengusaha sehingga berada di dalam kontrol pengusaha itu sendiri; sedangkan dua faktor terakhir, yaitu peluang dan hambatan berada di luar diri para pengusaha, sehingga berada di luar kontrol para pengusaha. Oleh karena itu, analisis kekuatan dan kelemahan akan dilakukan dengan pendekatan Analisis Faktor Strategis Internal (*Internal Strategic Factors Analysis Summary/ISFAS*), sementara analisa peluang dan tantangan akan dilakukan dengan pendekatan Analisis Faktor Strategik Eksternal (*External Strategic Factors Analysis Summary/ESFAS*).

ISFAS akan memberikan gambaran pada para pengusaha mengenai *kekuatan* di dalam dirinya yang dapat membuka kemungkinan perkembangan usaha, dan *kelemahan* di dalam dirinya yang dapat menghambat perkembangan tersebut. Melalui gambaran ini akan dapat disusun strategi yang memadai untuk mempertahankan dan atau mengembangkan kekuatan yang dimiliki, serta mengatasi kelemahan yang ada, sehingga kemungkinan perkembangan usaha dapat terwujud. Sementara ESFAS, akan memberikan gambaran pada para pengusaha mengenai *peluang* di luar yang dapat memungkinkan berkembangnya usaha, dan *hambatan* di luar yang dapat menghambat perkembangan usaha termaksud. Melalui gambaran ini akan dapat disusun strategi merebut, mempertahankan, dan atau meningkatkan peluang, serta menekan atau mengatasi hambatan, sehingga perkembangan usaha dapat terwujud.

## GAMBARAN UMUM USAHA

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pengusaha yang dijadikan sebagai responden dalam kajian ini berjumlah 32 orang. Seperti terlihat pada Tabel 1, hampir separuh (43,7%) dari responden ini memulai usahanya sebelum tahun 2000 atau pada saat terjadinya krisis moneter, dan hanya 18,7% yang mendirikan usahanya pada tahun 2010 atau lebih.

Dilihat menurut daerah tempat tinggal, sebagian besar atau 65,6% dari pengusaha merupakan penduduk atau yang bertempat tinggal di Bulak Timur dan sekitarnya, baik orang asli Depok maupun pendatang yang sudah bertempat tinggal di Bulak Timur sebelum mendirikan usahanya.<sup>1</sup> Selebihnya (34,4%) bertempat tinggal di luar Bulak Timur, baik yang masih di dalam lingkungan maupun luar Kota Depok

Tabel 1. Identitas Responden Saat Memulai Usaha (n=32)

Keterangan	Persen
Tahun memulai usaha	
• <Tahun 2000	43,7
• Tahun 2000 – 2004	21,8
• Tahun 2005 – 2009	15,6
• Tahun 2010 atau lebih	18,7
Usia	
• <25 Tahun	6,2
• 25 – 34 Tahun	15,6
• 35 – 39 Tahun	46,9
• 40 Tahun atau lebih	31,2
Pendidikan yang ditamatkan	
• <SMP	25,0
• SMA sederajat	59,4
• Pendidikan tinggi	15,6
Kegiatan sebelum mendirikan usaha	
• Kerja tak tetap	87,5
• Bekerja tetap	12,5
Daerah tempat tinggal	
• Bulak Timur	21,0
• Luar Bulak Timur	11,0

Sumber: Data Primer, 2016

<sup>1</sup>Seirama dengan perkembangan Kota Depok setelah resmi lepas dari administrasi pemerintahan Kabupaten Bogor dan menjadi Kota Depok, serta arus perpindahan penduduk dari DKI Jakarta, maka

Karakteristik menurut usia, 46,9% dari responden tergolong usia muda (35-39 tahun) saat memulai usahanya. Meski demikian terdapat juga jumlah yang relatif banyak (31,3%) yang sudah berusia 40 tahun atau lebih saat memulai usahanya, dan meskipun hanya 6,3% terdapat diantara mereka yang masih tergolong sangat muda (<25 tahun) untuk menjadi pengusaha. Lebih lanjut, dilihat dari tingkat pendidikan para pengusaha ini cukup tinggi yaitu 59,4% lulus SMA atau yang sederajat. Bahkan walaupun jumlahnya tidak banyak (15,6%), terdapat juga lulusan perguruan tinggi.

Adapun kegiatan responden sebelum mendirikan usahanya di Bulak Timur, sebesar 87,5% adalah penganggur atau bekerja tidak tetap. Salah seorang narasumber, Hutajulu misalnya, yang bekerja sebagai kondektur Metro Mini mengemukakan latar belakang dan riwayat pekerjaannya sebagai berikut:

“Pada suatu hari di tahun 1999 saya berjalan-jalan ke daerah Bulak Timur, melihat seorang laki-laki paruh baya bernama Bang Bewok yang sedang menjahit sisa-sisa guntingan kain berwarna-warni (kain perca) di sebuah rumah yang sekaligus juga berfungsi sebagai toko pakaian jadi. Kain perca yang dijahit itu kemudian berubah menjadi celana panjang atau celana pendek untuk Balita. Tentu saja saya tertarik, lalu menanyakan harga per-potong celana Balita tersebut, dan saya terkejut saat mendengar harga celana Balita itu hanya Rp. 500, per-potong. Perasaan saya yang tidak mempunyai ‘sense of business’ sama sekali seperti terusik. Akhirnya otak saya berputar. Kalau aku beli 20 potong, harganya semua cuma Rp. 10.000. Kalau saya Rp. 1.000, sudah bisa untung 10.000. Kalau saya jual Rp. 2.000 per-potomg, maka akan dapat untung lebih banyak lagi. Kalau sebulan bisa laku 100 potong, atau 200 potong, atau...”. Pikiran saya terus berputar mengkalkulasi keuntungan yang bisa diperoleh bila angan-angan saya bisa terwujud. Akhirnya saya putuskan membeli 20 potong dengan total harga Rp.

Bulak Timur yang sebelumnya lebih banyak tanah kosong, mendadak berubah ramai oleh para pendatang.

10.000. Di sela-sela kesibukannya sebagai kondektur Metro Mini, saya menawarkan celana Balita yang dibelinya kepada teman-teman seprofesinya di terminal saat beristirahat dengan harga Rp. 2.000 per-potong. Istri saya juga turut menawarkan celana-celana Balita itu ke tetangga, juga dengan harga Rp. 1.600 per-potong. Ternyata hanya dalam tempo seminggu seluruh celana habis terjual. "Mantap kali. Lebih baik aku dagang barang-barang macam ini daripada teriak-teriak panggil penumpang di Metro Mini". Pikir saya sambil berangan-angan lebih tinggi lagi, dan setelah berdiskusi dengan istri, saya menyiapkan langkah untuk berdagang pakaian anak-anak. Saya berangkat ke Bulak Timur untuk mewujudkan rencananya. Sebagai langkah awal dari rencana besarnya ini, saya membuat semacam warung kecil di bagian depan rumah kontrakan, lalu membeli 100 potong pakaian anak-anak dan balita.

Sejak itu, saya berdagang pakaian anak-anak dan Balita dengan serius. Selama beberapa bulan berdagang dapat menangguk untung yang besar dan menggembirakan. Melihat kenyataan ini, lalu pada awal tahun 2000, saya pindah ke Bulak Timur dan membeli satu mesin jahit manual dan istri saya bertindak bertindak sebagai penjahit. Kini, saya tidak lagi membeli lalu menjual, melainkan memproduksi lalu menjual. Dari bisnis ini saya bisa memperoleh untung minimal sekitar Rp. 2 juta per-bulan. Keuntungan ini cukup besar bila dibandingkan dengan upahnya sebagai kondektur, atau UMR yang pada saat itu hanya Rp. 600.000 per-bulan".

Mencermati perjalanan pekerjaan nara sumber sebagaimana dikemukakan di atas, dapat dikemukakan bahwa meskipun tidak mempunyai latar belakang bisnis bahkan modal dalam jumlah yang besar, akan tetapi

dengan adanya peluang usaha maka kewirausahaan dapat berkembang.

Berkaitan dengan latar belakang atau motivasi dalam menjalankan usaha, sebagian besar atau 56,2% dari responden mendirikan usahanya karena tertarik pada ajakan atau informasi dari orang lain seperti tetangga, saudara, atau orang lain yang sudah mendirikan usaha lebih dulu. Cukup menarik adalah bahwa sebanyak 18,7% dari responden ini mendirikan usahanya atas inisiatif sendiri atau tanpa ajakan maupun pengaruh dari siapapun. Hal itu juga terkait dengan adanya kenyataan bahwa hampir semua (93,7%) dari responden tidak memiliki keterampilan manajemen usaha sama sekali saat mendirikan usahanya. Mereka hanya bermodalkan kenekatan atau ketertarikan karena keberhasilan pengusaha terdahulu. Menurut Rajagukguk (2012) hal semacam ini tidak jarang terjadi pada masyarakat Indonesia, terutama pada saat-saat yang ekstrim, baik berupa krisis ekonomi ataupun booming.<sup>2</sup>

Sementara itu, secara keseluruhan apabila dilihat data mengenai profil usaha responden saat mulai berdiri (Tabel 2) menunjukkan bahwa sebanyak 50% menyatakan bahwa bentuk kegiatan usahanya adalah memproduksi dan sekaligus berdagang. Sementara itu, sebanyak 28,1% menyatakan bahwa bentuk kegiatan usahanya semata-mata hanya memproduksi pakaian jadi, dan 21,9% hanya berdagang. Di lihat dari permodalan, sebagian besar atau 59,4 % dari pengusaha yang diwawancarai mendirikan usahanya dengan modal kombinasi (milik sendiri dan pinjaman baik dari Bank, rentenir ataupun saudara). Hanya 15,6% responden yang mendirikan usahanya murni modal pribadi/sendiri, dan sisanya (25%) mendirikan usahanya dengan modal pinjaman. Gambaran ini cukup menggembirakan proporsi responden yang mendirikan usahanya untuk pertama kali dengan seluruh atau sebagiannya modal sendiri relatif cukup tinggi meskipun proporsinya paling kecil.

Adapun pemilikan bangunan tempat usaha, menunjukkan bahwa sebagian besar atau 56,2% adalah milik sendiri, karena sebagian besar responden adalah penduduk Bulak Timur saat mendirikan usahanya. Dilihat dari tenaga kerja yang dipekerjakan, data menunjukkan bahwa hampir separuh dari responden (46,8%) tidak menggunakan pekerja, atau pengusaha

<sup>2</sup>Fenomena menjamurnya usaha-usaha kecil di kota-kota besar pada saat atau setelah terjadinya krisis moneter akhir tahun 90 an adalah salah satu contoh yang patut diperhatikan. Saat itu, hampir semua orang yang terkena dampak krisis berpikir sama, yaitu membuka

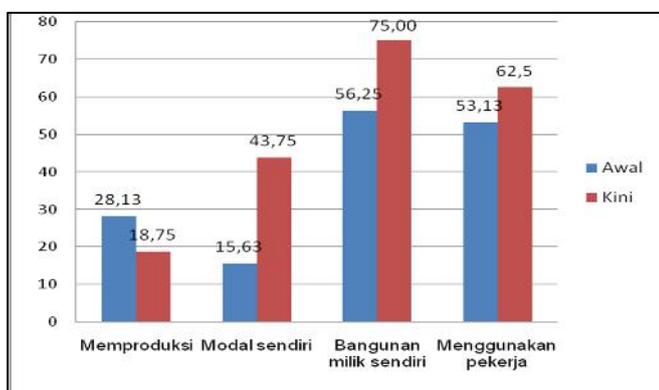
usaha apa saja yang dapat menghasilkan uang, meskipun mereka belum pernah sama sekali menjalankan usaha sekecil apapun.

tanpa dibantu oleh buruh/ pekerja. Selebihnya (53,2%) menggunakan pekerja, yang terdiri dari jumlah pekerja dengan kisaran 1-2 orang (37,5%), dan sebanyak 9,4% menggunakan pekerja antara 3-4 orang, dan sebanyak 6,3% menggunakan pekerja di atas 5 orang atau lebih.

Tabel 2. Profil Usaha Responden Saat Memulai Usaha (n = 32)

Keterangan	Persen
<b>Bentuk kegiatan</b>	
• Memproduksi	28,1
• Berdagang	21,9
• Keduanya	50,0
<b>Modal</b>	
• Sendiri	15,6
• Pinjaman	25,0
• Keduanya	59,4
<b>Status bangunan usaha</b>	
• Milik sendiri	56,2
• Bukan milik sendiri	43,7
<b>Pekerja</b>	
• Tidak ada	46,9
• 1 – 2 Orang	37,5
• 3 – 4 Orang	9,4
• 5 Orang atau lebih	6,2
<b>Sumber informasi ttg usaha ini</b>	
• Inisiatif sendiri	18,7
• Dari orang lain	56,2
• Media	25,0
<b>Keterampilan manajemen usaha</b>	
• Tidak ada	93,7
• Ada	6,2

Sumber: Data Primer, 2016



Grafik 1. Perbandingan Profil Usaha Responden antara Awal Berdiri dan Sekarang.

Sumber: Data Primer, 2016

Lebih lanjut, Grafik 1 memuat data yang menunjukkan adanya perubahan profil usaha yang cukup menarik bila dibandingkan antara saat mulai berdiri dengan saat kajian dilakukan. Bila saat mulai berdiri bentuk kegiatan usaha sebagian besar terkait dengan proses produksi (baik hanya memproduksi maupun memproduksi dan menjual), maka saat kajian dilakukan bentuk kegiatan yang menonjol adalah menjual. Data ini menunjukkan bahwa selama kurun waktu perjalanannya, pengusaha yang tetap memproduksi hanya tinggal 6 orang dari sebelumnya yang berjumlah 9 orang, karena 3 orang yang tidak lagi memproduksi tersebut beralih menjadi hanya berjualan pakaian jadi. Menurut para responden yang beralih usaha ini, mereka terpaksa hanya berjualan karena tidak mampu lagi memproduksi sehubungan dengan semakin sulitnya memperoleh bahan dasar berupa kain perca, sementara bila memproduksi dengan menggunakan bahan dasar kain utuh yang harus dibeli di toko dengan harga yang jauh lebih mahal dari kain perca, maka keuntungan yang diperoleh sangat kecil dan sulit untuk memenuhi kebutuhan usaha dan kebutuhan hidup. Sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang nara sumber berikut:

“Sejak tahun 2010, kain perca semakin sulit diperoleh karena semakin banyaknya orang yang masuk dalam bisnis ini. Oleh karena itu terpaksa harus beralih ke bahan dasar lain yaitu kain utuh, yang dibeli dari pedagang kain di Tanah Abang atau pasar lainnya dengan harga yang sangat jauh lebih mahal ketimbang kain perca. Tentu saja hal itu membuat biaya menjadi semakin mahal dan akibatnya keuntungan menjadi kecil, dan karena buruknya persaingan, dimana yang bermodal besar semakin kuat sedangkan pengusaha bermodal kecil seperti saya semakin lemah, maka kami memutuskan untuk menghentikan produksi dan hanya berdagang saja.”

Perubahan sebagaimana dikemukakan tersebut mengakibatkan biaya produksi menjadi jauh lebih tinggi, yang pada akhirnya telah menurunkan margin keuntungan usaha. Tahun 2015 situasi makin buruk bagi pengusaha bermodal kecil. Persaingan dengan pengusaha bermodal besar semakin terasa. Pengusaha bermodal besar ini bisa menentukan harga produknya dengan harga lebih murah karena mereka bisa memperoleh kain langsung dari pabrik dengan harga

yang jauh lebih murah daripada harga pasaran di toko. Hal ini bisa terjadi karena pengusaha bermodal besar ini pada umumnya ‘menaruh’ uang mereka di pabrik kain dengan kisaran antara Rp. 1 M sampai Rp. 2 M, sementara pengusaha bermodal kecil tidak mampu melakukan hal seperti itu.

Meskipun demikian, ada kecenderungan yang cukup menarik, pada saat dilakukan kajian kebanyakan dari usaha pengusaha kecil yang dikaji sudah dijalankan dengan modal sendiri. Bila dibandingkan dengan saat mulai berdiri, telah terjadi peningkatan sebanyak 180% pengusaha kecil yang menggunakan modal sendiri. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari kemajuan usaha yang dirasakan sampai sekitar tahun 2005.

Sejalan dengan adanya perubahan permodalan usaha, terjadi pula perubahan status pemilikan bangunan usaha. Bila Dibandingkan dengan saat mulai berdiri, maka jumlah pengusaha kecil yang sudah memiliki bangunan sendiri meningkat 33,3%. Dari wawancara mendalam yang dilakukan dapat diketahui bahwa mereka ini adalah para pendatang yang semula hanya mengontrak bangunan sebagai tempat usaha sekaligus sebagai tempat tinggal.

Memperhatikan data perbandingan penggunaan tenaga kerja pada Tabel 3 dapat menyedatkan apabila tidak dijelaskan secara runtut waktu. Pada saat dilakukan kajian memang terjadi peningkatan jumlah pengusaha yang menggunakan tenaga kerja bila dibandingkan dengan saat baru memulai usaha. Namun harus dijelaskan bahwa sesungguhnya telah terjadi penurunan bila dibandingkan dengan saat-saat keemasan usaha yakni sampai tahun 2004. Dapat pula dijelaskan bahwa ada kemungkinan tidak lama lagi sebagian besar dari pengusaha kecil di lokasi kajian tidak akan menggunakan pekerja lagi, atau hanya menggunakan dalam jumlah yang paling sedikit.

Sementara itu, berkaitan dengan keterlibatan pengusaha kecil dalam pelatihan keterampilan kerja dapat dilihat pada Tabel 3. Dari tabel ini terlihat bahwa hanya 15,6% saja yang pernah mengikuti pelatihan, yakni pelatihan manajemen produksi, dan manajemen pemasaran yang diselenggarakan oleh sebuah LSM bekerjasama dengan Dinas KUKM Kota Depok. Data ini seakan memperkuat dugaan beberapa pengamat mengenai kebijakan UKM di Indonesia yang masih berorientasi kepada aspek sosial ketimbang pasar atau persaingan, sehingga kebijakan yang diambil belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan ekonomi makro. Di Indonesia kebijakan terhadap UKM lebih sering

dikaitkan dengan upaya pemerintah mengurangi pengangguran, memerangi kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Karena itu pengembangan UKM sering dianggap secara tidak langsung sebagai kebijakan penciptaan kesempatan kerja atau kebijakan redistribusi pendapatan (Tambunan: 2002).

Tabel 3. Keterlibatan Responden dalam Pelatihan Keterampilan Kerja Sampai Saat ini

Keterangan	Persen
Pelatihan keterampilan (n=32)	
• Pernah	15,6
• Tidak	84,4
Bila ‘Pernah’, pelatihan yang diikuti (n=5)	
• Manajemen produksi	60,0
• Manajemen pemasaran	40,0
Bila ‘Tidak’, mengapa (n=27)	
• Tidak tahu	48,1
• Tidak perlu	7,4
• Tidak mampu bayar	18,5
• Tidak ada waktu	25,9

Sumber: data Primer, 2016

Dengan demikian, sebagian besar atau 84,4% responden tidak atau belum pernah mengikuti pelatihan keterampilan kerja. Hampir separuh (48,2%) dari responden yang belum pernah mengikuti pelatihan ini menyatakan mereka tidak mengetahui bagaimana dan dimana pelatihan keterampilan tersebut dapat diikuti. Seperti diungkapkan oleh Hutajulu, ia sama sekali tidak tahu harus kemana dan bagaimana ia bias memperoleh pelatihan keterampilan kerja. Ia sadar betul bahwa pengetahuan atau keterampilannya hanya berdasarkan ‘lihat sana lihat sini’ saja. Inilah gambaran pengusaha kecil Bulak Timur yang sejak awal mendirikan usahanya hanya bermodal keberanian dan tekanan situasi ekonomi saat itu. Selain itu ada pula (25,9%) yang mengatakan karena tidak ada waktu untuk mengikuti pelatihan meskipun mereka sadar bahwa hal itu perlu. Hal ini dapat dimaklumi karena pengusaha kecil di Bulak Timur ini pada umumnya adalah solo manager, sekaligus merangkap pekerja. Lebih memprihatinkan lagi adalah adanya sebagian kecil responden (7,4%) yang menganggap pelatihan tidak

perlu karena usaha dan pekerjaan semacam ini tidak memerlukan keterampilan yang khusus dan tinggi.<sup>3</sup>

Selanjutnya, berdasarkan pengamatan dan berbagai informasi menunjukkan bahwa di lokasi kajian sudah terdapat Asosiasi Pengusaha Industri Kecil Indonesia (APIKI) di kawasan Bulak Timur. Akan tetapi data seperti pada Tabel 4 menunjukkan bahwa hanya 43,7% pengusaha kecil yang menjadi anggota APIKI. Sebanyak 64,3% dari responden atau pengusaha kecil yang menjadi anggota ini mengatakan ada manfaatnya menjadi anggota APKI seperti wadah komunikasi antar pengusaha, mengatur persaingan. Namun 35,7% mengatakan tidak ada manfaat yang mereka rasakan sebagai anggota APIKI.

Tabel 4. Keterlibatan Responden dalam Asosiasi Pengusaha Sejenis Sampai Saat Ini

Keterangan	Persen
Keanggotaan dalam APIKI (n=32)	
• Anggota	43,7
• Tidak	56,2
Bila 'Anggota', apa manfaatnya? (n=14)	
• Wadah komunikasi antar pengusaha	28,6
• Mengusahakan pengembangan usaha	14,3
• Mengatur persaingan	21,4
• Tidak ada	35,7
Bila 'Tidak', mengapa (n=18)	
• Tidak tahu ada APIKI	27,8
• Tidak tahu cara menjadi anggota	11,1
• Tidak ada gunanya	38,9
• Lainnya	22,2

Sumber : Data Primer, 2016

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa separuh lebih (56,2%) dari responden belum menjadi anggota APIKI. Kebanyakan dari mereka ini (38,9%) mengatakan bahwa mereka tidak menjadi anggota karena merasa tidak akan memperoleh manfaat bila menjadi anggota APIKI berdasarkan pengamatan mereka sehari-hari. Selebihnya mengatakan karena tidak mengetahui adanya APIKI, dan tidak tahu cara menjadi anggota. Berkaitan dengan hal ini Mengenai hal ini, seorang nara sumber menjelaskan bahwa:

“ hampir tiap hari rumah yang menjadi kantor APIKI selalu tertutup dan tidak tahu

apa kegiatan yang dilakukan oleh para pengurusnya. Organisasi ini nampak sangat eksklusif, hanya bagi orang-orang atau pengusaha tertentu, dan baru aktif apabila ada kampanye Pilpres atau Pilkada. Kalaupun saya menjadi anggota, tapi merasa tidak menerima manfaat apa-apa, bahkan 'tekor' karena harus mengeluarkan uang untuk iuran anggota”.

Selanjutnya, Tabel 5 menunjukkan bahwa sebagian besar dari responden pengusaha kecil menghadapi masalah dalam menjalankan usahanya. Menurut mereka, masalah yang paling menonjol adalah biaya produksi (biaya bahan dan upah pekerja) makin mahal dan makin sulit memperoleh kain. Seperti dijelaskan sebelumnya oleh Hutajulu, kain perca sudah sulit diperoleh sehingga pengusaha harus beralih ke bahan lain yaitu kain utuh yang harus dibeli di toko dengan harga yang jauh lebih mahal. Hanya pemodal besar yang mampu membeli dengan harga murah karena mereka menanamkan uangnya di pabrik-pabrik kain.

Masalah lain yang juga dianggap berat adalah makin banyaknya orang membuka usaha sejenis. Para pengikut ini sebagian adalah penduduk setempat, dan sebagian lagi adalah pendatang dari Jakarta atau Bogor. Situasi ini dirasa memperburuk suasana karena bertambahnya pesaing, yang tentu saja akan mempersempit pasar dan menurunkan harga.

Tabel 5. Permasalahan yang Dihadapi Responden Sampai Saat ini (n = 32)

Keterangan	Persen
Biaya produksi makin mahal	93,7
Makin kerasnya persaingan	65,6
Sulit memperoleh kredit usaha	68,7
Makin banyaknya orang membuka usaha	93,7
Kurangnya dukungan pemerintah	75,0

Sumber: Data Primer, 2016

Masalah berikutnya yang juga tidak kalah penting adalah kurangnya dukungan dari pemerintah. Saat mereka menghadapi persaingan yang makin ketat dan cenderung tidak sehat, atau disaat mereka membutuhkan bantuan permodalan, atau disaat mereka membutuhkan pelatihan keterampilan kerja, mereka

<sup>3</sup>Ketiga kecenderungan ini juga ditemukan oleh Rajagukguk (2012) pada pengusaha kecil sektor industry yang pernah ditelitinya. Ia menyimpulkan bahwa hal ini terjadi bukan saja karena pengusaha itu sendiri memang tidak mengetahui, atau mengetahui tetapi tidak

sadar pentingnya arti pelatihan; dan pada sisi lain juga karena kurangnya upaya pemerintah di daerah untuk mensosialisasikan dan melaksanakan pelatihan sampai ke tingkat perdesaan.

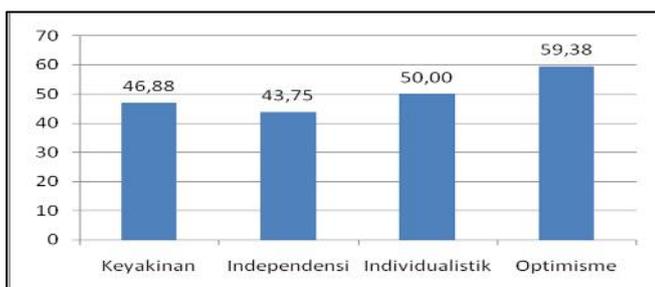
belum merasakan kehadiran pemerintah secara optimal. Akan tetapi, menurut penjelasan salah satu responden yang sudah tergolong maju dan besar, sebenarnya pemerintah Kota Depok melalui Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar Kota Depok sudah memberikan dukungan, seperti dalam hal bantuan permodalan. Namun dalam perjalanannya tidak berjalan sesuai harapan karena banyak pengusaha di Bulak Timur yang tidak tertib dan disiplin dalam pemenuhan kewajiban pengembalian pinjaman, sehingga pemerintah melimpahkan pengurusan pinjaman modal kepada Bank agar lebih teratur pengembalian uangnya.

### KARAKTERISTIK KEWIRAUSAHAAN

Lebih lanjut, seperti telah dijelaskan dalam metode, salah satu pendekatan analisis yang dilakukan dalam kajian adalah analisis karakteristik kewirausahaan para responden. Juga telah dijelaskan bahwa ciri dari karakteristik kewirausahaan yang akan dianalisis adalah: memiliki rasa percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, berani mengambil resiko dan suka tantangan, memiliki jiwa pemimpin, memiliki keorsinilan, dan ciri berorientasi ke masa depan.

#### Memiliki Rasa Percaya Diri

Berdasarkan data yang diperoleh sebagaimana terdapat pada Grafik 2, dari empat watak yang mencerminkan ciri percaya diri, yakni keyakinan, independensi, individualistik, dan optimisme, maka hanya 46,9% responden yang dapat dikategorikan memiliki keyakinan. Hal ini menandakan bahwa hanya sedikit responden yang secara sadar mempunyai keyakinan akan usaha yang dibangunnya. Sesungguhnya data ini tidak mengejutkan karena sejak awal sudah dapat diidentifikasi bahwa banyak diantara pengusaha kecil yang menjadi responden yang membangun usahanya hanya karena ajakan atau pengaruh orang lain saat ia menghadapi situasi ekonomi yang sulit.



Grafik 2. Persentase Tertinggi Responden pada Ciri Memiliki Rasa Percaya Diri

Sumber: Data Primer, 2016

Selanjutnya, pada watak yang kedua yakni independensi, persentase responden yang memiliki independensi lebih rendah lagi yaitu hanya 43,7%. Ini mengartikan bahwa hanya sejumlah inilah responden yang dapat dikategorikan tidak tergantung kepada orang lain dalam mengambil keputusan. Akibat dari rendahnya persentase responden yang memiliki independensi, maka persentase dari responden yang dapat digolongkan individualistik juga tidak terlalu tinggi, yakni hanya 50%. Sementara itu, responden yang tergolong memiliki rasa optimisme dalam menjalankan usahanya cukup lumayan, yakni mencapai 59,4%.

Berdasarkan data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa kategori responden pada watak keyakinan dan watak independensi cenderung “kurang baik”. Ini merupakan kelemahan dalam diri responden pengusaha kecil yang dapat mengganggu upaya memajukan perusahaan di masa mendatang. Sementara pada watak individualistik dan optimisme kategorinya adalah “cukup baik”. Ini merupakan kekuatan yang ada dalam diri responden dalam upaya memajukan usahanya di kemudian hari.

#### Berorientasi pada Tugas dan Hasil

Grafik 3 memperlihatkan karakteristik kewirausahaan responden pada ciri berorientasi pada tugas dan hasil, yang dicerminkan oleh tiga watak yaitu selalu ingin berprestasi, berorientasi laba, ketekunan dan ketabahan, tekad kerja keras. Data dari lapangan menunjukkan bahwa persentase responden yang memiliki keinginan yang tinggi untuk berprestasi adalah sebesar 71,9%.

Selanjutnya, pada watak yang kedua, persentase responden yaitu memiliki orientasi yang tinggi pada laba mencapai angka 81,2%. Hal ini mungkin tidak terlalu mengejutkan, karena dapat dikatakan seluruh pengusaha selalu menginginkan untuk memperoleh laba. Namun keinginan tersebut bisa berbeda tingkatannya, dan data ini menunjukkan meskipun persentasenya tinggi, tetapi tidak semua responden memiliki orientasi yang tinggi terhadap laba.

Berikutnya, pada watak yang ketiga, ternyata hanya 56,2% responden yang memiliki ketekunan dan ketabahan yang tinggi. Menurut Rajagukguk (2014) ini mengartikan masih banyaknya responden yang tidak tekun dan cengeng. Malas dan mudah putus asa adalah watak yang acap kali diidap oleh para responden pengusaha kecil yang tidak didasari oleh niat dan cita-cita yang kuat saat mendirikan usahanya, atau watak

yang kadang muncul dalam suasana tertentu. Sementara itu, persentase responden yang memiliki tekad dan kerja keras yang tinggi cukup banyak yakni 68,8%.

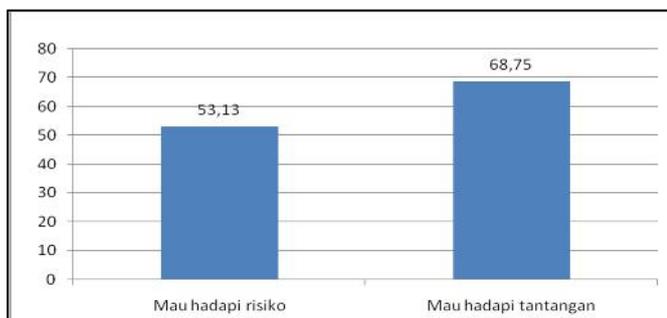
Berdasarkan data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa kategori responden pada watak keinginan yang tinggi untuk berprestasi, memiliki ketekunan dan ketabahan, dan memiliki tekad dan kerja keras adalah “cukup baik”, sedangkan pada watak memiliki orientasi yang tinggi pada laba adalah “baik”. Nilai yang baik pada watak ini sesungguhnya adalah kekuatan yang ada dalam diri responden untuk memajukan usahanya di masa mendatang.

### Berani Mengambil Resiko dan Suka Tantangan

Menjalankan suatu usaha atau menjadi pengusaha tidak akan terlepas dari kemungkinan menghadapi resiko dan berbagai tantangan. Pengusaha yang baik dan memiliki kemungkinan untuk sukses adalah pengusaha yang berani menghadapi resiko apapun secara wajar, penuh perhitungan yang matang, bukan sekedar berani tanpa memperhitungkan kemampuannya sendiri. Pengusaha yang baik juga harus berani menghadapi tantangan, dengan tetap memperhitungkan manfaat dan kemampuan masing-masing.

Data yang terdapat pada Grafik 4 memperlihatkan bahwa persentase responden yang memiliki keberanian yang tinggi untuk mengambil resiko hanya sebesar 53,1%. Sementara itu, persentase responden yang memiliki kemauan yang tinggi untuk menghadapi tantangan adalah sebesar 68,7%.

Berdasarkan data tersebut, maka dapatlah dikatakan bahwa kategori responden pada dua watak dalam ciri keberanian mengambil resiko dan suka menghadapi tantangan adalah “cukup baik”. Meski persentase ini belum tergolong tinggi, namun responden sudah memiliki kekuatan yang sangat dibutuhkan untuk memajukan usahanya di masa mendatang.



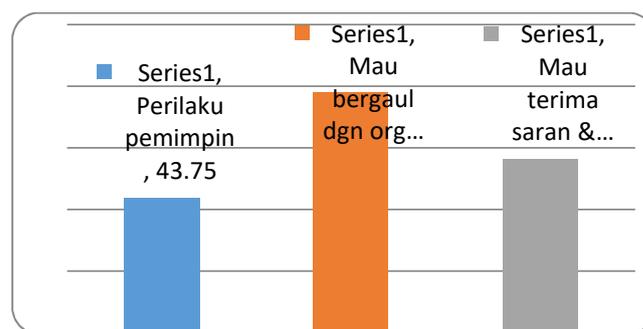
Grafik 4. Persentase Tertinggi Responden pada Ciri Berani Mengambil Resiko dan Suka Tantangan.

Sumber: Data Primer, 2016

### Memiliki Jiwa Pemimpin

Maju mundurnya sebuah perusahaan sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan pengusaha yang bersangkutan. Ciri kepemimpinan ini dicirikan oleh watak berperilaku sebagai pemimpin, mau bergaul dengan orang lain, mau menerima saran-saran dan kritik.

Bagaimana pencapaian responden pada ciri kewirausahaan ini dapat dilihat pada Grafik 5, dimana persentase responden yang memiliki perilaku pemimpin yang tinggi hanya 43,7%. Ini berarti sebagian besar atau lebih dari separuh responden belum memiliki perilaku pemimpin yang memadai untuk memimpin sebuah usaha. Adapun persentase responden yang memiliki keinginan yang tinggi untuk bergaul dengan orang lain cukup bagus dengan angka 78,1%. Ini menandakan bahwa responden memiliki pergaulan yang cukup baik, dan merupakan kekuatan yang sangat diperlukan oleh seseorang yang memimpin sebuah usaha sekecil apapun. Dengan pergaulan yang luas, seorang pengusaha dapat memajukan usahanya baik dari aspek produksi maupun pemasaran. Namun sungguh disayangkan, dari seluruh responden yang diwawancarai hanya 56,2% yang memiliki keinginan yang tinggi untuk menerima saran dan kritik. Bagaimanapun, ini adalah suatu kelemahan yang seharusnya tidak boleh ada pada pengusaha, karena dengan kemauan untuk menerima saran dan kritik, seorang pengusaha akan dapat memperbaiki kinerjanya baik dari aspek produksi maupun pemasaran.



Grafik 5: Persentase Tertinggi Responden pada Ciri Memiliki Jiwa Pemimpin

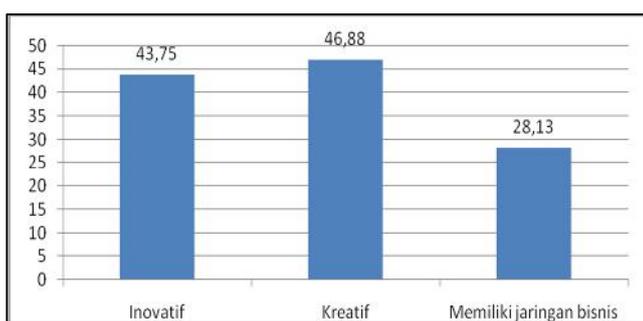
Sumber: Data Primer, 2016

Berdasarkan data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa kategori responden pada tiga watak dalam ciri kepemimpinan sangat bervariasi. Watak perilaku pemimpin dengan kategori “kurang baik”, sementara watak mau menerima saran dan kritik dengan kategori

“cukup baik”, dan watak mau bergaul dengan orang lain dengan kategori “baik”.

**Memiliki Keorisinilan**

Ciri keorisinilan yang digambarkan oleh watak Inovatif dan kreatif serta memiliki jaringan bisnis yang luas pada diri responden menunjukkan nilai yang sangat memprihatinkan. Seperti terlihat pada Grafik 6, persentase responden yang memiliki inovasi yang tinggi hanya sebesar 43,7%. Rendahnya persentase ini mengartikan bahwa sebagian besar responden tidak atau kurang memiliki inovasi. Oleh karenanya dapat diartikan bahwa para pengusaha yang menjadi responden dalam kajian ini ini hanya bergelut pada jenis-jenis produksi yang sama sepanjang waktu. Hal ini juga dibuktikan lagi oleh rendahnya angka persentase responden yang memiliki kreativitas yang tinggi, yakni hanya 46,9%. Kenyataan ini tidak mengejutkan karena inovasi dan kreativitas adalah dua hal yang saling terkait. Pada sisi lain, rendahnya nilai responden pada ciri keorisinilan ini ditunjukkan pula oleh rendahnya persentase responden yang memiliki jaringan bisnis yang luas, yakni hanya 28,1%. Memang ada sebagian kecil responden yang sudah memiliki jaringan bisnis pemasaran yang luas, bukan saja antar provinsi, tetapi antar pulau. Tetapi seperti ditunjukkan oleh data, jaringan bisnis dari sebagian besar dari responden hanya pada lingkungan lokal, atau paling jauh sekitar Jabodetabek. Berdasarkan data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa kategori responden pada tiga watak dalam ciri keorisinilan adalah “kurang baik”.



Grafik 6: Persentase Tertinggi Responden pada Ciri Keorisinilan

Sumber: Data Primer, 2016

**Berorientasi ke Masa Depan**

Salah satu aspek yang mempengaruhi maju tidaknya suatu usaha adalah apakah pemilik usaha tersebut memiliki orientasi ke depan atau tidak? Artinya, apakah

pengusaha yang bersangkutan memiliki persepsi dan cara pandang yang berorientasi pada masa depan atau tidak? Bila memiliki orientasi ke depan, seberapa tinggi atau besar orientasi tersebut. Meskipun orientasi tersebut dimiliki, namun bila nilainya rendah, maka orientasi tersebut tidak akan berpengaruh terhadap kemajuan isaha secara berarti. Tentu saja keadaan akan lebih buruk lagi bila ternyata orientasi itu tidak dimiliki oleh pengusaha.

Dalam hal pengusaha kecil pakaian jadi yang menjadi responden dalam penelitian ini, maka persentase responden dengan persepsi yang tinggi terhadap masa depan termasuk kategori “baik”, yakni sebanyak 78,1%. Ini merupakan suatu kekuatan yang dimiliki oleh responden untuk memajukan usahanya di masa depan.

Tabel 6. Karakteristik Kewirausahaan Responden pada Ciri Berorientasi ke Masa Depan (n = 32)

Keterangan	Jumlah	Persen
Persepsi ke masa depan		
• Tinggi	25	78,1
• Cukup tinggi	6	18,7
• Agak rendah	1	3,1
• Rendah	0	0,0

Sumber: Data Primer, 2016

Mencermati seluruh penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha kecil sebagaimana disebutkan dalam Tabel 5, tidak terlepas dari rendahnya nilai karakteristik kewirausahaan mereka, terutama pada ciri percaya diri, kepemimpinan, dan keorisinilan. Seperti disimpulkan oleh penelitian IPB (2012), karakteristik kewirausahaan berpengaruh positif terhadap kompetensi dan kinerja pengusaha secara keseluruhan. Dengan bahasa yang lain tetapi dengan maksud yang sama, Zimmerer (2000) mengutarakan ada beberapa faktor yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usaha barunya:

- Tidak kompeten dalam manajerial, termasuk di dalamnya manajemen keuangan.
- Kurang berpengalaman baik dalam kemampuan mengkoordinasikan, keterampilan mengelola sumber daya manusia, maupun megintegrasikan operasi perusahaan.
- Gagal dalam perencanaan.
- Sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha.
- Ketidakmampuan dalam melakukan peralihan/transisi kewirausahaan.



2. Pengaruh pengusaha bermodal besar dalam menentukan harga.	pengusaha utk mengurangi persaingan tak sehat dan pengaruh pengusaha bermodal besar dlm penentuan harga.	ketabahan, kerja keras, kemampuan mnj usaha, keorsinilan utk menghadapi persaingan dan kecemburuan sosial masyarakat setempat.
3. Kurang berperannya APIKI.		
4. Adanya kecemburuan sosial dari masyarakat setempat terhadap pengusaha pendatang.	2. Meningkatkan pendekatan agar APIKI terbuka kpd seluruh pengusaha, dan melakukan pembinaan kpd anggota. 3. Menggalang hubungan baik dengan tokoh masyarakat agar diterima baik oleh masyarakat.	2. Memahami dan meningkatkan kemampuan manajemen survival 3. Meningkatkan kemampuan bernegosiasi utk mendorong berperannya APIKI, dan menekan munculnya kecemburuan sosial masyarakat setempat.

Selanjutnya, agar para pengusaha kecil ini mampu melakukan hal-hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Depok harus memberikan dukungan antara lain dengan segera merealisasikan cetak biru pengembangan usaha kecil Kota Depok, yang sedapat mungkin harus memuat gambaran jelas mengenai pembagian usaha kecil menurut sub-sektor. Harus jelas berapa persen pangsa untuk usaha pakaian jadi, makanan dan minuman, kerajinan tangan, dan lain-lain sehingga tidak terjadi kelebihan kapasitas pada sub sektor tertentu sementara pada sub sektor lain justru di bawah kapasitas. Cetak biru ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengembangkan technopark wirausaha atau *technopreneurship* di Kota Depok. Selain itu, pemerintah Kota Depok sudah saatnya mengembangkan atau membangun sebanyak mungkin inkubator bisnis dan pelatihan-pelatihan tata kelola usaha, termasuk pendampingan kepada pengusaha binaan sehingga mereka dapat memperoleh teknik-teknik yang tepat pada saat menghadapi masalah.

Dukungan lain yang perlu diberikan oleh Pemerintah Kota Depok adalah membangun atau meningkatkan kemampuan pengusaha kecil untuk memahami dan melaksanakan manajemen survival (Susanto: 1998). Hambatan bisnis yang dihadapi oleh responden mungkin masih akan berlangsung dalam waktu yang relatif lebih panjang lagi. Oleh karena itu para pengusaha ini memerlukan persiapan yang cukup memadai untuk dapat bertahan hidup dalam kondisi

kurang menguntungkan ini sambil mempersiapkan diri untuk meraih peluang di waktu mendatang.

### KESIMPULAN

Menurut *Global Entrepreneurship Monitor*, Indonesia memiliki *The level of Total early-stage entrepreneurial activity (TEA)* yang tinggi, dengan tingkat ketakutan gagal yang rendah. Selain itu, di Indonesia juga terdapat kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk terlibat dalam TEA.

Pendapat tersebut di atas sungguh membanggakan dan menyejukkan hati. Pendapat ini mungkin benar seluruhnya atau sebagian, tetapi bisa juga salah seluruhnya atau sebagian. Bagaimanapun kita berharap pendapat ini benar seluruhnya. Namun demikian, pendapat ini tidak boleh membuat kita lengah. Dikatakan demikian karena selain rasio kewirausahaan di Indonesia masih tergolong rendah, dari penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya para wirausaha Indonesia, khususnya pada usaha-usaha kecil pakaian jadi seperti di Depok dapat memberi kontribusi yang sangat berarti dalam mencapai rasio wirausaha yang ideal di Indonesia. Tetapi hingga saat ini mereka masih memiliki banyak kelemahan ketimbang kekuatan. Kelemahan ini selanjutnya telah mengakibatkan rendahnya nilai karakteristik kewirausahaan. Selain itu, hambatan yang menghadang berkembangnya kewirausahaan di Depok juga masih banyak, termasuk belum optimalnya kebijakan atau program pemerintah yang ditujukan untuk mengembangkan kewirausahaan, termasuk usaha-usaha kecil.

Oleh karena itu, para pengusaha kecil pakaian jadi di Depok harus berupaya keras agar mereka dapat memiliki karakteristik kewirausahaan yang tinggi, yang selanjutnya diharapkan dapat membuat usaha yang mereka kelola berkembang di masa mendatang.

Namun demikian, para pengusaha kecil ini tidak boleh dibiarkan sendirian. Pemerintah Kota Depok harus hadir dengan memberikan dukungan nyata dalam berbagai bentuk, utamanya pengaturan wilayah usaha kecil, pelatihan, dan pendampingan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Boone, Louis. E. and David L. Curtz. 2013. *Contemporary Business*. 15th Edition. New York: John Wiley and Sons.
- Ebert, Ronald J. and Ricky W. Griffin. 2013. *Business Essential*. New Jersey: Prentice Hall.
- Hisrich, Robert D. and Michael P. Peters. 2009. *Entrepreneurship*. New York: McGraw-Hill. Inc.
- Institut Pertanian Bogor. 2012. *Analisis Pengaruh Karakteristik Kewirausahaan Terhadap Kinerja Wirausaha pada Unit Usaha Kecil Menengah (UKM) di Provinsi Jawa Barat*. Bogor.
- Meredith, Geoffrey. G. 1996. *Kewirausahaan: Teori dan Praktek*, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Rajagukguk, Zantermans. 2014. *Dampak MEA Terhadap Kesempatan Kerja di Indonesia dan Kebijakan yang Diperlukan*. Makalah disampaikan dalam Seminar dan Talk Show Tantangan Ketenagakerjaan 2015. FE-UII. Yogyakarta.
- . 2012. *Perkembangan Unit Usaha dan Tenaga Kerja Industri Kecil Indonesia 2005-2010*. Jakarta: Pusat Litbang Ketenagakerjaan.
- Susanto, A.B. 1998. *Survival Management*. Jakarta: Percetakan Negara.
- Tambunan, Tulus. 2000. *Perkembangan Industri Skala Kecil di Indonesia*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Zimmerer, Thomas. W. 2000. *Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management*, New Jersey: Prentice Hall.



## JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

*p-ISSN : 1907-2902 (Print)*  
*e-ISSN : 2502-8537 (Online)*

### CORRUPTION IN ACCESSING AND UTILIZING THE COMMON PROPERTY RESOURCES IN INDONESIA

#### (KORUPSI DALAM MENGAKSES DAN MENGGUNAKAN SUMBERDAYA ALAM MILIK BERSAMA DI INDONESIA)

**Lengga Pradipta**

Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
Korespondensi penulis: *lengga.pradipta@gmail.com*

#### **Abstrak**

Artikel ini mengkaji beberapa kasus korupsi yang berkaitan erat dengan pengelolaan sumberdaya alam, terutama dalam hal mengakses dan menggunakan sumberdaya alam milik bersama. Artikel ini ingin mengangkat persoalan krusial yaitu adanya kasus korupsi terhadap sumberdaya alam. Artikel ini menggunakan kerangka kerja berupa 'Sistem Socio-Ekologis', yang akan memberikan penjelasan tentang keterkaitan karakteristik ekologis atau alami ke dalam sistem sosial dan hukum. Selanjutnya, kerangka kerja ini menjelaskan tentang bagaimana masalah akan diselesaikan dan apa saja tindakan serta peraturan yang akan diterapkan dalam mengatasi masalah ini. Sumber data yang digunakan adalah data makro ditingkat nasional yaitu peraturan perundangan mengenai sumberdaya alam dan lingkungan di Indonesia dan didukung kasus di Sumatra Barat, Kabupaten Pasaman Barat. Data didapatkan dengan cara melakukan wawancara mendalam dengan penduduk lokal di sekitar perkebunan sawit. Korupsi dalam konteks pengelolaan sumberdaya alam milik bersama akan membawa banyak kerugian pada masyarakat dan negara karena akan menyebabkan semakin berkurangnya sumberdaya. Tentunya secara keseluruhan, pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab masyarakat dan sektor swasta, tapi juga sangat membutuhkan peran serta pemerintah dan pembuat kebijakan sebagai pemangku kepentingan utama..

**Kata Kunci:** Korupsi, Pengelolaan Sumberdaya Alam, Sumberdaya Alam Milik Bersama

#### **Abstract**

This article reviews corruption cases that are associated with natural resources management, especially in accessing and utilizing common property resources in Indonesia. A crucial fact about to highlight in this article is corruption case in natural resource. This article develops social-ecological systems (SES) framework to deliver a clear roadmap for incorporating more ecological or natural characteristics into studies that explores linkage social and legal systems. The framework therefore considers how problems are defined and how action and policy are formulated to deal with these problems. This article studies macro data in National level, the law on natural resource and environment in Indonesia. The case in West Pasaman is the evidence based. The data is gathered by interviewing local people who live around palm plantations in West Pasaman. Thus, this article is also linked with Indonesian regulation about environment and natural resources. Corruption in the context of managing common property resources brings many disadvantages to community and State because it will lead to the scarcity of resources. Overall, eradicating corruption is not only on the hands of community or private sectors, but also needs active involvement from government and policy-makers as the main stakeholders.

**Keywords:** Corruption, Natural Resources Management, Common Property Resources

## INTRODUCTION

Along with the rapid pace of globalization in recent decades, many stakeholders such as environmentalists, economists and policymakers put their concern on natural resources issues. Natural resources in Indonesia are State property resources<sup>1</sup>, it means that central government have responsibilities to enforce all activities regarding to access and utilize the resources. It is also stated in article 33 point 3 UUD 1945 which mentioned that any kind of natural resources controlled by the State and will be used for the prosperity of the nation<sup>2</sup>.

However, even when the regulation is well defined, the condition and factual case may not be the same. Many problems arise due to the inability of the governments to enforce regulations for natural resources. There are many research findings show that corruption is strongly related to the over-exploitation of natural resources. Thus, it has become evident that natural resources issue is a growing problem that leads to corruption. Corruption itself has been described as an evil with ecological implications (Sundstrom, 2013). For example, many tropical forests are State property, but in fact, they are over-exploited because illegal-logging still remained and law enforcement still has many obstacles. In Sumatra Island, West Pasaman is one of the targeted areas for forest conversion. Community forest has been converted to palm plantation since New Order era, and the condition is getting worse through times. At the other side, governments seem to have lack of willingness to apply severe penalties for the user who exploited natural resources. By this situation, we may assume that there are lots of corruptions in the context of managing the natural resources.

This article will describe about the effect of corruption, which related to environment and natural resources management. Moreover, it will be focused on the community because they hold double positions, first; as the main user of natural resources and second; as the victim of corruption. By these reasons, they have to get deep understanding about the nuances of corruption in accessing and utilizing natural resources. Given these ideas, the aim of this article is to explore the social-ecological systems (SES), which link between social and ecological system of resources users with the governance arrangements.

---

<sup>1</sup> As opposed to common access and common property resources, which suffer from the standard 'tragedy of the commons' problem leading to over-exploitation resources. See Heltberg (2002) for a nice survey of different property rights regimes regarding natural resources and their consequences.

The rest of the article is organized as follows; section 2 will discuss about previous research on how corruption affects common property resources. Section 3 will highlight the corruption and regulations in the context of legal sphere. Furthermore, section 4 will describe the investigations and findings related to corruption in common property resources. At the last section this article will be summarized.

## CORRUPTION AND THE COMMON PROPERTY RESOURCES

Corruption can be defined as cultural phenomena in our society, because it depends on how a society understands the rules and what constitutes a deviation (Melgar, 2009). Frankly, it also depends on personal values and norms. The Latin proverbs *quis custodiet ipsos custodiet* imply the satirical question; *who will guard the guards?* It reminds us that we may appoint officials or governments to guard our rights, but then we should be aware of their action, whether they are abusing the power they have or not. In this condition, we cannot avoid the dilemma that arises between society and governments.

The Latin proverbs, which mentioned above, are very similar to the Hardin's findings. Hardin defined that our biggest challenge is to invent the corrective feedbacks which are needed to keep the guard honest. Thus, since it always happened from time to time, we have to establish a solution to legitimate the need of authority of both guards and the corrective feedbacks (Hardin, 1968). This finding became a breakthrough among the researchers and they always used this theory to solve any cases, which related to natural resources overexploitation. Subsequently, this concern also led many stakeholders to have a serious effort in minimizing the cases in natural resources such as; forest depletion, land degradation and water crises.

Not all countries have rich biodiversity and natural resources. Unfortunately, most of the country, which endowed with natural resources, is not classified as high-income countries. Indonesia could be one of the examples, although Indonesia has enormous natural resources, most people are still trapped in poverty.

<sup>2</sup> UUD 1945, Article 33 point 3, "*bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*".

This condition is captured by many scholars; one of them is Eggert (2001) who puts his concern on the relation of economic sustainability and community welfare. He has a high-curiosity about the natural resources in Indonesia; he implies that natural resources could be a 'gift' or even a 'curse' for this country. Because he assumes that natural resources sometimes do not bring prosperity to people, especially if there is a misuse action on it. This theory leads to a statement, "*a curse in natural resources happened because the regulation is not appropriate*", and obviously this situation need to be revamped.

Discussing about natural resources also means discussed about common property resources, or mostly called as *common pool resources* (CPRs). Common pool resources can be explained as a resource system where it is costly to exclude potential beneficiaries, but one person's use subtracts resource units from those available to others. Most ecological systems used by multiple individuals can be classified as common-pool resources. Common-pool resources generate finite quantities of resource units. One person's harvesting of resource units from a common-pool resource subtracts from the quantity of resource units available to others (Ostrom, 2007). The example of common pool resources include both natural and human-made systems such as rivers, lands and forests.

Many literatures presented about common pool resources, especially literature which guides us to understand the relation about common pool resources and how to revamp the regulations and governance systems. Environmentalists, economists and policymakers sometimes defined the users as the victim of resources because they are unable to exclude themselves from the processes of overuse and potential destruction of the system. In spite of the previous fact, the users also facing a social dilemma, which actually indicates them to have cooperation with other stakeholders, so all burdens that rise in common pool resources could be bear together.

## **CORRUPTION AND REGULATIONS IN INDONESIA**

Corruption in Indonesia have 'entrenched' for decades, before and after independence, in the era of the Old Order, New Order, and still occurred until the Reformation Era. Many efforts have been established to eradicate corruption, but the results are still not sufficient. Historical experts in Indonesia are not interested to conduct their studies on corruption. They are more interested in political and social history,

whereas the impact of corruption can influence the political sphere and regulations.

The exploitation of Indonesia's natural resources since the 1960s has brought economic benefits to the country, but at the same time damaged the natural environment and society in resource-rich areas in a way that fosters social tensions and has led to violent conflict. Indonesia needs to manage its natural resources in a way that is fairer and more sustainable than in the past.

In reformation era, President Habibie has issued Act no. 28/1999 about Clean Government which means free from corruption, collusion and nepotism. However, the implementation of this Act faces many obstacles. Furthermore, this Act is also supported by the Act no. 31/1999 about Eradicating Corruption, this Act then amended to Act no. 20/2001 but still it cannot combat the corruption in Indonesia. The most tremendous situation happened under President Yudhoyono era, especially in the legislative council which they abused their own authority by issuing regulations that is always contradictive to people's welfare. By this fact, we may conclude that corruption hampers development process, poverty alleviation and destruct natural resources.

Regulation or legal reforms serve as a useful prism to view some of the persisting dilemmas that affect the overall enterprise of common-pool resources management (Lindsay, 2004). Ironically, the rhetoric of community-based resources management is that it is usually has not been matched by action on the ground. This is mirrored in legal provisions that are often only pale reflections of the robust policy pronouncements from which they emerge. New policies frequently establish – and can serve to entrench – a continuing ambivalence on the part of governments about relinquishing or sharing real power, and vesting significant rights in local people.

At the same time, there is a gap between regulations and gigantic corruption in common pool resources. Corruption in common pool resources destroys local communities in many forms, social and ecological sustainability or even their livelihood condition. Conversely, there are no 'legal solutions' for such burdens, what they actually need are legal aspects which are more realistic and better mechanisms or methodologies that stand on their side. In a more concrete situation, corruption is charged to cause depletion of tangible resources, which is typical of a common pool resource. Corruption can lead to the bankrupting of the state or at least reduce its ability to provide public services effectively and efficiently. One might conceptualize the collective benefit here to be the

percentage of the public purse allocated to the provision of services, and free riding—engaging in corrupt behavior—as reducing or depleting the capacity of the state to take care all citizens to its actual financial potential.

Furthermore, the root of the environmental problem is corruption in the management of common pool resources and it is intended to perpetuate control over natural resources both economically and politically. Corruption is not only detrimental to the country in terms of the state budget either through taxes or bribes in licensing, the shocking fact shown that the corruption in common pool resources sector has given bad impact to people's welfare and destroy the environmental quality which leads to ecological disaster. In the context of human rights, we have to ensure the State to protect, respect and fulfill their right to use the environment. Thus, the State is supposed to be in the frontline to urge corporate responsibility for crimes against the environment and humanity that has been conducted. It means, the State should not be subject to corporate power.

The crucial research problem guiding this article is thus how we can understand why the corruptibility authorities affect community as the users of common pool resources. In order to extract additional knowledge related to the above facts the following two questions need to be answered:

- Does the social ecological system (SES) framework support the people to manage their resources?
- Does corruption of both government and private stakeholders affect CPR users' willingness to comply with regulations?

Aiming to answer these two questions this article uses primary data from interviews with community in West Pasaman district. This case is chosen on the basis that the sector is governed by a regime with high levels of corruption. Moreover, if we are interested to apply the social-ecological systems (SES) in this topic, this case provides a deep investigation. Interviews are used since this is useful particularly for accessing individuals' perceptions. In-depth interviews were held with ten respondents, and they came from forest area in West Pasaman.

West Pasaman district is also chosen for the study because there are huge numbers of community forests converted into oil palm plantations. Based on the latest data from HuMa (2014) there are 4.777 hectares of forests converted into oil palm plantations. The

existence of forest, which is supposed to be common pool resources gradually disappeared, and private stakeholders expanded their business into million hectares of oil palm plantation. Ironically, this action did not improve the economic condition of community. Every year West Pasaman is still categorized as "poor" and always subsidized by central government (Steni, 2013).

Hence, the interview processes were mostly performed in the respondent's residences and usually in *Bahasa Indonesia* and *Bahasa Minang*. They preferred to speak in both languages because not all respondents in West Pasaman originally came from West Sumatera Some clans such as Javanese and Bataknese also lived in that area. Surprisingly, they could explain at length on issues related to forestry regulations. Confidentiality was promised and sensitive information was discussed that put the researcher in the position of having to keep the promises of discretion to respondents rather than informing law agents of criminal acts.

## FINDINGS AND DISCUSSION

This article began with the social and ecological systems as an assumption which can lead to good governance of common pool resources. In this phase, the analysis begins with an overview of social ecological systems (SES) framework – in West Pasaman district – and mainly focused on the management of common pool resources. Then it also addresses corruption cases in the government and private stakeholders sphere and how it will affect the people in that area. Finally, the findings and discussion will be summarized by outlining policy implications and further research in common pool resources in Indonesia.

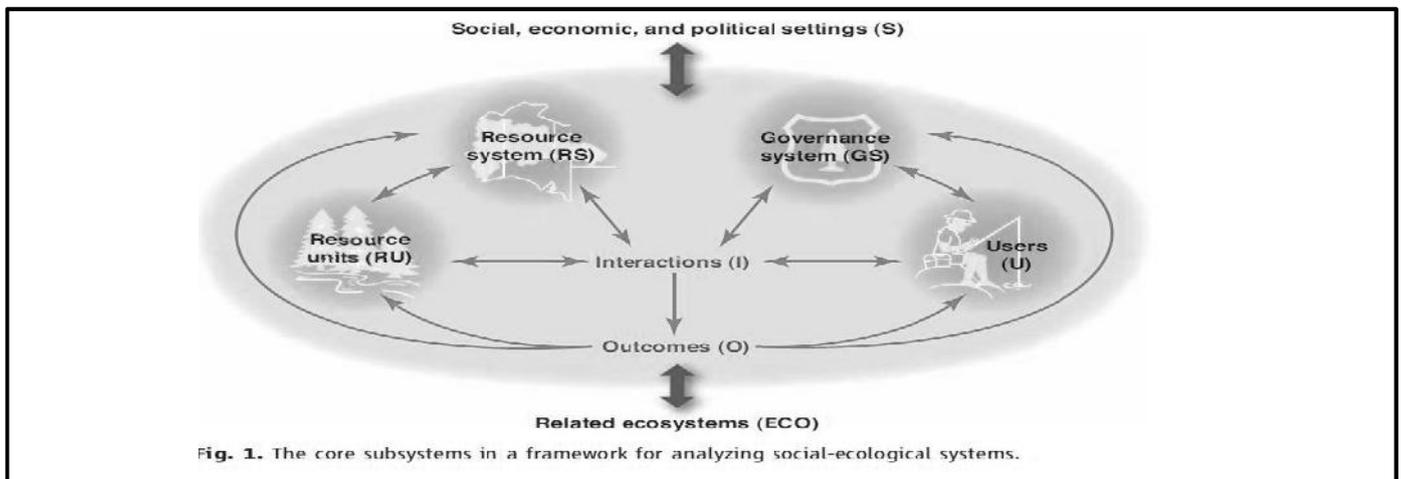
### a. The Social Ecological Systems in the Context of Common Pool Resources

As mentioned before, common pool resources (CPR) are resources in which; (i) consumption by one limits consumption by another and (ii) it is difficult to exclude people from them. More precisely, CPRs are resources that are limited and very difficult to manage with private property rights. The forests described in these cases are a classic example of common pool resources. Forests are limited resources, and it is difficult to keep them from being overexploited. The term "commons" is informally used to refer to public goods, common pool resources, or any area with uncertain property rights. Moreover, for analytical purposes it is very crucial to explain it more specific (Chou, 2010).

However important the commons are to the lives of millions of the poor, they are often neglected by State policies. Historically, the commons were either not governed well or not governed at all. In general, the resources were just there and they were often seen as under the nebulous management of the unseen State and could be accessed by anyone who might find them useful. The appropriation was often uncontrolled since the resources considered abundant. The risk of this assumption is the overexploitation and over-extraction of resources, and it is called ‘the tragedy of the commons’.

To properly understand the nature of the SES at any point in time or space, the relationship between socio-ecological resilience, ecosystem change and politico-economic processes must be examined. The argument here is that levels of socio-ecological resilience are primarily mediated by the nature, capacity and location of ecosystem management. This, in turn, is articulated by institutional capacity and by the ability, need and

volition to administer ecological goods and services, particularly forests.



Many scholars tried to find a well-established formula to save the common pool resources from destruction. The idea to save the resources then brought them to create a new framework called social-ecological systems (SES). Without any objection, this breakthrough gave a clear roadmap for incorporating more ecological or natural characteristics into studies exploring linked social and legal systems. This article tries to develop the concept of social-ecological systems. As we all know, it is used to describe ecosystem functionality as derived from a set of natural and socio-economic processes that cannot be separated from one another as one impact and amends the other. It can be assumed as interdisciplinary analysis.

From the figure, we can see that SES is framework which provides the equal attention to biophysical and ecological foundations of institutional systems. Nowadays, it exists as classification systems that highlight all major variables, and people have to keep it on their mind that need to manage both sides, the human behavior and natural resources. Subsequently, we may imply that this system is characterized by variable of human and physical inputs, processes and outputs. The nature of the processes is as such that it is hard to maintain human or physical discretion as all processes interact and impact on each other (Flint, 2008).

The Social Ecological System (SES) framework obviously supports people around the forest in managing their resources. SES is based on assumptions about human behavior or ecological dynamics that are uncertain but potentially have a substantial effect on model outcomes. Moreover, lack of knowledge on the decision making process of human agents, on how future benefits are valued, on how actors learn, or on the processes that are considered relevant for the dynamics of a natural resource, such as the reproduction and growth of a natural resource. This is very important in an interdisciplinary context where theories and assumptions that stem from different disciplinary backgrounds are often unknown to researchers from other disciplines.

In this case, they learned to manage their forests in a proper way. If this framework is applied, the level of resources loss can be decreased. The management of any resources needs a balance between the interests of various stakeholders. In local management settings, the proper balance between local choice and the broader public interest may be extremely contested. The arguments for greater local choice may be more or less compelling depending on a wide number of variables, ranging from the nature of the resource, to the

externalities of resource extraction, to the capacity of the community. Hence, it is difficult in the abstract to evaluate social and legal in terms of the extent to which it unduly limits local decision making.

Deciding where local choice should prevail and where it can legitimately be trumped by wider interests has seldom been given the reflection it deserves in the design of SES frameworks. What is striking when one looks at even some of the most progressive new framework supporting community-based management is how jealously government holds to the decision-making function. An interesting fact here is that community needs to manage their own resources, and governments have to support their capacity by giving education, not by conducting corruption.

### **b. Corruption Hampers the Enforcement of Environmental Regulations**

In Indonesia, there are many legal instruments regarding to environment were established since reformation era. The regulation about forestry is implied by Act. No 41, 1999. Although this regulation was made decades after Indonesia's independence, it was still imperfect because it did not consider the existences of indigenous people in Indonesia. Since then, it has raised many kontras. Indigenous people, environmentalists and green activists tried to propose a judicial review to Constitutional Court.

Besides forest regulation, Indonesia's government also produced a regulation about protecting and managing environmental resources, which reflected in Act. No 32, 2009. However, this regulation has many drawbacks, especially on the involvement of community in managing their resources. Article 26 point (2) stated that: *"community involvement should be based on the principle of transparency and complete information and should be notified before the environment activities carried out"*. In this article, there is no complete information about the format and what is the legal remedy over it. Furthermore, the similar condition can be seen in article (4), which also makes people ambiguous to interpret the regulations. In article (4) is stated: *"community, as referred to paragraph (1) may propose their objection to environmental impact assessment (EIA) documents"* this statement did not follow by clear explanation and it causes the confusion about what kind of community rejects the document, it will destroy the rights of community in the development process.

Moreover, the Act No 32, 2009 has not been fully-understood by community. The majorities of

Indonesian people do not understand the substances of environmental regulations because the structure is too academic and hardly touch rural people's knowledge. In practice, this regulation is useless and can only be used by minorities of people who have rational thinking. Actually many things may affect the law enforcement,. The Act is very crucial in this issue, but the importance of other factors such as community-awareness cannot be denied.

This condition is getting worse because of intellectual stakeholders such as government and private sectors are also doing corruption over the resources. Although the regulations combating corruption has been implied in Act no. 20, 2001 but still they are trying to get enormous profit and neglected the needs of community. This law enforcement does not go easy. There are several barriers that are often encountered, in particular, it is very difficult to find experts in forestry issue and green-lawyer who have concerns on environment. Moreover, the geographical conditions of common pool resources are difficult to reach is another big obstacle.

For example, in West Sumatera, there are million hectares of forests but it does not bring prosperity to the people. According to Statistics Indonesia, in 2011, the number of poor people in West Sumatra is about 442.090. Approximately, 68% of that number lives in rural areas or villages. This atmosphere does not give significant changes in governance level, where corruption occurred even more severe. West Sumatera is classified as a province with a significant level of corruption. For example, 43 people of legislative council became convicted of corruption cases (<http://www.antikorupsi.org>).

As mentioned before, West Pasaman is a district that has million hectares of forests in West Sumatera. But now the forests in West Pasaman are altered into oil palm plantation. These oil palm plantations are established mostly by large-scale private stakeholders and they just ignored the prosperity of the indigenous people. This action, of course, did not improve the economic condition of community and until now West Pasaman is still categorized as a poor and isolated district. By these facts we can see that corruption and overexploitation of resources are occurred in both government and private sectors. This situation is very pathetic. Government had created the natural resources sector for a classic open access commons or properties – but at the same time they are also denying ownership of local people, it makes natural resources have become a free-for-all and a 'tragedy of the commons' is unfortunately took place.

The accounts above indicate that corruption affect common pool resources. Consequently, the community around the forests will be influenced by this action and it affects their attitudes to regulations. In Kinali, a sub-district in West Pasaman, a respondent revealed a shocking fact;

*“There has been a scandal related to our forests, ‘Niniak Mamak’<sup>3</sup> are agreed when private sectors make the (oil) palm plantation in our forests and they got some compensation through that agreement, but unfortunately, Niniak Mamak do not want to allocate that compensation for the prosperity of the clans”.*

This cynical opinion came out from a key-informant in that area. It indicates that corruption has spread from the highest level to the lowest. This condition surely decreases people’s willingness to comply with regulations.

This study contributes insights for scholars and practitioners interested in forests as common pool resources, illuminating how legal aspects need to be considered. However, some aspects of these findings can be expanded to other setting such as social and ecological systems. Being a regime with complex context and a corrupt enforcing authority, the forest does inhibit special features. Therefore, the findings from this article could arguably be expanded to have relevance also in other corrupt settings. Though the respondents were not large in numbers, they were selected in order to maximize their diversity in relevant aspects. A next step for researchers could be to broaden the sample, including CPR users from other settings.

## CONCLUSIONS

The aim in this article is to develop understanding of why corruption affects common pool resource (CPR) users’ to regulations and, more specifically, to explore the social-ecological systems (SES) in the context of common pool resources. Accounts from confidential interviews with forests community illustrate how the widespread corruption within the enforcing authority makes it into tremendous effects.

The causes of corruption in the environmental sector includes typical causes attributed to any other sectors: insufficient legislation, lack of respect for the rule of law, weak democracy, wide authority given to public

officials, minimal accountability and transparency, poor enforcement, low levels of professionalism, and perverse incentives. In addition, corruption in the environmental sector is also triggered by conflicts between private interests in revenue that can be gained from environmental resources and public interests in a healthy environment. Strategies to address corruption in the environmental and natural resources sector include a combination of enforcement, prevention and awareness elements. For sustainability, anti-corruption efforts need to emphasize preventive reforms and public awareness components because these ultimately reduce the opportunities for corruption.

The article contributes to our theoretical understanding of the relationship between corruption and common pool resources in two distinctive ways. First, this study elucidates the complex frameworks of social and ecological system. It shows that an integrative or interdisciplinary solution can be an extraordinary formula to solve the cases about common pool resources. Secondly, results from this study illustrate how corruption hampers the effectiveness of regulations. In order to improve the effectiveness of regulations of natural resources in states where corruption is a widespread malady, policy-makers and practitioners have to improve the role of government in every sector. The findings from this study should serve as a reminder that corruption in forests – and common pool resources management in general – needs to be addressed with renewed and advance strength. To sum up, there is a crucial need of some legal experts who have experiences in legal and environmental fields to share and evaluate ideas and techniques about common pool resources.

## REFERENCES

- Chou, Chea. 2010. *The Local Governance of Common Pool Resources: The Case of Irrigation Water in Cambodia*. CDRI Working Papers No. 47. August 2010.
- Eggert, Roderick G. 2001. *Mining and Economic Sustainability: National Economies and Local Communities*. International Institute for Environment and Development.
- Flint, Lawrence S. 2008. *Socio-Ecological Vulnerability and Resilience in an Arena of Rapid Environmental Change: Community Adaptation to Climate Variability in the Upper Zambezi Floodplain*. Research Institute for Humanity and Nature (RIHN). June 2008.

<sup>3</sup> Niniak Mamak is the elder and respected groups in Minangkabau terms.

- Hardin, Garrett. 1968. 'The Tragedy of The Commons' (1968) 162 (3859), JSTOR, <<http://cecs.wright.edu/~swang/cs409/Hardin.pdf>> accessed on 12 May 2014.
- Heltberg, Rasmus. 2002. "Property Rights and Natural Resource Management in Developing Countries". Journal of Economic Surveys. Vol 16, No 2, 2002. 189-214.
- HuMa. 2014. *Ruang Gerak Masyarakat dalam Mengontrol Perizinan Kelapa Sawit*. HuMa and the Asia Foundation. Maret 2014.
- Lindsay, Jonathan. 2004. *Legal Framework and Access to Common Pool Resources*. FAO Legal Papers Online #39. September 2004.
- Melgar, Natalia. 2009. 'The Perception of Corruption' (2009) 22 (1), IJPOR <<http://ijpor.oxfordjournals.org/content/22/1/120.full>> accessed on 11 May 2014.
- Ostrom, Elinor. 2007. *The Governance Challenge: Matching Institutions to the Structure of Social-Ecological Systems*. Princeton University Press.
- Steni, Bernadinus. 2013. *Hak Masyarakat Atas Tanah dan Sumber Daya Alam Dalam Strategi REDD+*. Perkumpulan HuMa Indonesia.
- Sundstrom, Aksel. 2013. *Corruption in the Commons: Why Bribery Hampers Enforcement of Environmental Regulations in South African Fisheries*. International Journal of the Commons. Vol. 7, No. 2 August 2013. 454-472.
- <http://www.antikorupsi.org/id/content/43-mantan-anggota-dprd-sumbar-segera-dieksekusi>. Accessed on May 19, 2014

## PANDUAN PENULISAN JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

Naskah yang akan diterbitkan dalam Jurnal Kependudukan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Naskah adalah karya asli yang belum pernah dipublikasikan di media cetak lain maupun elektronik.
2. Naskah dapat berupa hasil penelitian, gagasan konseptual, tinjauan buku, dan jenis tulisan ilmiah lainnya.
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan menggunakan tata bahasa yang benar.
4. Naskah ditulis dengan menggunakan model huruf Times New Roman, font 12, margin atas 4 cm, margin bawah, 3 cm, margin kanan 3 cm, dan margin kiri 4 cm, pada kertas berukuran A4 minimal 5000 kata, diketik 1,5 spasi dengan program Microsoft Word. Setiap lembar tulisan diberi halaman.
5. Isi naskah terdiri dari;
  - a. Judul ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Judul harus mencerminkan isi tulisan, bersifat spesifik dan terdiri atas 10-15 kata.
  - b. Identitas Penulis yang diletakkan di bawah judul, meliputi nama dan alamat lembaga penulis serta alamat email
  - c. Abstrak dan kata kunci dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Abstrak ditulis dalam satu paragraf dengan jumlah kata antara 100-150. Isi abstrak menggambarkan esensi isi keseluruhan tulisan.
  - d. Pendahuluan yang berisi tentang justifikasi pentingnya penulisan artikel, maksud/tujuan menulis artikel, sumber data yang dipakai, dan pembabakan penulisan.
  - e. Tubuh/inti artikel berisi tentang isi tulisan, pada umumnya berisi tentang kupasan, analisis, argumentasi, komparasi, dan pendirian penulis. Bagian inti artikel dapat dibagi menjadi beberapa subbagian yang jumlahnya bergantung kepada isu/aspek yang dibahas.
  - f. Kesimpulan berisi temuan penting dari apa yang telah dibahas pada bagian sebelumnya.
  - g. Tampilan tabel, gambar atau grafik harus bisa dibaca dengan jelas dan judul tabel diletakkan diatas tabel, sedangkan judul gambar atau grafik diletakkan dibawah gambar atau grafik serta dilengkapi dengan penomoran tabel/gambar/grafik.
  - h. Acuan Pustaka diupayakan menggunakan acuan terkini (lima tahun terakhir)
- i. Penulisan daftar Pustaka mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - Kutipan dalam teks: nama belakang pengarang, tahun karangan dan nomor halaman yang dikutip  
Contoh: (Jones, 2004:15), atau Seperti yang dikemukakan oleh Jones (2004:15).
  - Kutipan dari buku: nama belakang, nama depan penulis, tahun penerbitan. *Judul buku*. kota penerbitan: penerbit.  
Contoh: Horowitz, Donald. 1985. *Ethnic Groups in Conflict*, Berkeley: University of California.
  - Kutipan dari artikel dalam buku bunga rampai: nama belakang, nama depan pengarang, tahun. "judul artikel" dalam nama editor (Ed.), Judul Buku. nama kota: nama penerbit. Halaman artikel.  
Contoh: Hugo, Graeme. 2004. "International Migration in Southeast Asia since World War II", dalam A. Ananta dan E.N.Arifin (Eds.), *International Migration in Southeast Asia*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. hal: 28—70.
  - Kutipan dari artikel dalam jurnal: nama belakang, nama depan penulis, tahun penerbitan. "Judul artikel", Nama Jurnal, Vol (nomor Jurnal): halaman.  
Contoh: Hull, Terence H. 2003. "Demographic Perspectives on the Future of Indonesian Family", *Journal of Population Research*, 20 (1):51—65.
  - Kutipan dari *website*: dituliskan lengkap alamat *website*, tahun dan alamat URL dan html sesuai alamatnya. *Tanggal download*.  
Contoh: World Bank. 1998. <http://www.worldbank.org/data/countrydara/countrydata.html>. Washington DC. Tanggal 25 Maret.
  - Catatan kaki (*footnote*) hanya berisi penjelasan tentang teks, dan diketik di bagian bawah dari lembaran teks yang dijelaskan dan diberi nomor.
6. Naskah dikirim melalui email: [jki.ppklipi@yahoo.com](mailto:jki.ppklipi@yahoo.com) dan [jurnalkependudukanindonesia@mail.lipi.go.id](mailto:jurnalkependudukanindonesia@mail.lipi.go.id)
7. Kepastian pemuatan/penolakan naskah akan diinformasikan melalui e-mail.
8. Redaksi memiliki kewenangan untuk merubah format penulisan dan judul tulisan sesuai dengan petunjuk penulisan, serta mengatur waktu penerbitan.

ISSN 1907-2902  
Nomor Akreditasi 560/AU1/P2MI-LIPI/09/2013

**Jurnal**  
Vol. 10, No. 2, Desember 2015

# KEPENDUDUKAN INDONESIA

Conflicts and Segregation of Housing Communities and Surrounding  
*Piri Yandri*

Globalisasi Migrasi dan Peran Diaspora: Suatu Kajian Pustaka  
*Haning Romdiati*

DPSIR Model as A Tool to Asses Land Conversation  
Tariff Policy in Yogyakarta  
*Nina Novira, Syarifah Aini Dalimunthe, Aditya Pandu Wicaksono,  
Nur Indah Sari Dewi dan Triana Sefti Rahayu*

Memahami Adaptasi Penduduk Terhadap Perubahan Iklim  
untuk Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih di Pulau-pulau  
Kecil Belitung dan Bintan  
*Laksmi Rachmawati*

Membaca Kembali Dinamika Kependudukan Dataran Tinggi  
dalam Konteks Perubahan Ekologi dan Intervensi Negara:  
Perspektif Ekologi Politik  
*Nur Rosyid*

Penciptaan Mata Pencaharian Alternatif: Strategi Pengurangan  
Kemiskinan dan Perlindungan Sumber Daya Laut  
(Studi Kasus Kota Batam dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan)  
*Mita Noveria dan Meirina Ayumi Matamassam*

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

Jurnal Kependudukan Indonesia	Vol. 10	No. 2	75-150	Jakarta, Desember 2015	ISSN 1907-2902
----------------------------------	---------	-------	--------	---------------------------	-------------------

Jurnal KEPENDUDUKAN INDONESIA Vol. 10 No. 2, Desember 2015



ISSN 1907-2902



9 771907 290214